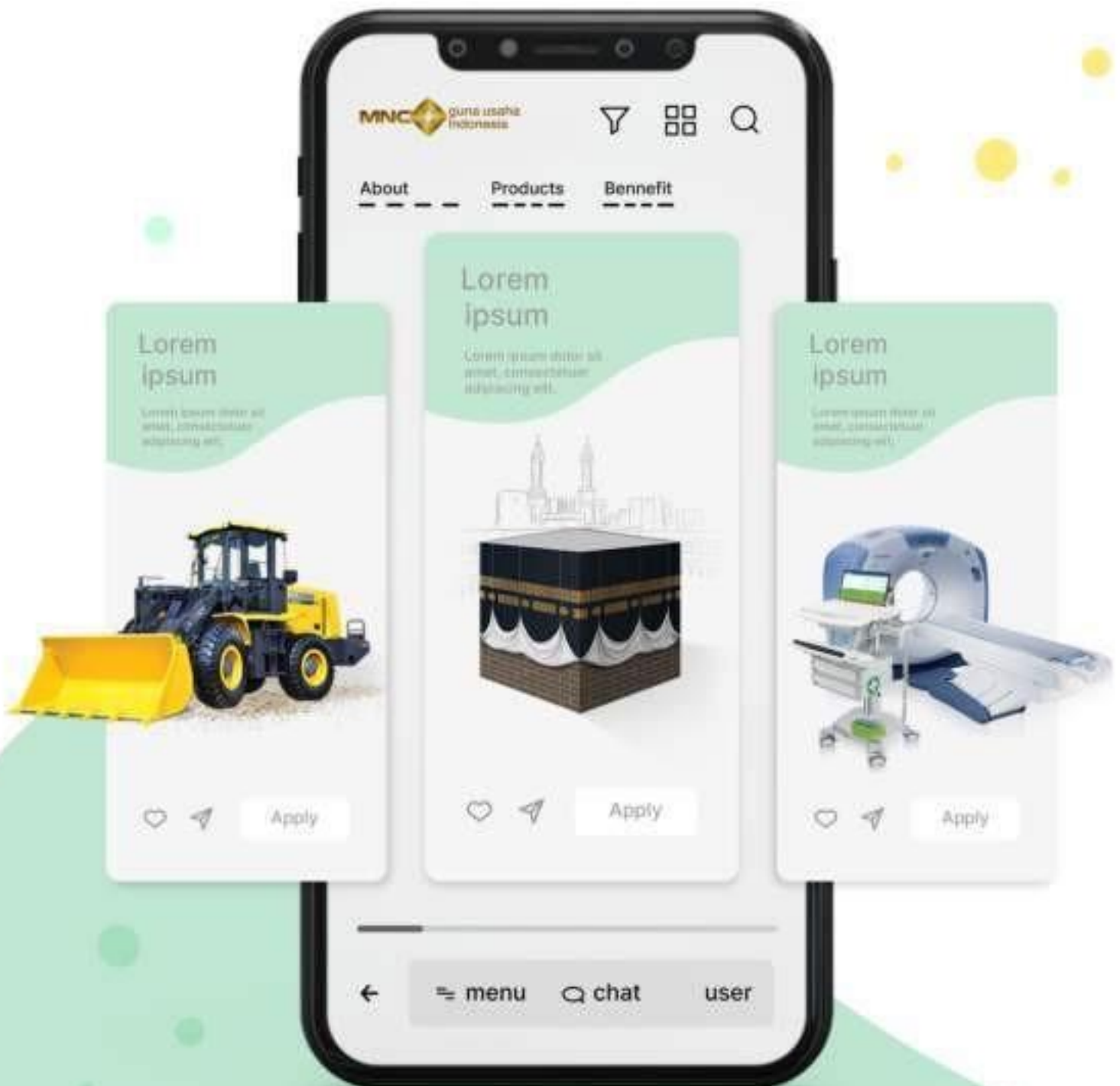


TRANSFORMATION TO THE NEW NORMAL

Menghadapi badai krisis dengan transformasi bisnis



DAFTAR ISI

iii

Ikhtisar Data Keuangan Penting

15

Laporan Dewan Pengawas Syariah

iv

Peristiwa Penting 2020

17

Profil Dewan Pengawas Syariah

07

Laporan Dewan Komisaris

21

Laporan
Direksi

11

Profil Dewan Komisaris

24

Profil Direksi

29

Profil Perseroan

13

Perkara Penting Yang Dihadapi

39

Pembahasan Dan Analisis Manajemen

6

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

46

Manajemen Resiko

13

Pernyataan Dewan Komisaris Dan Direksi

67

Tata Kelola Perusahaan

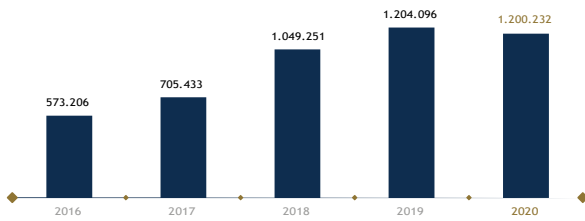
9

14

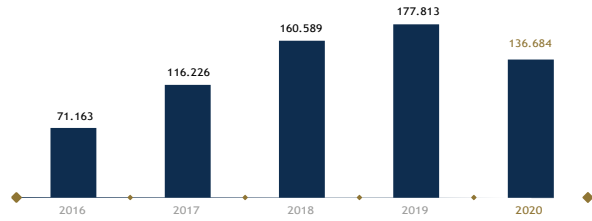
IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Summary of Significant Financial Data

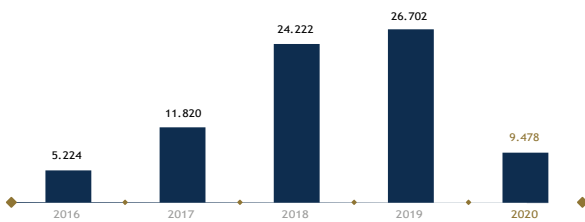
Total booking / Total booking



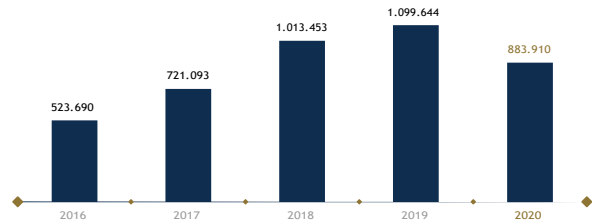
Pendapatan / Revenue



Laba bersih / Net profile after taxn



Aktiva dikelola / Asset managed



Key Ratios

ROA

1.54%

ROE

3.63%

Non Performing Loan

1.38%

Isi Memang
blm ada



LAPORAN
DEWAN KOMISARIS


01

LAPORAN DEWAN KOMISARIS

Report of Board of Commissioners



● **WITO MAILOA**
Komisaris Utama
President Commissioner



“Situasi pandemi global yang mendadak terjadi pada tahun 2020 membuat perseroan harus cepat beradaptasi dan berinovasi. Perseroan mampu untuk mempertahankan non-performing loan tetap terjaga dan berada jauh dibawah rata-rata industri. Sebagai inovasi, perseroan berkomitmen untuk menggunakan teknologi dalam proses digitalisasi bisnis. Seluruh inisiasi yang dilakukan perseroan, membawa optimisme dan semangat baru untuk bertahan dan tetap bertumbuh meskipun masih dalam masa pandemi”

“The sudden global pandemic situation that occurred in 2020 forced the company to quickly adapt and innovate. The Company was able to maintain non-performing loans well below the industry average. As an innovation, the company is committed to using technology in the business digitization process. All of the initiatives carried out by the company bring optimism and new enthusiasm to survive and continue growing even though it is still in the pandemic period.”

Para pemegang saham dan pemangku kepentingan yang terhormat,

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya sehingga Perseroan dapat menutup tahun 2020 dengan baik. Dalam laporan ini, Dewan Komisaris menyampaikan laporan mengenai penilaian kinerja Direksi, pengawasan terhadap implementasi strategi perusahaan, pandangan atas prospek usaha, pandangan atas implementasi tata kelola perusahaan dan penilaian atas komite-komite penunjang Dewan Komisaris.

Dear shareholders and stakeholders,

We thank God Almighty for His grace so that the Company was able to close the year 2020 well. In this report, the Board of Commissioners submits a report on the assessment of the Board of Directors' performance, supervision on the implementation of corporate strategy, views on business prospects, views on the implementation of corporate governance and assessment of the committees supporting the Board of Commissioners.

LAPORAN DEWAN KOMISARIS Report of Board of Commissioners

Sepanjang tahun 2020, kita semua terkejut dengan adanya pandemi covid-19 berskala global. Hal ini berdampak kepada hampir seluruh pelaku bisnis.

Situasi industri pembiayaan sepanjang tahun 2020 menjadi sebuah kejutan dimana pandemi covid-19 menjadi sebuah momen yang berpengaruh banyak terhadap bisnis perseroan. Namun perseroan mampu untuk tetap menjaga performa terutama Non-performing Financing berada di bawah rata-rata industri.

Dalam melakukan pengawasan, selama tahun 2020 Dewan Komisaris secara aktif memanfaatkan fungsi komite-komite di bawah Dewan Komisaris untuk melakukan review secara periodik terhadap rencana kerja, pelaksanaan rencana kerja, kinerja keuangan, laporan-laporan audit internal, eksternal auditor dan/ atau regulator serta laporan-laporan lainnya yang tersedia. Hasil review tersebut dilaporkan dan dibahas kembali dalam rapat internal Dewan Komisaris.

Selama tahun 2020, Dewan Komisaris telah melakukan fungsi pengawasan secara aktif dan berkala atas pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik demi menjamin tercapainya kepentingan Perseroan dan para Pemangku Kepentingan Perseroan. Untuk memastikan bahwa seluruh mekanisme pengawasan yang dijalankan oleh Dewan Komisaris sudah berjalan optimal, Dewan Komisaris telah dibantu oleh Komite Audit, Komite Tata Kelola, Komite Pemantau Risiko dan Komite Nominasi & Remunerasi. Dewan Komisaris menilai bahwa ke-4 komite tersebut telah memberikan dukungan pro-aktif dan efektif kepada Dewan Komisaris sehingga mempermudah tugas Dewan Komisaris di dalam melakukan tugas pengawasannya. Dalam pelaksanaannya, Dewan Komisaris memandang bahwa struktur Tata Kelola Perusahaan yang telah dikembangkan di lingkungan Perseroan sudah sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dinilai dapat mendukung pertumbuhan Perseroan yang sehat secara berkesinambungan.

Atas nama Dewan Komisaris, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada pemegang saham, mitra bisnis, pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan yang telah memberikan kepercayaan dan dukungan bagi

Throughout 2020, we were all shocked by the global scale of the COVID-19 pandemic. This has impacted almost all business people.

The situation of financing industry throughout 2020 was a shock since the covid-19 pandemic became a moment having a great impact on the company's business. However, the company was able to maintain its performance, especially the Non-performing financing, which was below the industry average.

In carrying out the supervision, during 2020 the Board of Commissioners actively utilized the functions of the committees under the Board of Commissioners to conduct periodical reviews of work programs, implementation of work programs, financial performance, reports of internal audit, external auditors and/or regulators as well as other reports available. The results of reviews are reported and discussed again in the Board of Commissioners' internal meeting.

During 2020, the Board of Commissioners has carried out an active and periodic supervisory function on the implementation of good Corporate Governance in order to ensure the achievement of the interests of the Company and the Company's Stakeholders. To ensure that all supervisory mechanisms undertaken by the Board of Commissioners have worked optimally, the Board of Commissioners has been assisted by the Audit Committee, Governance Committee, Risk Monitoring Committee and Nomination & Remuneration Committee. The Board of Commissioners considers that the 4 committees have given pro-active and effective supports to the Board of Commissioners so as to facilitate the Board of Commissioners in carrying out their supervisory duties. In its implementation, the Board of Commissioners considers that the structure of Corporate Governance developed within the Company has complied with the Articles of Association and applicable legislation so that it is considered able to support the Company's healthy growth sustainably.

On behalf of the Board of Commissioners, I would like to thank the shareholders, business partners, customers and all stakeholders who have given their confidence and support for the Company's development. Furthermore, I

perkembangan Perseroan. Selanjutnya saya juga memberikan apresiasi kepada Direksi, segenap jajaran manajemen dan seluruh karyawan yang telah bekerja keras untuk mendukung pertumbuhan bisnis Perseroan. Semoga prestasi yang telah diraih dapat terus ditingkatkan pada masa mendatang.

also express my appreciation to the Board of Directors, all levels of management and all employees who have worked hard to support the Company's business growth. Hopefully the achievements reached can continue to be improved in the future.

Atas Nama Dewan Komisaris,
on behalf of Board of Commissioners,



Wito Mailoa

Komisaris Utama
President Commissioner

PROFIL DEWAN KOMISARIS

Board of Commissioner's Profile



Wito Mailoa
Komisaris Utama
President Commissioner

Warga Negara Indonesia, lahir di Manado pada tahun 1969. Saat ini berdomisili di Jakarta. Beliau menyelesaikan pendidikan formal pada tahun 1991 dengan gelar Bachelor of Science in Management Information System dari San Diego State University, Amerika Serikat. Selanjutnya gelar Master of Business Administration in Finance dari California State Polytechnic University Pomona, Amerika Serikat, pada tahun 1993.

Bergabung dengan MNC Group melalui PT MNC Securities sebagai Direktur Utama pada Oktober 2009 sampai tanggal 21 Januari 2013. Beliau memulai karir pada tahun 1995 di PT Harumdana Securities dan pada tahun 1998 di PT Sigma Batara Securities. Kemudian pada tahun 1999 beliau menjadi Associate Director di PT Indoverse Securities. Antara tahun 2001–2008 beliau menjabat sebagai Direktur di PT CIMB–GK Securities Indonesia, antara tahun 2008–2009 menjabat sebagai Direktur di PT OSK Nusadana Securities Indonesia, menjabat sebagai Direktur Independen PT MNC Kapital Indonesia Tbk antara tahun 2012–2016, dan menjabat sebagai Direktur PT MNC Kapital Indonesia Tbk antara tahun 2016–2018, dan sejak tanggal 31 Mei 2018 diangkat menjadi Direktur Utama PT MNC Kapital Indonesia Tbk.

Diangkat sebagai Komisaris Utama Perseroan berdasarkan hasil Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 21 September 2018.

Indonesian citizen, born in Manado in 1969. Currently domiciled in Jakarta. He completed his formal education in 1991 with a Bachelor of Science in Management Information System of San Diego State University, United States of America. Subsequently, he obtained a Master of Business Administration in Finance from California State Polytechnic University Pomona, United States of America in 1993.

Joined MNC Group through PT MNC Securities as President Director from October 2009 to January 21, 2013. He started his career in 1995 at PT Harumdana Securities and in 1998 at PT Sigma Batara Securities. In 1999 he became Associate Director at PT Indoverse Securities. Between 2001–2008 he served as Director at PT CIMB–GK Securities Indonesia, between 2008–2009 he served as Director at PT OSK Nusadana Securities Indonesia, served as Independent Director at PT MNC Kapital Indonesia Tbk between 2012–2016, and served as Director of PT MNC Kapital Indonesia Tbk between 2016–2018, and since May 31, 2018 was appointed as President Director of PT MNC Kapital Indonesia Tbk.

Appointed as the Company's President Commissioner based on the result of the Shareholders' Circular Resolution in Lieu of Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company on September 21, 2018.



Erdie Suriaherdadi Manan
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Warga Negara Indonesia, lahir di Jember (Jawa Timur), pada tahun 1954. Beliau berhasil menyelesaikan program studi Strata Satu (S1) Electrical Engineering di Institut Teknologi Bandung (ITB) pada tahun 1978 dan program studi Magister Business Administration di IPMI Business School Jakarta pada tahun 1988.

Berpengalaman lebih dari 36 tahun, Beliau mengawali karirnya pada tahun 1979 di perusahaan yang bergerak dibidang Oil and Gas Services yaitu Schlumberger Overseas SA, dengan penugasan di Indonesia, Australia dan Middle East, hingga menjabat sebagai General Field Engineer pada tahun 1988 di PT Elnusa Schlumberger Wireline. Pada tahun 1989, Beliau memulai karirnya pertama kali di dunia leasing di PT ORIX Indonesia Finance sebagai Staff Marketing. Selama berkarir di ORIX, Beliau menjalani berbagai penugasan dibidang Credit Analyst, Credit Admin, Internal Audit, IT, Corporate Planning, Tax & Accounting, HR, Business Development, dan jabatan terakhir beliau adalah sebagai Vice Director pada tahun 2009. Pada periode 2000 – 2002, Beliau sempat bergabung dengan ABN Amro dan ditugaskan sebagai President Director ABN Amro Indonesia Finance, sebelum kembali bergabung dengan ORIX Indonesia Finance. Pada periode 2006 – 2009, beliau juga ditugaskan sebagai Komisaris di Bank Akita. Pada tahun 2011 hingga awal 2016, Beliau menjadi Technical Advisor di ORIX Indonesia Finance.

Dan di tahun 2016, Beliau bergabung dengan keluarga besar MNC Group, di unit bisnis MNC Leasing, yang bergerak di jasa Multi Finance dan dipercaya sebagai Komisaris Independen.

Indonesian citizen, born in Jember (East Java), in 1954. He successfully completed the Stratum One (S1) of Electrical Engineering study program at the Bandung Institute of Technology (ITB) in 1978 and the Master of Business Administration study program at IPMI Business School Jakarta in 1988.

Having more than 36 years of experience, he started his career in 1979 at a company engaged in Oil and Gas Services, namely Schlumberger Overseas SA, with assignments in Indonesia, Australia and the Middle East, until he served as General Field Engineer in 1988 at PT Elnusa Schlumberger Wireline. In 1989, he started his career first in leasing at PT ORIX Indonesia Finance as a Marketing Staff. During his career at ORIX, he undertook various assignments as Credit Analyst, Credit Admin, Internal Audit, IT, Corporate Planning, Tax & Accounting, HR, Business Development, and his last position was as Vice Director in 2009. In the period of 2000–2002, he joined ABN Amro and was assigned as President Director of ABN Amro Indonesia Finance, before rejoining ORIX Indonesia Finance. In the period of 2006–2009, he was also assigned as Commissioner at Bank Akita. From 2011 to early 2016, he became a Technical Advisor at ORIX Indonesia Finance.

And in 2016, he joined the MNC Group family, in the MNC Leasing business unit, engaged in Multi Finance services and he is trusted as an Independent Commissioner.



LAPORAN DEWAN
PENGAWAS SYARIAH

02

LAPORAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Report of Sharia of Supervisory Board



Muhammad Nadratuzzaman Hosen
Ketua Dewan Pengawas Syariah
Chairman of the Sharia Supervisory Board

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Bismillahirrahmaanirrahiim

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala berkah dan hidayah Nya yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Dalam laporan ini, saya mewakili Dewan Pengawas Syariah (DPS) mengucapkan selamat kepada manajemen dan seluruh karyawan Perseroan atas pencapaian dan kinerja yang sangat positif, dimana Perseroan berhasil menaikkan asset pembiayaan syariah sebesar 17% dari Rp. 35,55 miliar di tahun 2019 menjadi Rp. 41,74M di tahun 2020.

Perseroan juga mampu menjaga kualitas pembiayaan syariah yang terlihat dari rasio NPF pembiayaan syariah sebesar 0%. Pertumbuhan Perseroan di tahun 2020 ini tentunya tidak terlepas dari usaha, kerja keras dan kerja sama dari seluruh pihak di Perseroan dan juga ditambah dengan adanya dukungan serta kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat secara umum dan khususnya konsumen terhadap kinerja Perseroan. Amanah yang diberikan masyarakat dan konsumen sebaiknya terus dijaga dan dipertahankan dengan baik.

Sepanjang tahun 2020, DPS telah menjalankan fungsi dan tugasnya secara independen dalam melakukan pengawasan atas operasional Perseroan untuk menjaga

Peace be upon you, and Allah's mercy and blessings
Bismillahirrahmaanirrahiim

We praise and thank before Allah SWT for all His blessings and guidance that have been bestowed upon us all. In this report, on behalf of the Sharia Supervisory Board (DPS) I congratulate the management and all employees of the Company for their very positive achievements and performance, as the Company succeeded in increasing its sharia financing assets by 17% from IDR35.55 billion in 2019 to IDR41.74M in 2020.

The company was also able to maintain the quality of sharia financing as shown from the NPF ratio of sharia financing at 0%. The Company's growth in 2020 is certainly not regardless of the efforts, hard work and cooperation of all parties in the Company and also coupled with the support and trust given by public in general and especially consumers to the Company's performance. The trust given by public and the consumers should be kept and maintained properly.

Throughout 2020, DPS has carried out its functions and jobs independently in supervising the Company's operations to maintain compliance with the sharia provisions, Fatwa of the National Sharia Council-Indonesian Ulema Council (DSN-MUI). In carrying out

LAPORAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH
Report of Sharia of Supervisory Board

kesesuaian dengan ketentuan syariah, Fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Dalam melakukan kegiatan pengawasan, DPS terlibat dalam serangkaian kegiatan rapat, baik dengan Direksi atau jajaran di bawah Direksi, atau dengan Dewan Komisaris, melakukan kegiatan review atas kebijakan atau ketentuan internal yang telah ditetapkan, serta memberikan opini terkait dengan kegiatan operasional, pengembangan produk, dan fitur.

DPS secara rutin akan terus menyampaikan usulan, pendapat, arahan, dan opini serta memberikan persetujuan untuk hal-hal yang menjadi bahan pembicaraan. Selanjutnya diharapkan agar ketaatan dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, baik yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), maupun Fatwa-Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI, secara konsisten tetap terjaga.

DPS berharap agar Perseroan dapat terus meningkatkan kinerjanya secara optimal dengan tetap berpegang pada ketentuan-ketentuan syariah yang berlaku. Selain itu, sinergi yang telah dibangun selama ini dapat dijaga dan terus ditingkatkan. Komitmen yang sudah ada harus terus dijaga.

Pada akhirnya kami berharap dan berdoa, semoga usaha untuk mencapai pertumbuhan dan kemajuan yang lebih baik serta berkualitas, akan selalu mendapat bimbingan serta ridho dari Allah SWT.

supervisory activities, DPS is involved in a series of meeting activities, either with the Board of Directors or ranks under the Board of Directors, or with the Board of Commissioners, conducts reviews on the specified policies or internal provisions, and gives opinions related to operational activities, product development, and features.

DPS will routinely continue to submit proposals, directions, and opinions and give approval for matters that are the subjects of discussion. Further, it is expected that compliance and adherence to the applicable regulations, whether issued by the Financial Services Authority (OJK) by the Financial Services Authority Regulations (POJK), as well as Fatwas issued by the DSN-MUI, will be consistently maintained.

DPS hopes that the Company will be able to continue improving its performance optimally by adhering to the applicable sharia provisions. In addition, the synergy built so far can be maintained and continuously improved. The existing commitments must be maintained.

In the end, we hope and pray that efforts to achieve better and qualified growth and progress will always receive guidance and blessing from Allah SWT.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabar-
akatuh



Muhamad Nadratuzzaman Hosen

Ketua Dewan Pengawas Syariah
Chairman of Sharia Supervisory Board

PROFIL DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Profil of Sharia of Supervisory Board



Muhamad Nadratuzzaman Hosen
Ketua Dewan Pengawas Syariah
Chairman of the Sharia Supervisory Board

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1961. Beliau memperoleh gelar sarjana dari Fakultas Peternakan IPB pada tahun 1984 dan dilanjutkan dengan gelar pasca sarjana di bidang Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan dari IPB pada tahun 1990. Selanjutnya beliau menempuh pendidikan Post- graduated Advanced Studies in Human Ecology, VUB- Brussels, pada tahun 1994 dan Master of Economics at University of New England, Australia, pada tahun 1996. Terakhir beliau memperoleh gelar Doctor of Philosophy in Economics dari University of New England, Australia pada tahun 2001.

An Indonesian Citizen, born in 1961. He got his bachelor degree of the Faculty of Animal Husbandry at IPB (Bogor Institute of Agriculture) in 1984 and continued with the post graduate degree in Area and Rural Development Planning at IPB in 1990. Further he took the Post-graduated Advanced Studies in Human Ecology, VUB-Brussels in 1994 and Master of Economics at University of New England, Australia in 1996. The last he got the degree of Doctor of Philosophy in Economics at University of New England, Australia in 2001.

Di bawah ini merupakan daftar riwayat pekerjaan dari Ketua Dewan Pengawas Syariah:

Riwayat Pekerjaan di Pemerintahan:

staff Bina Program, Dinas Peternakan Bengkulu. 1984, Kepala Seksi Perumusan dan Pengendalian Program, Dinas Peternakan Bengkulu 1985-1987 (eselon IV/a, Tugas Belajar dengan Biaya Sendiri 1987-2000, Kepala Bidang Teknologi Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati, Kementerian Riset dan Teknologi, 2001-2003 (eselon III/a), Dosen Ekonomi Islam di UIN Jakarta dengan pangkat Lektor (IV/a), 2002, Ketua Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam di UIN, 2011-2013

Below is the list of job experiences of the Chairman of Sharia Supervisory Board:

Job Experiences in Government Administration:

Staff of Coaching Program, Animal Husbandry Department of Bengkulu, 1984, Head of Program Formulation and Control Section, Animal Husbandry Department of Bengkulu, 1985-1987 (echelon IV/a), Study Assignment at own expense, 1987-2000, Head of Environment and Biodiversity Technology Sector, 2001-2003 (echelon III/a), Lecturer of Islamic Economy in UIN Jakarta of Lecturer rank (IV/a), 2002, Chairman of Islamic Economy Assessment and Development Center in UIN, 2011-2013

Riwayat Pekerjaan di Luar Pemerintahan :

Peneliti Senior SMERU Research Institute, 2003, Staff Ahli Bidang BUMN di Komisi V, DPR RI periode 2001-2004, Vice President MACON International Consultant, 2004, Direktur Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES), 2005-2009, Dekan Fakultas Ekonomi YARSI, 2009-2011, Direktur Executive Islamic Banking and Finance (IBFI) Trisakti, 2011-2013, Wakil Ketua Badan Wakaf Indonesia, 2014 -2017

Job Experiences outside Government Administration:

Senior Researcher in SMERU Research Institute, 2003, Expert Staff of BUMN (State-Owned Enterprise) in Committee V, DPR (People's Representative Council) of RI for the period of 2001-2004, Vice President of MACON International Consultant, 2004, Director of Sharia Economic Communication Center (PKES), 2005-2009, Dean of Faculty of Economics of YARSI, 2009-2011, Executive Director of Islamic Banking and Finance (IBFI) of Trisakti, 2011-2013, Vice Chairman of Indonesia Waqf Body, 2014 -2017

Saat ini selain menjadi Ketua Dewan Pengawas Syariah Perseroan, beliau juga menjabat sebagai Dewan Pengawas Syariah di PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk.

Today he is not only Chairman of the Company's Sharia Supervisory Board, but also holds the position as Sharia Supervisory Board in PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk.

PROFIL DEWAN PENGAWAS SYARIAH
Profile of Sharia Supervisory Board



Dr. Jaenal Effendi, S.Ag. MA
Anggota Dewan Pengawas Syariah
Member of Sharia Supervisory Board

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1974. Beliau memperoleh gelar sarjana dari Institut Agama Islam Tribakti (IAIT) pada tahun 1998 dan dilanjutkan dengan gelar pasca sarjana di bidang Ekonomi Islam dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah pada tahun 2005. Terakhir beliau memperoleh gelar Doktor dalam bidang Keuangan dan Perbankan Islam dari University of Georg August - Goettingen, Germany pada tahun 2013.

An Indonesian Citizen, born in 1974. He got the bachelor degree of Tribakti Institute of Islamic Religion (IAIT) in 1998, which was continued by the post graduate degree in Islamic Economy of Syarif Hidayatullah Public University of Islam (UIN) in 2005. The last he got the Doctor degree in Islamic Finance and Banking of University of Georg August - Goettingen, Germany in 2013.

Saat ini selain menjadi anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan beliau juga bekerja sebagai:

1. Ketua Program Studi Ekonomi Islam, Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor
2. Dosen Sarjana dan Pasca Sarjana Ekonomi Islam IPB,
3. Anggota BPH Pokja Perbankan - Dewan Syariah Nasional (DSN) - MUI

Currently, besides being a member of the Company's Sharia Supervisory Board, he also works as:

1. Head of Islamic Economics Study Program, Department of Economics, Faculty of Economics and Management, Bogor Institute of Agriculture
2. Lecturer of IPB Undergraduate and Postgraduate of Islamic Economics
3. Member of BPH Banking Team Work - National Sharia Council (DSN) - MUI



LAPORAN
DIREKSI


03

LAPORAN DIREKSI

Report of Board of Directors



● **Paulus Cholot Janala**
Direktur Utama
President Director



“Optimisme kami tetap terjaga meskipun kondisi krisis yang diakibatkan oleh pandemi covid-19 datang secara mendadak. Kondisi ini kami jadikan sebuah momen untuk melakukan perbaikan dan mempercepat proses digitalisasi bisnis pembiayaan. Kami bersyukur dapat menjalani tahun 2020 dengan baik, salah satu pembuktian kami adalah dengan mencatatkan keuntungan pada buku kami dan kondisi non-performing financing yang jauh dibawah rata-rata industri pembiayaan. ”

“Our optimism is maintained even though the critical condition caused by the covid-19 pandemic came suddenly. We made this condition a moment to make improvements and accelerate the process of digitizing the financing business. We are grateful to be able to go through 2020 well, one of our proofs is by recording the profit in our book and the non-performing financing condition which is far below the average financing industry.”

Para pemegang saham dan pemangku kepentingan yang terhormat,

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya sehingga Perseroan masih dapat membukukan kinerja yang positif ditahun 2020. Pencapaian kinerja positif ini dapat diraih berkat sinergi dan kerjasama yang baik di internal organisasi serta kerja sama strategis dengan mitra usaha Perseroan.

Di tengah kondisi perekonomian global maupun domestik yang masih penuh dengan berbagai tantangan, bertambah dengan adanya pandemi Covid-19, perseroan masih bisa bertahan dengan baik. Perseroan percaya dan optimis di tahun 2021 dengan support yang lebih baik lagi dari perbankan akan dapat meningkatkan baik total aset kelola (asset managed) maupun total asset buku (on balance sheet) secara signifikan dan juga tingkat profitabilitas yang lebih baik lagi.

Tahun 2021 Perseroan menargetkan pertumbuhan total aset hingga dua kali lipat dari tahun sebelumnya. Untuk mencapai target dua kali lipat yang dicanangkan tersebut Perseroan tetap akan mengandalkan pembiayaan berbasis aset sebagai kekuatan utama. Disamping itu Perseroan juga fokus mempersiapkan pembiayaan anjak piutang dan supply chain financing sebagai salah satu tulang punggung yang diandalkan pada tahun 2021. Tidak ketinggalan pula Unit Usaha Syariah Perseroan, ditargetkan untuk dapat tumbuh maksimal dengan produk pembiayaan utama pembiayaan porsi dana haji. Penetapan target dua kali lipat ini juga sejalan dengan cita-cita Perseroan untuk mencapai aset Rp. 5 triliun pada tahun 2025.

Dear shareholders and stakeholders,

Praise be to God Almighty for His grace so that the Company was still able to record a positive performance in 2020. This positive performance could be achieved due to good synergy and cooperation within the internal organization as well as strategic cooperation with the Company's business partners.

In the midst of global and domestic economic conditions that were still full of challenges, increased by the Covid-19 pandemic, the company could still survive well. The company believes and is optimistic that in 2021 with even better support from banks, it will be able to increase both total assets managed and total book assets (on balance sheet) significantly and also an even better level of profitability.

In 2021, the Company targets the total asset growth to double from the previous year. To achieve the doubled target planned, the Company will continue relying on asset-based financing as the main strength. In addition, the Company also focuses on preparing factoring financing and supply chain financing as one of the backbones to rely on in 2021. The Company's Sharia Business Unit is also targeted to be able to grow optimally with the main financing product for financing the portion of the Hajj fund. The setting of doubling the target is also in line with the Company's aspiration to achieve assets of IDR5 trillion by 2025

LAPORAN DIREKSI
Report of Board of Directors

Sepanjang tahun 2020, Perseroan mendapatkan 2 penghargaan yaitu sebagai perusahaan multifinance dengan predikat sangat bagus pada kategori perusahaan pembiayaan dengan aset Rp500 miliar – Rp1 triliun yang diselenggarakan oleh Infobank pada 19 September 2019 dan perusahaan pembiayaan dengan performa excellent pada kategori perusahaan pembiayaan dengan aset Rp500 miliar – Rp1 triliun yang diselenggarakan oleh Warta Ekonomi pada 4 Oktober 2019.

Terakhir, mewakili manajemen, saya ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pemegang Saham Perseroan, jajaran manajemen dan seluruh karyawan atas dukungan, dedikasi dan kerjasama dalam meningkatkan nilai Perseroan sehingga dapat bertahan dan menutup tahun 2020 dengan baik. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh pelanggan, rekanan bisnis dan institusi keuangan yang senantiasa mendukung jalannya usaha Perseroan. Semoga kerjasama yang telah terjalin dapat semakin ditingkatkan di masa mendatang.

Throughout 2020, the Company received 2 awards, namely as a multi-finance company with a very good predicate in the category of financing company with assets of IDR500 billion – IDR1 trillion organized by Infobank on September 19, 2019 and a financing company with excellent performance in the category of financing company with the assets of IDR500 billion – IDR1 trillion organized by Warta Ekonomi on October 4, 2019.

Finally, on behalf of the management, I would like to express my highest appreciation to the Company's Shareholders, management and all employees for their support, dedication and cooperation in increasing the Company's value so that it could survive and closed the year 2020 well. I also express my gratitude to all customers, business partners and financial institutions who have always supported the Company's business operations. Hopefully the cooperation that has been established can be further enhanced in the future.

Atas Nama Dewan Komisaris,
On behalf of Board of Directors,



Paulus Cholot Janala

Komisaris Utama
President Director

PROFIL DIREKSI

Profil of Board of Directors



Paulus Cholot Janala
Direktur Utama
President Director

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1970, Meraih gelar Landscape Architecture dari IPB pada tahun 1994.

Pada tahun 1993–1994 beliau berkarier di PT Citra Cipta Landscape sebagai Site Manager. Selanjutnya pada tahun 1995–2000 beliau berkarier di PT Bank Bali sebagai Area Manager. Pada tahun 2001–2006 beliau berkarier di PT Indomobil Finance sebagai General Manager, dan pada tahun 2006–2007 beliau menjabat sebagai Regional Manager di PT DBS. Selanjutnya di tahun 2007–2014 beliau menjabat sebagai Senior Vice President di PT Bank OCBC NISP, dan pada tahun 2014–2015 beliau berkarier di PT Bank CIMB Niaga sebagai First Vice President. Selanjutnya pada tahun 2016–2017 beliau berkarier sebagai Corporate Executive Officer di PT HVMI.

Sejak April 2017 beliau bergabung dengan PT MNC Guna Usaha Indonesia sebagai Direktur dan sejak tanggal 21 September 2018 diangkat menjadi Direktur Utama PT MNC Guna Usaha Indonesia.

Indonesian citizen, born in 1970, achieved a degree in Landscape Architecture from IPB in 1994.

In 1993–1994 he had his career at PT Citra Cipta Landscape as Site Manager. Furthermore, in 1995–2000 he had his career at PT Bank Bali as Area Manager. In 2001–2006 he worked at PT Indomobil Finance as General Manager, and in 2006–2007 he served as Regional Manager at PT DBS. Further, in 2007–2014 he served as Senior Vice President at PT Bank OCBC NISP, and in 2014–2015 he had his career at PT Bank CIMB Niaga as First Vice President. Further, in 2016–2017 he had his career as Corporate Executive Officer at PT HVMI.

Since April 2017 he has joined PT MNC Guna Usaha Indonesia as Director and since September 21, 2018 has been appointed as President Director of PT MNC Guna Usaha Indonesia.

PROFIL DIREKSI
Profil of Board of Directors



■ **Yusnandi Liauw**
Direktur
Director

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1969, pada tahun 1995 lulus Sarjana Ekonomi, Jurusan Manajemen Perbankan.

Selama tahun 1995 - 1999 berkarir di PT. Bank Central Dagang (BCD), yang diawali dengan mengikuti Management Development Program (MDP), dengan posisi terakhir sebagai Senior Credit Officer. Pada tahun 1999 - 2000 sebagai Loan Workout Officer di BPPN, kemudian berkarir di Bank Mayapada International Tbk periode Feb 2000 - Juni 2005, dan sejak Juni 2005 bergabung dengan PT. MNC Finance, diawali sebagai Area Marketing Manager Jabodetabek. Selama berkarir di PT. MNC Finance, sudah pernah menjabat diberbagai posisi baik dalam direktorat Operasional, Marketing, Credit dan Treasury, dengan posisi terakhir sebagai General Manager Fund Raising, Mortgage & Credit Corporate Analyst.

Sejak Oktober 2014 sampai dengan saat ini, bergabung dengan PT MNC Guna Usaha Indonesia sebagai Direktur.

Indonesian citizen, born in 1969, graduated in 1995 with a Bachelor of Economics, Majoring in Banking Management.

During 1995 - 1999 he had his career at PT. Bank Central Dagang (BCD), started by joining the Management Development Program (MDP), with his last position as Senior Credit Officer. In 1999 - 2000 as Loan Workout Officer at IBRA, then had his career at Bank Mayapada International Tbk for the period of February 2000 - June 2005, and since June 2005 joined PT. MNC Finance, started as Area Marketing Manager for Jabodetabek. During his career at PT. MNC Finance, he has held various positions in the directorate of Operation, Marketing, Credit and Treasury, with the last position as General Manager Fund Raising, Mortgage & Credit Corporate Analyst.

Since October 2014 until now, he has joined PT MNC Guna Usaha Indonesia as Director



Henri Gunawan
Direktur
Director

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1975, pada tahun 1998 lulus Sarjana Accounting, Jurusan Accounting.

Selama tahun 1999 – Juni 2000 berkarir di Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) sebagai Auditor. Pada Juni 2000 – Maret 2007 dengan posisi terakhir sebagai Accounting dan Budget Manager di PT. Astra Otoparts, Pada April 2007 – Mei 2010 berkarir di PT. Inti Ganda Perdana sebagai Tax, Budget dan Accounting Senior Manager, Pada Juni 2010 – April 2012 berkarir di PT. ABM Investama sebagai Corporate Accounting, Finance Analyst dan Taxation Manager, Pada April 2012 – April 2017 berkarir di PT. Media Djaya Bersama sebagai Finance dan Administration Division Head, kemudian berkarir di PT. Radana Bhaskara Finance periode Mei 2017 – Juni 2019 sebagai Chief Financial Officer.

Sejak Juli 2019 sampai dengan saat ini, bergabung dengan PT MNC Guna Usaha Indonesia dan sejak tanggal 20 November 2019 diangkat menjadi Direktur PT MNC Guna Usaha Indonesia.

Indonesian citizen, born in 1975, graduated in 1998 with a Bachelor's degree in Accounting, majoring in Accounting.

During 1999 – June 2000, he worked at the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK-RI) as an Auditor. In June 2000 – March 2007 he had his last position as Accounting and Budget Manager at PT. Astra Otoparts, in April 2007 – May 2010 had his career at PT. Inti Ganda Perdana as Tax, Budget and Accounting Senior Manager, in June 2010 – April 2012 at PT. ABM Investama as Corporate Accounting, Finance Analyst and Taxation Manager, in April 2012 – April 2017 at PT. Media Djaya Bersama as Finance and Administration Division Head, then had his career at PT. Radana Bhaskara Finance for the period of May 2017 – June 2019 as Chief Financial Officer.

Since July 2019 until now, he has joined PT MNC Guna Usaha Indonesia and since November 20, 2019 has been appointed as Director of PT MNC Guna Usaha Indonesia.



PROFIL
PERSEROAN

04

PROFIL PERSEROAN

Company Profile



KANTOR PUSAT HEAD OFFICE

Alamat: MNC Tower Lantai 23, Jl.
Kebon Sirih No. 17-19,
Jakarta 10340
No. Telepon: (021) 3910 993
No. Fax: (021) 3911 093
Website : www.mncleasing.com

Address : MNC Tower 23rd Floor, Jl.
Kebon Sirih No. 17-19,
Jakarta 10340
Phone No. : (021) 3910 993
Fax. No. : (021) 3911 093
Website : www.mncleasing.com



KANTOR PERWAKILAN REPRESENTATIVE OFFICE

1. Medan
MNC Financial Service Lantai 2
Jl. Kapt Maulana Lubis No 12
Medan
Telp. (061) 69100600

1. Medan
MNC Financial Service 2nd Floor
Jl. Kapt Maulana Lubis No. 12
Medan
Phone: (061) 69100600

2. Pekanbaru
MNC Financial Service Lantai 3
Jl. Arifin Ahmad No 10
Komp Arifin Ahmad Central Ruko
H-K
Pekanbaru
Telp. (0761) 8010500

2. Pekanbaru
MNC Financial Service 3rd Floor
Jl. Arifin Ahmad No. 10
Komp Arifin Ahmad Central Ruko H-K
Pekanbaru
Phone: (0761) 8010585

3. Palembang
Jl. Residen Abdul Rozak No. 15,
Kel Bukit Sangkal, Kec Kalidoni
Palembang
Telp. (0711) - 563 0767

3. Palembang
Jl. Residen Abdul Rozak No. 15
Kel. Bukit Sangkal, Kec. Kalidoni
Palembang 30114
Phone: (0711) 5700334

4. Jakarta
MNC Tower Lantai 23
Jl. Kebon Sirih No. 17-19
Jakarta 10340
Telp. (021) 3910 993

4. Jakarta
MNC Tower 23rd Floor
Jl. Kebon Sirih No. 17-19
Jakarta 10340
Phone: (021) 3910 993

5. Bandung
Jl. Naripan No. 97A Lt. 3A, Kel
Kebon Pisang, Kec, Sumur Bandung
40112
Telp. (022) 20545686

5. Bandung
Jl. Naripan No. 97A, 3rd Fl.
Kel. Kebon Pisang, Kec. Sumur Bandung
Bandung 40112
Phone: (022) 20545 686

6. Semarang
Wisma HSBC Lantai 5 suite 501
Jl. Gajah Mada No. 135
Semarang 50134
Telp. (024) 8456434

6. Semarang
Wisma HSBC 5th Floor, Suite 510
Jl. Gajah Mada No. 135
Semarang 50134
Phone: (024) 8456434

7. Surabaya
Gedung Bursa Efek Lantai 3A
Jl. Taman Ade Irma Suryani Nasution
No. 21, Surabaya
Telp. (031) 5353667

7. Surabaya
Gedung Bursa Efek Floor 3A
Jl. Taman Ade Irma Suryani Nasution No. 21
Surabaya
Phone: (031) 99205700

8. Denpasar
Gedung Indovision-Bali Lantai 1 Unit E
Jl Diponegoro No. 109
Denpasar, Bali
Telp. (0361) 231289
9. Banjarmasin
Jl. Pangeran Hidayatullah No. 18 RT 14
Kel. Sungai Jingah Kec. Banjarmasin Utara
Kalimantan Selatan 70121
Telp. (0511) 674 1017
10. Balikpapan
Gedung MNC Bank Lt. 2,
Jl. Jend. Sudirman No. 327, Kel. Damai Kec.
Balikpapan Selatan 76114
Telp. (0542) 8519923
11. Makassar
Ratulangi Point Building Lantai 2
Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 2
Makassar
Sulawesi Selatan 90114
Telp. (0441) 3622 859
12. Pontianak
Jalan Gajah Mada 65/15
RT 002/RW 29,
Kelurahan Benua Melayu Darat,
Kecamatan Pontianak Selatan,
Kota Pontianak,
Provinsi Kalimantan Barat

RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

PT MNC Guna Usaha Indonesia (“Perseroan”) didirikan dengan nama PT Indo Finance Perkasa pada tahun 1994. Pada 4 Desember 2014, PT MNC Kapital Indonesia Tbk mengambilalih kepemilikan PT Indo Finance Perkasa. Seiring dengan akuisisi tersebut, Perseroan berganti nama menjadi PT MNC Guna Usaha Indonesia (atau lebih dikenal dengan MNC Leasing).

8. Denpasar
Gedung Indovision-Bali 1st Floor, Unit E
Jl Diponegoro No. 109
Denpasar, Bali
Phone: (0361) 231289
9. Banjarmasin
Jl. Pangeran Hidayatullah No. 18, 3rd Floor
Kel. Sungai Jingah Kec. Banjarmasin Utara
Kalimantan Selatan 70121
Phone: (0511) 674 1287
10. Balikpapan
Gedung MNC Bank 2nd Floor
Jl. Jend. Sudirman No. 327
Kel. Damai Kec. Balikpapan Selatan
Balikpapan 76114
Phone: (0542) 8519923
11. Makassar
Ratulangi Point Building 2nd Floor
Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 2
Makassar
Sulawesi Selatan 90114
Phone: (0441) 3622859
12. Pontianak
Jalan Gajah Mada 65/15
RT 002/RW 29,
Kelurahan Benua Melayu Darat,
Kecamatan Pontianak Selatan,
Kota Pontianak,
Provinsi Kalimantan Barat

COMPANY’S BRIEF HISTORY

PT MNC Guna Usaha Indonesia (the “Company”) was established under the name PT Indo Finance Perkasa in 1994. On December 4, 2014, PT MNC Kapital Indonesia Tbk took over the ownership of PT Indo Finance Perkasa. Along with the acquisition, the Company changed its name to PT MNC Guna Usaha Indonesia (or better known as MNC Leasing).

PROFIL PERSEROAN Company Profile

KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Sesuai dengan anggaran dasar dan ijin yang dimiliki, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Menjalankan usaha pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan barang modal beserta jasa yang diperlukan untuk aktivitas usaha/investasi, rehabilitasi, modernisasi, ekspansi atau relokasi tempat usaha/investasi yang diberikan kepada debitur, antara lain sewa pembiayaan (finance lease), jual dan sewa-balik (sale and leaseback), anjak piutang dengan pemberian jaminan dari penjual piutang (factoring with recourse), anjak piutang tanpa pemberian jaminan dari penjual piutang (factoring without recourse), pembelian dengan pembayaran secara angsuran, pembiayaan proyek dan/atau pembiayaan infrastruktur;
- b. Menjalankan usaha pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran yang habis dalam satu siklus aktivitas usaha debitur, antara lain jual dan sewa-balik (sale and leaseback), anjak piutang dengan pemberian jaminan dari penjual piutang (factoring with recourse), anjak piutang tanpa pemberian jaminan dari penjual piutang (factoring without recourse) dan/atau fasilitas modal usaha;
- c. Menjalankan usaha pembiayaan multiguna, yaitu pembiayaan barang dan/atau jasa yang diperlukan oleh debitur untuk pemakaian/konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha atau aktivitas produktif dalam jangka waktu yang diperjanjikan, antara lain sewa pembiayaan (finance lease), pembelian dengan pembayaran secara angsuran, dan/atau fasilitas dana;
- d. Menjalankan usaha sewa operasi (operating lease) dan/atau kegiatan berbasis imbal jasa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- e. Menjalankan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan;
- f. Melakukan kegiatan usaha pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

COMPANY'S BUSINESS ACTIVITIES

In accordance with the articles of association and permits held, the Company may conduct the following business activities:

- a. To undertake the business of investment financing, namely financing of capital goods with the services needed for business/investment activities, rehabilitation, modernization, expansion or relocation of business/investment premises provided to debtors, namely finance lease, sale and leaseback, factoring with recourse, factoring without recourse, purchase by payment in installments, project financing and or infrastructure financing;
- b. To undertake the business of working capital financing, namely financing for meeting expenditure requirement exhausted in one cycle of debtor's business activity, namely sale and leaseback, factoring with recourse, factoring without recourse and/or business capital facilities;
- c. To undertake the business of multipurpose financing, namely financing of goods and/or services needed by debtors for use/consumption and not for business purposes or productive activities within an agreed period, namely finance lease, purchases by payment in installments, and/or fund facilities;
- d. To undertake operating lease and/or fee-based activities as long as it does not conflict with the provisions of legislation in financial services sector;
- e. To undertake other financing businesses based on approval of the Financial Services Authority;
- f. To conduct financing business activities based on sharia principles.

Visi, Misi, dan Nilai Budaya Perusahaan

Vision, Mission & Corporate Values

Vision **VISI**

Menjadi Perusahaan Pembiayaan yang Terkemuka dan Terpercaya dengan produk-produk pembiayaan yang inovatif, produktif, dan berkontribusi untuk mendukung peningkatan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan.

To become a Leading and Trusted Financing Company with innovative, productive, and contributing financing products to support the sustainable improvement of Indonesian economy.

MISI *Mission*

1. Memberikan solusi pembiayaan melalui produk-produk yang inovatif, bervariasi, produktif, dan berkeuangan berkelanjutan untuk masyarakat berbasis komunitas.
2. Meningkatkan daya saing melalui pengembangan produk dan proses digitalisasi.
3. Kerjasama yang saling menguntungkan dengan seluruh stakeholders.

1. To give financing solutions through innovative, varied, productive, and financially sustainable products for community-based society.
2. To increase competitiveness through product development and digitization process.
3. To conduct mutually beneficial cooperation with all stakeholders.

Nilai Nilai Perseroan

Company's Values



VISION QUALITY

Cara pandang jauh kedepan untuk Semua yang dikerjakan harus menjawab segala tantangan yang dengan standar kualitas yang ada di masa depan baik/bagus

Way of looking far ahead to answer all future existing challenges.



SPEED

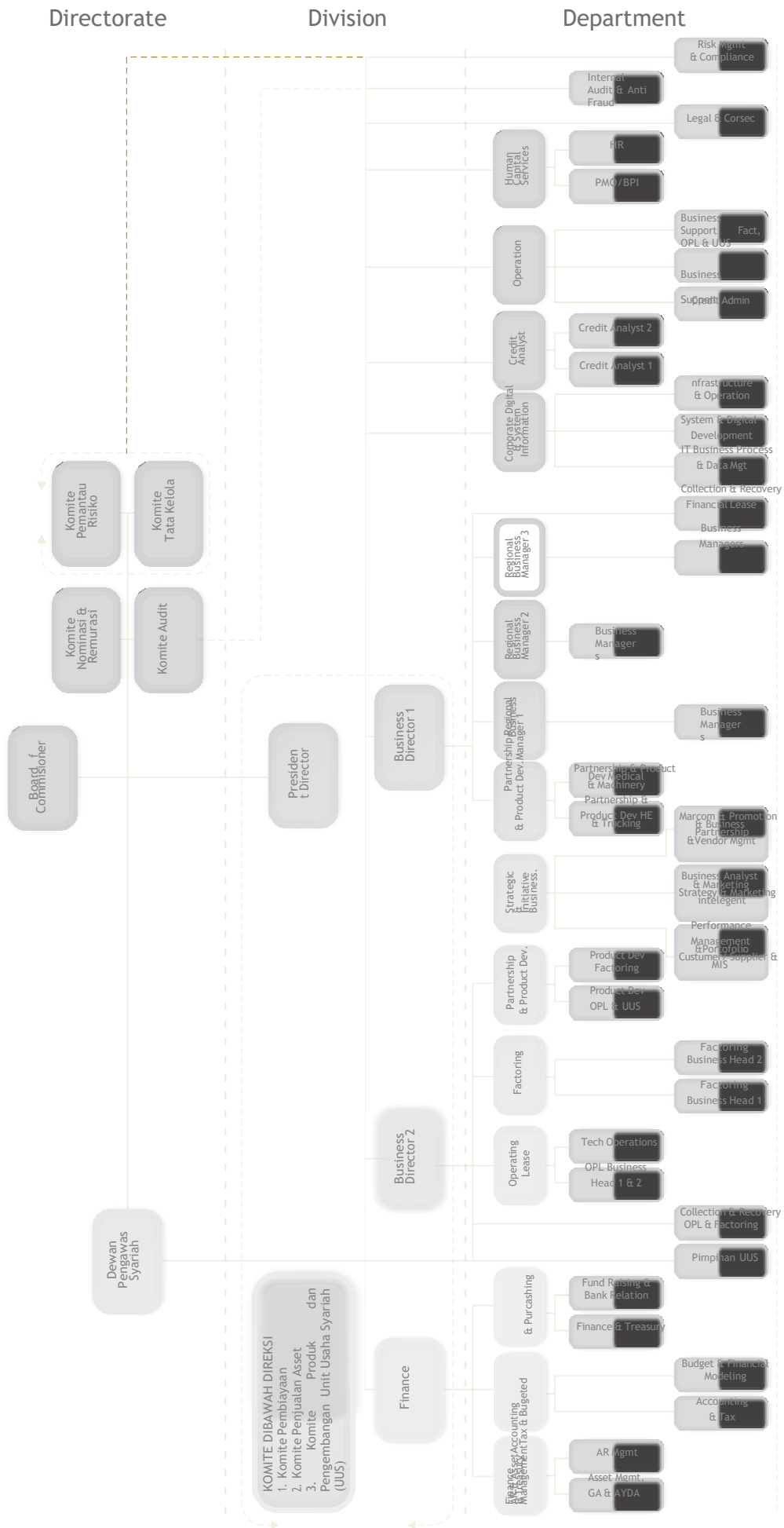
Kecepatan dalam melaksanakan segala sesuatu

Everything that is done must be with good quality standards.

Speed in carrying out everything.

STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN

Company's Organization Structure



SUMBER DAYA MANUSIA

Menghadapi persaingan usaha di tahun 2020, manajemen menetapkan strategi yang berkelanjutan untuk menjamin ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai dengan kebutuhan organisasi. Untuk itu dilakukan perbaikan terhadap proses rekrutmen karyawan baru yang menjamin ketersediaan SDM secara cepat dan tepat termasuk di dalamnya ketersediaan calon pemimpin masa depan.

Perseroan senantiasa menjaga kualitas, kuantitas dan kenyamanan situasi kerja bagi Sumber Daya Manusia yang dimiliki. Perseroan meyakini bahwa SDM yang kompeten serta dukungan lingkungan kerja yang kondusif dapat meningkatkan produktivitas kinerja secara signifikan. Selain menempatkan SDM sebagai aset yang berharga bagi Perseroan, Perseroan senantiasa berinvestasi terhadap SDM yang dimiliki. Investasi telah dilakukan mulai dari proses rekrutmen melalui penetapan standar-standar kebijakan sampai dengan pelatihan-pelatihan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM.

Untuk mengimbangi pertumbuhan bisnis Perseroan yang terus tumbuh setiap tahunnya, pengembangan dan penyempurnaan terus dilakukan dari berbagai sisi organisasi manajemen SDM. Manajemen SDM menyadari bahwa sebagai salah satu kekuatan Perseroan dalam menghadapi tantangan bisnis Perseroan, mengembangkan organisasi manajemen SDM dan peningkatan kompetensi SDM Perseroan harus dilakukan dengan cepat, tepat, dan efektif agar menciptakan organisasi dan SDM yang handal, terpercaya, dan kompeten.

Pada tanggal 31 Desember 2020, Perseroan memiliki karyawan sebanyak 180 orang, baik karyawan tetap maupun karyawan kontrak. Adapun komposisi karyawan Perseroan adalah sebagai berikut:

HUMAN RESOURCES

In facing the business competition in 2020, the management has set a sustainable strategy to ensure the availability of Human Resources (HR) in accordance with the organization's needs. For this reason, improvements are made to the recruitment process for new employees to ensure the availability of HR quickly and precisely, including the availability of future prospective leaders.

The Company always maintains the quality, quantity and convenience of the work situation for its Human Resources. The Company believes that competent HR and the support of a conducive work environment can significantly increase performance productivity. Besides placing HR as a valuable asset for the Company, the Company always invests in its HR. Investments have been made starting from the recruitment process by setting the standards of policy to the trainings carried out in order to improve HR competencies.

To keep pace with the Company's continuously growing business every year, development and improvement are continuously carried out from various sides of the HR management organization. HR management realizes that as one of the Company's strengths in facing the Company's business challenges, developing the HR management organization and improving the Company's HR competence must be carried out quickly, precisely, and effectively in order to create reliable, trusted, and competent organizations and HR.

As of December 31, 2020, the Company had 180 employees, both full-time and contract employees. The composition of the Company's employees is as follows:

PROFIL PERSEROAN
Company Profile



- a. Menurut Jenjang Pendidikan**
SMU / SMK Sederajat : 3 Orang
Diploma : 11 Orang
S1 : 159 Orang
S2 : 7 Orang



- a. By Educational Level:**
SMU / SMK Sederajat : 3 Persons
Diploma : 11 Persons
S1*) : 159 Persons
S2**) : 7 Persons
*)SMU/SMK = Senior/Vocational High School
)S1/S2 = Stratum ½



- b. Menurut Jenjang Manajemen**
Staff : 111 Orang
Supervisor : 22 Orang
Ast Mgr & Manager : 41 Orang
GM : 3 Orang
Direksi : 3 Orang



- b. By Management Level**
Staff : 111 Persons
Supervisor : 22 Persons
Ast Mgr & Manager : 41 Persons
GM : 3 Persons
Director : 3 Persons



- c. Menurut Jenjang Usia**
20 – 29 Tahun : 58 Orang :
30 – 39 Tahun 77 Orang :
40 – 49 Tahun 41 Orang :
> 50 Tahun : 4 Orang



- c. MBy Age Level**
20 – 29 Years : 58 Persons :
30 – 39 Years 77 Persons :
40 – 49 Years 41 Persons :
> 50 Years 4 Persons

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan karyawan, Perseroan telah menyesuaikan gaji karyawan sesuai dengan Upah Minimum Propinsi (UMP) pada masing-masing Kantor Perwakilan, selain itu Perseroan juga menyediakan berbagai tunjangan, fasilitas dan sarana fisik lainnya yaitu:

- Tunjangan makan dan transportasi;
- Tunjangan dan fasilitas kesehatan berupa, penggantian uang pengobatan dan perawatan bagi karyawan serta anggota keluarganya;
- Program BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan bagi seluruh karyawan;
- Fasilitas olah raga;
- Koperasi Karyawan;
- Dana Pensiun;
- Tempat peribadatan;
- Fasilitas asuransi jiwa.

In order to improve employees' welfare, the Company has adjusted employees' salaries in accordance with the Provincial Minimum Wage (UMP) in each Representative Office, in addition the Company also provides various allowances, facilities and other physical facilities, namely:

- Meal and transportation allowances;
- Health benefits and facilities in the form of reimbursement of medical expenses and care for employees and their family members;
- BPJS Employment and Health Programs for all employees;
- Sport facilities;
- Employee Cooperative;
- Pension fund;
- Places of worship;
- Life insurance facilities.

Pemegang Saham Shareholders

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan adalah sebagai berikut:
The Company's Capitalization Structure and Shareholders Composition are as follows:

Keterangan Description	Nilai Nominal Rp. 1.000.000,- persahama Nominal Value of Rp.1,000,000.- per share		Presentase (%) Percentage (%)
	Jumlah Saham Number of Shares	Jumlah Nilai Nominal (Rp) Total Nominal Value (Rp)	
Modal Dasar Authorized Capital	748,000	748,000,000,000	
Modal ditempatkan dan disetor penuh Subscribed and fully paid-up capital:			
- PT MNC Kapital Indonsia Tbk	186,999	186,999,000,000	99.999
- Koperasi Karyawan PT Bhakti Investama Tbk - Employees Cooperative of PT Bhakti Investama Tbk	1	1,000,000	0.001
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Total subscribed and fully paid-up capital	187,000	187,000,000,000	
Jumlah saham dalam portepel Total shares in the portfolio	561,000	561,000,000,000	

Penghargaan Yang Diterima Perseroan Awards Received by the Company

No No	Penghargaan Award	Kategori Category	Lembaga Institution
1.	Infobank Multifinance Award Infobank Multifinance Award	Kinerja keuangan 2018 Sangat Bagus Financial performance of 2018 - Very Good	Majalah Infobank Infobank Magazine
2.	Warta Ekonomi Indonesia Multifinance Consumer Choice Award	Multifinance Company with Excellent Per- formance Multifinance Company with Excellent Performance	Majalah Warta Ekonomi
	Warta Ekonomi Indonesia Multifinance Consumer Choice Award	Excellent Financial Performance for Mul- tinance Company with Assets Between 500M-1T	Economic News Magazine



PEMBAHASAN DAN
ANALISIS MANAJEMEN

05

PEMBAHASAN DAN ANALISIS MANAJEMEN

Management Discussion and Analysis

LAPORAN ANALISA USAHA DAN OPERASIONAL T

ahun 2020 menjadi tahun yang memiliki banyak tantangan bagi industri pembiayaan. Perseroan mampu bertahan dalam menghadapi tantangan dari adanya pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia di 2020. Kendati demikian dengan berbagai inisiatif strategi yang dilakukan, Perseroan mampu menjaga dan mempertahankan kinerja bisnisnya melalui berbagai strategi yang diterapkan secara efektif dan efisien.

Hingga akhir tahun 2020, secara umum Perseroan mengalami penurunan total aset yang dikelola sebesar 19,6% menjadi Rp 883,9 milyar jika dibandingkan dengan 31 Desember 2019 untuk total aset yang dikelola sebesar Rp 1.099,6 milyar dan secara on book untuk akhir tahun 2020 total aset Perseroan juga mengalami penurunan sebesar 17,8% menjadi Rp 614,7 milyar jika dibandingkan dengan 31 Desember 2019 untuk total aset on book sebesar Rp 747,6 milyar. Penurunan tersebut disebabkan karena penurunan realisasi pembiayaan baru (newbooking) di pembiayaan investasi & modal kerja sebesar 65.13% akibat fokus bisnis Perseroan kepada sektor produktif banyak terdampak adanya pandemi Covid-19 sepanjang 2020. Penurunan bisnis secara nasional sangat berpengaruh terhadap pembiayaan baru yang disalurkan Perseroan di 2020.

Selain kondisi bisnis yang belum stabil, pada 2020, perbankan juga belum membuka penyaluran pembiayaan kepada perusahaan pembiayaan. Hal ini juga menyebabkan perseroan mengalami kendala menemukan sumber pembiayaan yang fleksibel untuk dapat menyalurkan pembiayaan kepada nasabah perseroan.

Penyaluran pembiayaan di 2020 dirasa belum maksimal, karena strategi perusahaan untuk memperkuat AR Management, sehingga cashflow dari Perseroan tetap terjaga. Hal ini merupakan usaha dari Perseroan untuk dapat menekan NPF serendah mungkin, karena pandemi Covid-19 sangat berdampak kepada pembayaran dari nasabah Perseroan.

Komposisi Pembiayaan 2020

Dengan tetap memperhatikan kualitas pembiayaan yang dilakukan, total nilai pembiayaan investasi & modal kerja, anjak piutang, pembiayaan haji dan sewa kendaraan operasional berturut-turut adalah Rp. 158,1 miliar, Rp.1.036,1 miliar, Rp.3,0 miliar, & Rp 3,0 miliar.

REPORT OF BUSINESS AND OPERATIONAL ANALYSIS

The year 2020 was a year with many challenges for the financing industry. The Company was able to survive in facing the challenges caused by the Covid-19 pandemic that hit Indonesia in 2020. However, with the various strategic initiatives carried out, the Company was able to keep and maintain its business performance by various strategies implemented effectively and efficiently.

Until the end of 2020, the Company in general experienced a decrease in the total assets managed by 19.6% to IDR883.9 billion compared to that of December 31, 2019 for total assets managed of IDR1,099.6 billion and on book for the end of 2020 the Company's total assets also decreased by 17.8% to IDR614.7 billion compared to that of December 31, 2019 for total assets on book of IDR747.6 billion. This decrease was due to the decrease in realization of new financing (new booking) in investment & working capital financing by 65.13% resulted by the Company's business focus on the productive sector being heavily affected by the Covid-19 pandemic throughout 2020. The decline in national business greatly affected the new financing distributed by the Company in 2020.

In addition to the unstable business condition in 2020, banks also had not opened financing distribution to financing companies. This also causes the company to experience difficulties in finding flexible financing sources to be able to distribute financing to the company's customers.

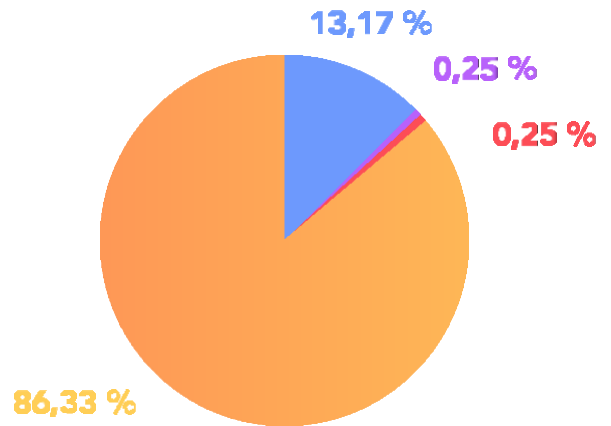
The distribution of financing in 2020 is considered not optimal, due to the company's strategy to strengthen AR Management, so that the Company's cash flow continues to be maintained. This was an effort of the Company to be able to press down NPF to the lowest possible, because the Covid-19 pandemic has greatly impacted payments from the Company's customers.

Financing Composition of 2020

While still considering the quality of financing carried out, the total values of investment & working capital financing, factoring, hajj financing and operational vehicle rent were IDR158.1 billion, IDR1,036.1 billion, IDR3.0 billion and IDR3.0 billion.

Pembiayaan 2020

- **Pembiayaan Investasi & Modal Kerja**
Investment & Working Capital Financing
- **Sewa Kendaraan Operasional**
Operational Vehicle Lease
- **Pembiayaan Multiguna**
Multipurpose Financing
- **Anjak Piutang**
Factoring

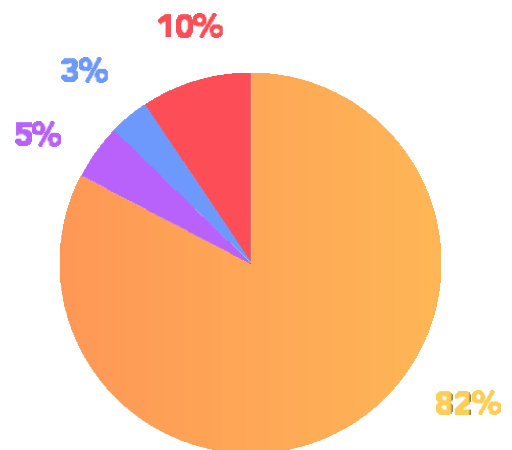


Dengan demikian, kontribusi portofolio alat berat, truck, mesin dan alat kesehatan terhadap total nilai pembiayaan Perseroan berturut-turut adalah 81,83%, 5,44%, 3,15% dan 9,58%.

Thus, the contribution of the portfolios of heavy equipment, trucks, machinery and medical devices to the Company's total financing value were consecutively 81.83%, 5.44%, 3.15% and 9.58%.

Product

- **Alat Berat**
Heavy Equipment
- **Truk**
Truck
- **Mesin**
Machine
- **Alat Kesehatan**
Healty Equipment



PEMBAHASAN DAN ANALISIS MANAJEMEN Management Discussion and Analysis

Jaringan Usaha

Pada akhir tahun 2020, Perseroan memiliki 16 titik pelayanan pelanggan yang tersebar di Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan dan Sulawesi.

Sumber Pendanaan

Perseroan terus mengupayakan ketersediaan dana yang optimal untuk mendukung pertumbuhan bisnis Perseroan. Sumber pendanaan, selama tahun 2020 Perseroan memiliki fasilitas pendanaan konvensional dalam bentuk joint financing dengan MNC Bank senilai Rp.680 miliar, pendanaan executing dari perbankan lainnya sebesar Rp.350 miliar dan pendanaan syariah sebesar Rp. 75 miliar.

Teknologi Informasi

Di tahun 2020, Perseroan juga terus melakukan pembenahan dan pengembangan sistem informasi yang mendukung proses bisnis berbasis teknologi untuk mendukung perbaikan proses, pengembangan dan inovasi bisnis. Infrastruktur teknologi informasi juga diperbaharui dan direnovasi yang prosesnya akan berlanjut hingga tahun 2021.

LAPORAN ANALISA KEUANGAN

Laporan Laba Rugi

Pendapatan

Jumlah Pendapatan Perseroan sebesar Rp. 136,7 miliar pada tahun 2020, diperoleh dari Pendapatan Sewa Pembiayaan sebesar Rp. 47,0 miliar, Pendapatan anjak piutang sebesar Rp 45,4 miliar, Pendapatan pembelian dengan pembayaran secara angsuran sebesar Rp 26,0 miliar, Pendapatan Sewa Operasi sebesar Rp. 16,6 miliar, Pendapatan Syariah sebesar Rp 3,6 milyar dan Rp. (1,9) miliar pendapatan (beban) lain-lain.

Komposisi pendapatan Perseroan dari Pembiayaan Sewa Pembiayaan, Pendapatan Anjak Piutang, Pembelian dengan pembayaran secara angsuran, Pendapatan Sewa Operasi, Pendapatan Syariah dan Pendapatan (beban) lain-lain berturut-turut adalah 34.44%, 33.23%, 19.01%, 12.17%, 2.59% dan -1.44%.

Total Pendapatan yang diperoleh Perseroan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 23,13% jika dibandingkan dengan total Pendapatan tahun 2019. Penurunan Pendapatan terutama disebabkan oleh:

- Penurunan pendapatan sewa operasi sesuai dengan strategi perseroan untuk lebih fokus ke bisnis inti

Business Network

By the end of 2020, the Company had 16 customer service points spread across Sumatera, Java, Bali, Kalimantan and Sulawesi.

Sources of funding

The Company continued to strive for optimal availability of funds to support the Company's business growth. Regarding the sources of funding, during 2020 the Company had conventional funding facilities in the form of joint financing with MNC Bank worth IDR680 billion, the executing funding from other banks of IDR350 billion and sharia funding of IDR75 billion.

Information Technology

In 2020, the Company also continued fixing and developing information systems that support technology-based business processes to support process improvement, business development and innovation. The information technology infrastructure was also updated and renovated, which process will continue until 2021.

REPORT OF FINANCIAL ANALYSIS

Income/Profit-Loss Statement

Income

Income The Company's Total Income was IDR136.7 billion in 2020, which was obtained from Finance Lease Income of IDR47.0 billion, Factoring Income of IDR45.4 billion, Purchase Income by installment payments of IDR26.0 billion, Operating Lease Income of IDR16.6 billion, Sharia Income of IDR3.6 billion and other income (expenses) of IDR(1.9) billion.

The composition of the Company's income from Finance Lease Financing, Factoring Income, Purchases by installment payments, Operating Lease Income, Sharia income and other income (expenses) is 34.44%, 33.23%, 19.01%, 12.17%, 2.59% and -1.44%.

The Company's Total Income in 2020 decreased by 23.13% compared to the Total Income in 2019. The decrease of Income was mainly due to:

- The decrease in operating lease income in accordance with the company's strategy to focus more on

Perseroan dalam menjalankan fungsi penyalur pembiayaan.

- Penurunan pendapatan sewa pembiayaan yang diakibatkan karena penurunan pembiayaan baru (*newbooking*) karena minimnya pendanaan baru dari pihak perbankan sehingga target-target perseroan untuk melakukan pembiayaan baru banyak terkoreksi akibat kurangnya dukungan pembiayaan dari perbankan.
- Penurunan pendapatan lain-lain yang disebabkan kerugian penjualan aset sewa operasi.

Selain itu disisi lain, ada beberapa akun pendapatan yang meningkat, seperti:

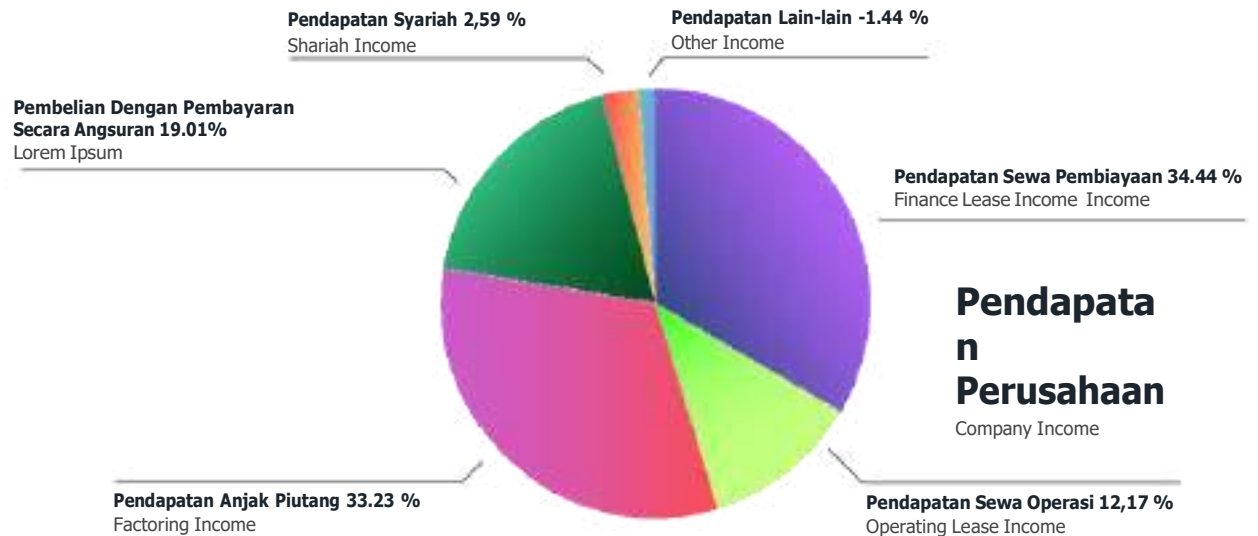
- Pendapatan Anjak Piutang meningkat disebabkan karena adanya penambahan plafond pinjaman dari Bank di awal Tahun 2020 untuk pembiayaan anjak piutang sehingga Perseroan dapat memaksimalkan penyaluran pembiayaan tersebut.
- Pendapatan pembelian dengan pembayaran secara angsuran meningkat yang disebabkan adanya plafond Pembiayaan Bersama yang berasal dari kemitraan PT MNC Bank International Tbk sehingga Perseroan dapat menyalurkan pembiayaan tersebut kepada nasabah baru yang sesuai dengan kriteria pembiayaan bersama.

the Company's core business in carrying out the function of financing distribution.

- The decrease in finance lease income resulted by the decrease in new financing (new booking) due to the lack of new funding from banking sector so that the company's targets for conducting new financing was much corrected due to the lack of financing support from banks.
- The decrease in other income due to the loss on sale of operating lease assets.

In addition, on the other hand, there were several increasing income accounts, such as:

- The increase of factoring income due to the addition of a loan ceiling from the Bank in early 2020 for factoring financing so that the Company could maximize the financing distribution.
- The increase of purchase income by payment in installments due to the ceiling of Joint Financing originating from the partnership of PT MNC Bank International Tbk so that the Company can distribute the financing to new customers in accordance with the criteria of joint financing.



PEMBAHASAN DAN ANALISIS MANAJEMEN Management Discussion and Analysis

(Dalam Miliar Rupiah)

(In Billion Rupiah)

Uraian	2018 (Audited)	2019 (Audited)	2020 (Audited)
Jumlah Pendapatan Total Income	160.589	177.813	136.684
Jumlah Beban Total Expense	128.476	141.397	123.790
Laba Sebelum Pajak Profit Before Tax	32.113	36.416	12.894
Beban Pajak Penghasilan Income Tax Expense	(7.891)	(9.714)	(3.416)
Laba Bersih (Laba Neto) Net Profit	24.222	26.702	9.478

Beban

Jumlah total beban Perseroan di Tahun 2020 juga mengalami penurunan sebesar 12,45% jika dibandingkan dengan total beban Perseroan di Tahun 2019. Penurunan beban tersebut terutama berasal dari:

- Penurunan beban bunga dan keuangan sebesar 13.6% dari Rp 58 milyar di akhir Tahun 2019 menjadi Rp 50 milyar di akhir tahun 2020 yang disebabkan oleh penurunan pinjaman yang diterima di Tahun 2020.
- Penurunan beban umum dan administrasi sebesar 11.6% dari Rp 83,3 milyar diakhir Tahun 2019 menjadi Rp 73,6 milyar di akhir Tahun 2020 yang berasal dari kontribusi penurunan biaya cadangan kerugian penurunan nilai terkait penerapan PSAK 71 dan penurunan piutang pembiayaan, penurunan biaya pemeliharaan dan perbaikan, biaya penyusutan, biaya perjalanan dinas dan biaya umum dan administrasi lainnya sesuai dengan strategi Perseroan untuk penerapan program cost reduction yang lebih selektif dan efisien. Disisi lain untuk beban umum dan administrasi terdapat kenaikan beban gaji dan tunjangan lainnya sebesar 5.56% dari Rp 30 milyar di akhir tahun 2019 menjadi Rp 32 milyar di akhir Tahun 2020 yang berasal dari kenaikan upah karyawan sebesar 5% mulai pertengahan tahun 2019 dan penambahan jumlah karyawan yang terjadi selama tahun 2020.

Laba Bersih

Realisasi laba bersih pada tahun 2020 menurun sebesar 64.50% jika dibandingkan dengan realisasi laba bersih pada tahun 2019.

Expenses

The Company's total expenses in 2020 also decreased by 12.45% compared to the Company's total expenses in 2019. The decrease in expenses was mainly resulted from:

- The decrease in interest and finance expenses by 13.6% from IDR58 billion at the end of 2019 to IDR50 billion at the end of 2020 due to the decrease in loans received in 2020.
- The decrease in general and administration expenses by 11.6% from IDR83.3 billion at the end of 2019 to IDR73.6 billion at the end of 2020 which came from the contribution of decrease in the cost of allowance for impairment losses related to the implementation of PSAK (Statement of Financial Accounting Standards) 71 and the decrease in financing receivables, decrease in maintenance and repair costs, depreciation expense, official travel expenses and other general and administration expenses in accordance with the Company's strategy for the implementation of a more selective and efficient cost reduction program. On the other hand, for general and administration expenses, there was an increase in salaries and other allowances by 5.56% from IDR30 billion at the end of 2019 to IDR32 billion at the end of 2020 which came from a 5% increase in employee pays starting from mid-2019 and an increase in the number of employees occurring during 2020.

Net Earnings

The realization of net earnings in 2020 decreased by 64.50% compared to the realization of net earnings in 2019.

Neraca

Pada akhir tahun 2020, total aset yang dikelola Perseroan telah mencapai kurang lebih Rp. 614,7 miliar (asset on book) sedangkan total asset managed pada tanggal

31 Desember 2020 sebesar Rp 883,9 miliar. Untuk total aset Perseroan baik on book maupun aset managed masing-masing mengalami penurunan masing-masing sebesar 17.79 % dan 23.53% jika dibandingkan dengan total aset on book dan aset managed akhir tahun 2019. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh:

- Investasi jangka pendek turun 100% karena adanya penjualan semua investasi jangka pendek yang dilakukan di Tahun 2020.
 - Aset tetap menurun sebesar 49.69% dari Rp 92.7 milyar di akhir Tahun 2019 menjadi Rp 46.2 milyar di akhir Tahun 2020 yang disebabkan karena penjualan aset tetap sewa operasi selama Tahun 2020, dimana sesuai dengan strategi Perseroan untuk lebih fokus ke bisnis inti Perseroan dalam menjalankan fungsi penyalur pembiayaan.
 - Piutang pembiayaan sewa turun sebesar 48.97% dari Rp 282 milyar diakhir Tahun 2019 menjadi Rp 144 milyar di akhir Tahun 2020 yang disebabkan karena penurunan newbooking sepanjang Tahun 2020 karena minimnya pendanaan baru dari pihak perbankan sehingga target-target Perseroan untuk melakukan pembiayaan baru banyak terkoreksi akibat kurangnya dukungan pembiayaan dari perbankan.

Selain itu, ada beberapa akun meningkat, seperti:

- Kas dan setara kas meningkat sebesar 156.39% dari Rp 9 milyar di akhir tahun 2019 menjadi Rp 23 milyar di akhir tahun 2020 disebabkan karena strategi perusahaan untuk memperkuat AR Management, sehingga cashflow dari Perseroan tetap terjaga.
- Piutang pembiayaan pembelian dengan pembayaran secara angsuran meningkat sebesar 81.01% dari Rp 34 milyar di akhir tahun 2019 menjadi Rp 62 milyar diakhir tahun 2020 disebabkan adanya kenaikan pembiayaan baru (newbooking) dimana sumber pendanaan untuk pembiayaan baru berasal dari pembiayaan bersama dengan kemitraan PT MNC Bank International Tbk sehingga Perseroan dapat menyalurkan pembiayaan tersebut kepada nasabah baru yang sesuai dengan kriteria pembiayaan bersama.
- Anjak piutang meningkat sebesar 16.58% dari Rp 205 milyar di akhir tahun 2019 menjadi Rp 239 milyar di akhir tahun 2020 karena kenaikan newbooking untuk pembiayaan baru.

Balance Sheet

By the end of 2020, the total assets managed by the Company reached approximately IDR614.7 billion (as- sets on book) while the total assets managed as of De- cember 31, 2020 was IDR883.9 billion. The Company's total assets, both on book and managed assets de- creased by 17.79% and 23.53% respectively compared to the total assets on book and managed assets at the end of 2019. The decrease was mainly due to:

- The decrease in short-term investment by 100% due to the sale of all short-term investments made in 2020.
- The decrease in fixed assets by 49.69% from IDR92.7 billion at the end of 2019 to IDR46.2 billion at the end of 2020 due to the sale of fixed assets of operating lease during 2020, which is in accordance with the company's strategy to focus more on the Company's core business in carrying out the function of financing distributor.
- The decrease in lease financing receivables by 48.97% from IDR282 billion at the end of 2019 to IDR144 billion at the end of 2020 due to the decrease in new bookings throughout 2020 due to the lack of new funding from the banking sector so that the company's target for conducting new financing was much corrected due to lack of financing support from banks.

In addition, there are several increasing accounts, such as:

- Cash and cash equivalents increased by 156.39% from IDR9 billion at the end of 2019 to IDR23 billion at the end of 2020 due to the company's strategy to strengthen AR Management, so that the Company's cash flow was maintained.
 - Financing receivables of purchase by installment payments increased by 81.01% from IDR34 billion at the end of 2019 to IDR62 billion at the end of 2020 due to the increase in new financing (new booking) where the source of funding for new financing came from joint financing with the partnership of PT MNC Bank International Tbk so that the Company could distribute the financing to new customers in accordance with the criteria of joint financing.
- Factoring increased by 16.58% from IDR205 billion at the end of 2019 to IDR239 billion at the end of 2020 due to the increase in new bookings for new financing.

Liabilitas

Pada tahun 2020, Perseroan mencatat total kewajiban sebesar Rp 353 milyar, turun 27.19% dibandingkan dengan tahun 2019. Penurunan ini terutama berasal dari:

- Pelunasan hutang Medium Term Notes (MTN) sebesar Rp 35 milyar yang sudah dilunasi di tahun 2020 sesuai dengan jangka tempo MTN tersebut.
- Penurunan pinjaman yang diterima karena adanya pembayaran pokok pinjaman rutin.

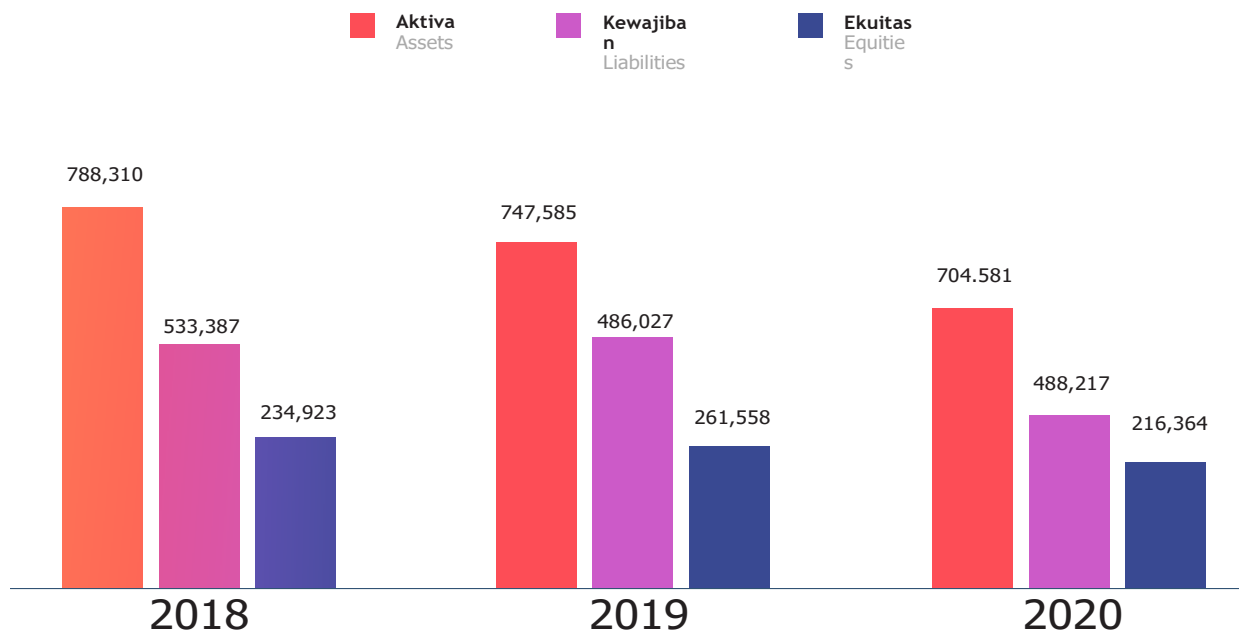
Selain itu, ada akun liabilitas yang meningkat yaitu utang dividen sebesar 100% atau menjadi sebesar Rp 7 milyar di tahun 2020. Pada tahun 2020 Pemegang Saham Perseroan menyetujui untuk pembagian dividen sebesar Rp 10 milyar dan Perseroan telah melakukan pembayaran dividen tunai sebesar Rp 3 milyar.

Liabilities

In 2020, the Company recorded total liabilities of IDR353 billion, decreasing by 27.19% from that in 2019. This decrease was mainly caused by:

- Repayment of Medium Term Notes (MTN) debt of IDR35 billion repaid in 2020 according to the MTN term.
- Decrease in the loans received due to regular payments of loan principals.

In addition, there was an increasing liability account, namely dividend payable by 100% or to IDR7 billion in 2020. In 2020, the Company's Shareholders agreed to distribute dividends of IDR10 billion and the Company had paid cash dividends of IDR3 billion.



MANAJEMEN RISIKO

Risk Management

Perkembangan industri jasa keuangan yang semakin dinamis, antara lain ditandai oleh persaingan yang semakin ketat, demografis konsumen yang berkembang, perubahan dan penerapan peraturan baru khususnya di bidang perusahaan pembiayaan, dan kondisi ekonomi makro yang semakin menantang, sehingga Perseroan perlu meningkatkan pengelolaan risiko yang efektif melalui penerapan manajemen risiko.

Penerapan manajemen risiko di Perseroan harus terus diperkuat, terutama pada kondisi pandemi Covid-19 yang terjadi sejak kuartal 1 2020 yang sangat berdampak kepada kegiatan usaha di berbagai sektor, salah satunya sektor pembiayaan.

Agar dapat menjalankan kegiatan usaha secara berkesinambungan dan prinsip kehati-hatian, Perseroan harus melakukan review terhadap strategi yang sudah disusun dan mengeluarkan kebijakan-kebijakan baru untuk menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi, serta mempersiapkan infrastruktur yang diperlukan untuk menyongsong era new normal.

Pengelolaan risiko di Perseroan dilakukan secara proaktif dan terintegrasi untuk mengelola risiko sesuai *risk appetite* dan *risk tolerance*, menjaga kekuatan permodalan, mendukung strategi bisnis, serta menjaga reputasi Perseroan.

1. Dasar Penerapan Manajemen Risiko

Dalam menerapkan manajemen risiko, Perseroan senantiasa berpedoman kepada ketentuan regulator, antara lain:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 44 /POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank.
- POJK No. 28/POJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank.
- POJK No. 10/POJK.05/2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan.
- POJK No. 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.
- SEOJK No. 11 /SEOJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah.

The increasingly dynamic development of financial services industry is, among others, marked by the increasingly tighter competition, growing consumer demographics, changes and implementation of new regulations, especially in the sector of financing companies, and the increasingly challenging macroeconomic conditions, so the Company needs to improve effective risk management by applying the risk management.

The application of risk management in the Company must continue to be strengthened, especially in the condition of COVID-19 pandemic that has occurred since the 1st quarter of 2020 which has greatly impacted business activities in various sectors, among others the financing sector.

In order to be able to carry out the business activities sustainably and the principle of prudence, the Company must review the strategies that have been prepared and issue new policies to adapt to the occurring conditions, as well as prepare the infrastructure needed to welcome the new normal era.

Risk management in the Company is carried out in a proactive and integrated manner to manage risks according to risk appetite and risk tolerance, maintain capital strength, support business strategy, and maintain reputation of the Company.

1. Bases of Risk Management Application

In applying the risk management, the Company always adheres to the regulator's regulations, among others:

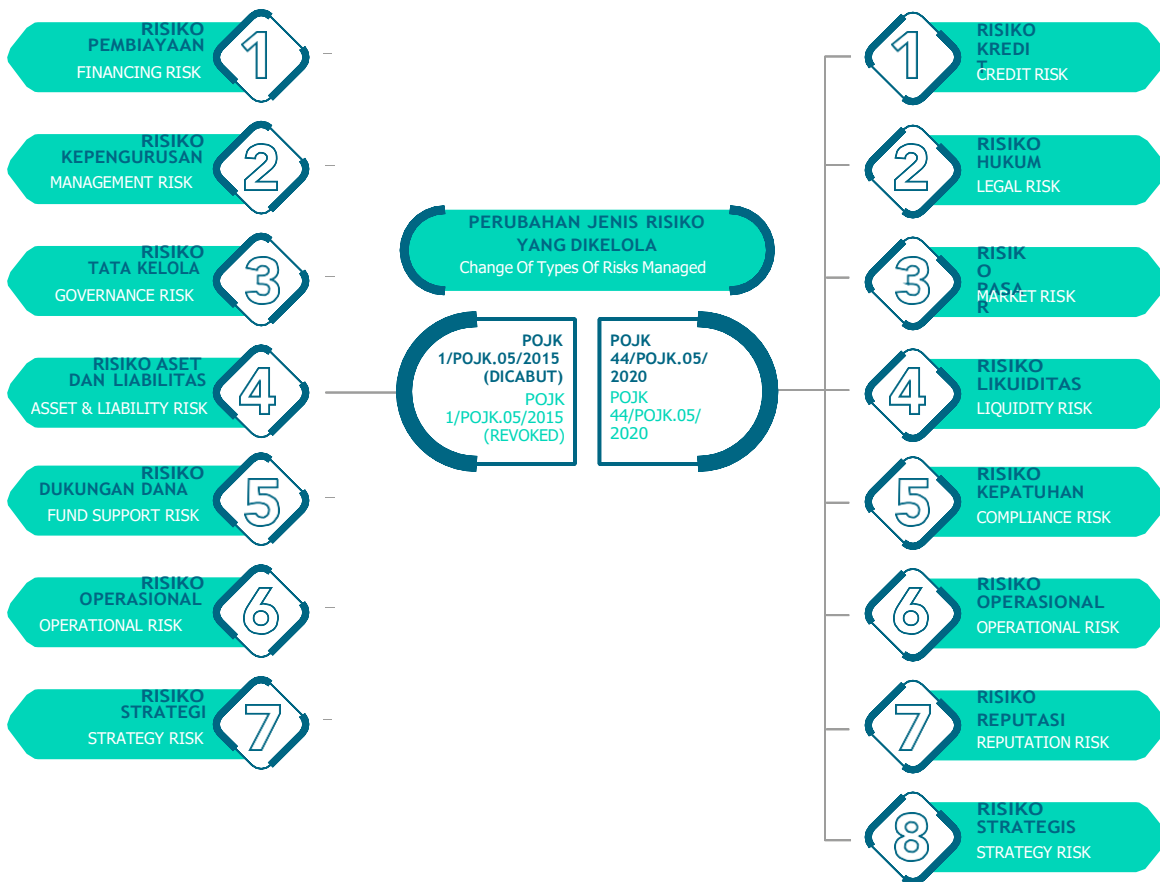
- Regulation of the Financial Services Authority (POJK) No.44/POJK.05/2020 on the Application of Risk Management for Non-Bank Financial Services Institutions.
- POJK No.28/POJK.05/2020 on Assessment of Health Level of Non-Bank Financial Services Institutions.
- POJK No.10/POJK.05/2019 on Business Coordination of Sharia Financing Companies and Sharia Business Units of Financing Companies.
- POJK No.35/POJK.05/2018 on Business Coordination of Financing Companies.
- SEOJK No.11/SEOJK.05/2020 on Assessment of Health Level of Financing Companies and Sharia Financing Companies.

MANAJEMEN RISIKO
Risk Management

- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 10/SEOJK.05/2016 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko dan Laporan Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank.
2. Perubahan Jenis Risiko yang dikelola Penerapan manajemen risiko pada Perseroan, sebelumnya mengacu kepada POJK No. 1/ POJK.05/2015 tgl 26 Maret 2015 perihal Penerapan Manajemen Risiko Bagi LJK Non Bank, selanjutnya dicabut dan digantikan oleh POJK No. 44 /POJK.05/2020 tgl 2 September 2020 perihal Penerapan Manajemen Risiko Bagi LJK Non Bank. Sehubungan dengan terjadinya perubahan tersebut, maka terdapat perubahan jenis risiko yang wajib dikelola oleh Perseroan, dari sebelumnya berjumlah 7 (tujuh) risiko menjadi 8 (delapan) risiko, sebagai berikut:

- Financial Services Authority (SEOJK) Circular No.10/SEOJK.05/2016 on Guidelines for Application of Risk Management and Report on Results of Self-Assessment on Application of Risk Management for Non-Bank Financial Services Institutions (LJK).

2. Change in types of risks managed The application of risk management in the Company, formerly referring to POJK No.1/ POJK.05/2015 dated March 26, 2015 on Application of Risk Management for Non-Bank LJK, subsequently revoked and replaced by POJK No.44/POJK.05/2020 dated September 2, 2020 on Application of Risk Management for Non-Bank LJK. Due to this change, there was a change in the types of risks that must be managed by the Company, from the previous 7 (seven) risks to 8 (eight) risks, as follows:

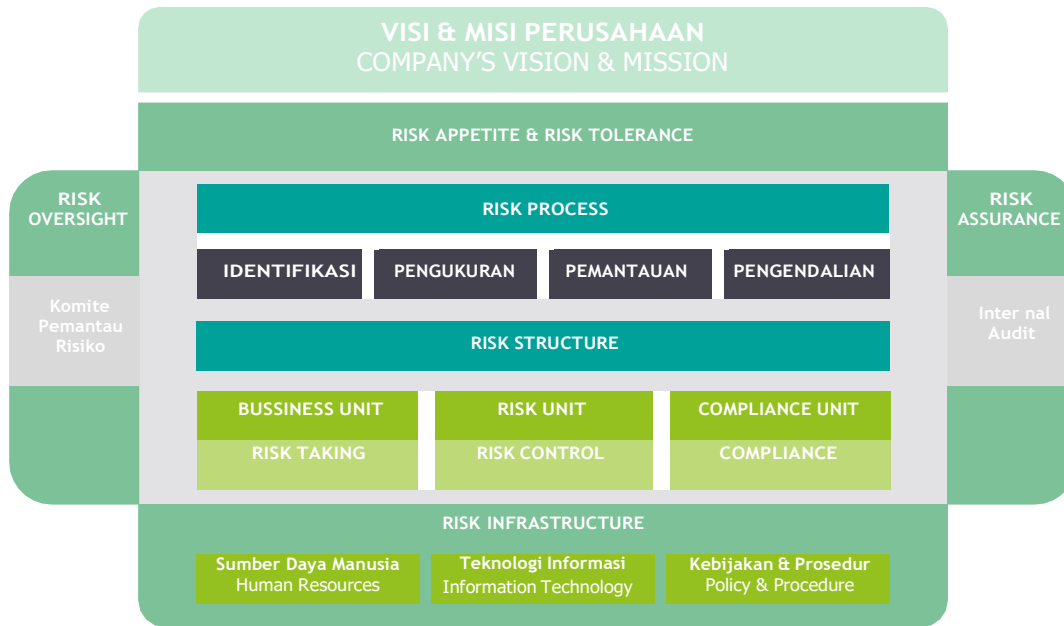


- a. Risiko Strategis adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.
- b. Risiko Operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang memengaruhi operasional Perseroan.
- c. Risiko Kredit adalah risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Perseroan.
- d. Risiko Pasar adalah risiko pada posisi aset, liabilitas, ekuitas, dan/atau rekening administratif termasuk transaksi derivatif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar.
- e. Risiko Likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Perseroan untuk memenuhi liabilitas yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid yang dapat dengan mudah dikonversi menjadi kas, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Perseroan.
- f. Risiko Hukum adalah risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek hukum.
- g. Risiko Kepatuhan adalah risiko akibat Perseroan tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku bagi Perseroan.
- h. Risiko Reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Perseroan.
- a. Strategy Risk is a risk due to inaccuracy in making and/or implementing a strategic decision and failure in anticipating changes in business environment.
- b. Operational Risk is a risk due to inadequacy and/or malfunction of the internal process, human error, system failure, and/or external events that affect the Company's operations.
- c. Credit risk is a risk due to failure of other parties in fulfilling their obligations to the Company.
- d. Market Risk is a risk in the position of assets, liabilities, equities, and/or administrative accounts including derivative transactions due to overall changes in market conditions.
- e. Liquidity risk is a risk due to the Company's inability to meet maturing liabilities from funding sources of cash flow and/or from liquid assets that are easily convertible into cash, without disrupting the Company's activities and financial condition.
- f. Legal Risk is a risk arising as the result of lawsuits and/or weaknesses in legal aspects.
- g. Compliance risk is a risk resulting from the Company's not complying with and/or not implementing the legislation and conditions applicable to the Company.
- h. Reputational risk is a risk due to the decrease in the stakeholders' reliability level originating from negative perceptions of the Company

MANAJEMEN RISIKO
Risk Management

3. Kerangka Manajemen Risiko
Kerangka Manajemen Risiko (*Risk Management Framework*) Perseroan disajikan dalam gambar sebagai berikut:

3. Risk Management Framework
The Company's Risk Management Framework is presented in the following figure:



Bagi Perseroan, proses manajemen risiko dan kontrol internal yang baik dan kuat merupakan bagian penting dari kegiatan operasional dan aktivitas dalam memastikan terwujudnya pertumbuhan bisnis yang sehat dan berkelanjutan serta memaksimalkan nilai tambah bagi pemegang saham.

Untuk mencapai visi dan misi Perseroan yang telah ditetapkan, proses manajemen risiko di Perseroan dilakukan sejalan dengan Kerangka Kerja Manajemen Risiko (*Risk Management Framework*) yang di dalamnya berisi pengelolaan risiko melalui penyesuaian *risk appetite* dengan strategi bisnis. Tujuan utama dari implementasi kerangka kerja ini adalah agar Perseroan dapat mencapai dan merealisasikan target dan rencana bisnisnya dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, mempertahankan kinerja keuangan yang baik, dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Proses manajemen risiko pada Perseroan harus dilengkapi dengan pengendalian internal yang menyeluruh yang tertuang dalam suatu *risk structure*, yang terdiri dari *risk taking*, *risk control*, dan *compliance*.

Untuk mendukung proses manajemen risiko, Perseroan harus dilandaskan dengan infrastruktur yang memadai,

For the Company, a good and strong process of risk management and internal control is an important part of operational activities and activities in ensuring the realization of healthy and sustainable business growth and maximizing the added value for shareholders.

To achieve the Company's specified vision and mission, the risk management process in the Company is carried out in line with the Risk Management Framework, which contains risk management by aligning risk appetite with business strategy. The main objective of implementing this framework is to enable the Company to achieve and realize its business targets and plans while still paying attention to the principle of prudence, maintaining good financial performance, and compliance with applicable regulations.

The risk management process in the Company must be equipped with comprehensive internal controls contained in a risk structure, which consists of risk taking, risk control, and compliance.

To support the risk management process, the Company must be based on adequate infrastructure, starting from

mulai dari sumber daya manusia (*human capital*) yang berkualitas, sistem dan informasi teknologi yang dapat diandalkan, serta kebijakan dan prosedur yang mencukupi.

Selain itu, proses manajemen risiko harus didukung dengan pilar yang kuat untuk memastikan telah berjalan sebagaimana mestinya, antara lain melalui fungsi risk oversight dan fungsi *risk assurance*. Fungsi *risk oversight*, selain dijalankan oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah, dibantu oleh *Risk Oversight Committee*. Fungsi *risk assurance* dibantu oleh fungsi yang menjalankan internal Audit.

Secara keseluruhan, kerangka kerja manajemen risiko di atas mengacu dan sejalan dengan ruang lingkup manajemen risiko yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

4. Penerapan Manajemen Risiko

Perseroan menerapkan Risk Governance Structure yang merujuk kepada regulasi dari otoritas jasa keuangan, yaitu berdasarkan 5 (lima) pilar penerapan manajemen risiko, antara lain:

qualified human resources/capital, reliable systems and information of technology, as well as adequate policies and procedures.

In addition, the risk management process must be supported by strong pillars to ensure that it is running properly, among others by the risk oversight function and the risk assurance function. The risk oversight function is not only undertaken by the Board of Directors, Board of Commissioners, and Sharia Supervisory Board, but also assisted by the Risk Oversight Committee. The risk assurance function is assisted by the function undertaking the internal audit.

Overall, the risk management framework above refers to and is in line with the scope of risk management specified by the Financial Services Authority (OJK).

4. Application of Risk Management

The Company applies a Risk Governance Structure that refers to regulations from the financial services authority, which is based on 5 (five) pillars of risk management application, namely:



a. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Pengawasan aktif Dewan Komisaris dilakukan antara lain melalui persetujuan dan evaluasi atas kebijakan manajemen risiko yang disusun oleh Direksi. Secara berkala Dewan Komisaris melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan manajemen risiko melalui Rapat Direksi dan Komisaris maupun dalam rapat Komite Pemantau Risiko. Selain itu, pengawasan aktif Dewan Komisaris dilakukan melalui persetujuan atas laporan tertentu seperti Laporan Self Assessment Manajemen Risiko, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris atas pelaksanaan atau realisasi rencana bisnis, dan sebagainya.

Pengawasan aktif Direksi dilaksanakan antara lain dengan penyusunan, persetujuan, dan implementasi serta evaluasi atas seluruh jenis regulasi internal Perseroan. Selain itu, pengawasan aktif Direksi dilakukan secara berkala baik berupa pengawasan langsung secara harian maupun melalui Rapat Direksi dan Rapat Koordinasi.

Selain itu, Direksi juga memiliki unit kerja khusus yang menjalankan fungsi manajemen risiko yang bersifat independent dari unit bisnis dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama. Di tingkat operasional, Fungsi Manajemen Risiko tersebut bersama Unit Bisnis melakukan fungsi identifikasi risiko, pengukuran risiko, mitigasi risiko serta pengendalian risiko.

Tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris terkait dengan pengawasan aktif dalam kegiatan Manajemen Risiko antara lain:

- 1). Memahami dengan baik jenis dan tingkat risiko yang melekat pada kegiatan bisnis Perusahaan.
- 2). Mengarahkan dan menyetujui Kebijakan Manajemen Risiko termasuk strategi dan kerangka manajemen risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*).
- 3). Mengevaluasi kebijakan dan strategi manajemen risiko secara berkala atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor kegiatan usaha secara signifikan.
- 4). Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko secara berkala. Evaluasi dilakukan dalam

a. Active Supervision of the Board of Commissioners and Directors

Active supervision of the Board of Commissioners is carried out, among others, by approval and evaluation of the risk management policies prepared by the Board of Directors. The Board of Commissioners periodically evaluates the implementation of risk management policies in the Board of Directors and Commissioners' meetings as well as in the Risk Monitoring Committee's meetings. In addition, the Board of Commissioners' active supervision is carried out by approval of certain reports such as the Risk Management Self Assessment Report, the Board of Commissioners' Supervision Report on the implementation or realization of business plans, and so on.

Active supervision of the Board of Directors is carried out, among others, by the preparation, approval, implementation and evaluation of all types of the Company's internal regulations. In addition, active supervision of the Board of Directors is carried out periodically, either in the form of direct supervision on a daily basis or through the Board of Directors' Meetings and Coordination Meetings.

Besides, the Board of Directors also has a special work unit that carries out the risk management function by nature independent of the business unit and directly responsible to the President Director. At operational level, the Risk Management Function together with the Business Unit performs the functions of risk identification, risk measurement, risk mitigation and risk control.

The duties, responsibilities and authorities of the Board of Commissioners related to active supervision in Risk Management activities include:

- 1). Good understanding of the types and levels of risks inherent in the Company's business activities.
- 2). Directing and approving the Risk Management Policy including the strategy and framework of the risk management specified according to the level of risk to be taken (*risk appetite*) and risk tolerance.
- 3). Evaluating the risk management policies and strategies periodically or more frequently in case there are changes in factors that significantly affect the business activities.
- 4). Evaluating the Board of Directors' accountability and giving directions for improvement of the implementation of the Risk Management Policy periodically. Evaluation is carried out in order

rangka memastikan bahwa Direksi mengelola aktivitas dan risiko secara efektif.

- 5). Memastikan penerapan manajemen risiko telah memadai sesuai dengan karakteristik, kompleksitas dan profil risiko perusahaan.

Tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi terkait dengan kegiatan Manajemen Risiko antara lain:

- 1). Menyusun kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif termasuk limit risiko secara keseluruhan dan per jenis risiko, dengan memperhatikan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko sesuai kondisi perusahaan serta memperhitungkan dampak risiko terhadap kecukupan permodalan.

- 2). Mengevaluasi dan/atau mengkinikan kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Perusahaan, eksposur risiko, dan/atau profil risiko secara signifikan.

- 3). Memiliki pemahaman yang memadai mengenai Risiko yang melekat pada seluruh kegiatan bisnis dalam Perusahaan dan mampu mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan profil risiko Perusahaan, antara lain dengan memberikan rekomendasi atau usulan terkait penerapan manajemen risiko kepada masing-masing satuan kerja di Perusahaan.

- 4). Menetapkan struktur organisasi termasuk wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko.

- 5). Memastikan pelaksanaan langkah- langkah perbaikan atas permasalahan atau penyimpangan dalam kegiatan usaha Perusahaan yang ditemukan oleh satuan kerja yang melakukan fungsi audit internal.

- 6). Mengembangkan budaya manajemen risiko termasuk kesadaran risiko pada seluruh jenjang organisasi, antara lain meliputi komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi tentang pentingnya pengendalian intern yang efektif.

- 7). Memastikan kecukupan dukungan keuangan dan infrastruktur untuk mengelola dan mengendalikan risiko.

- 8). Memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah diterapkan secara independen yang dicerminkan antara lain: adanya pemisahan fungsi antara satuan kerja yang melakukan

to ensure that the Board of Directors manages the activities and risks effectively.

- 5). Ensuring that the application of risk management has been adequate in accordance with the characteristics, complexity and risk profile of the company.

The duties, responsibilities and authorities of the Board of Directors related to Risk Management activities are namely:

- 1). Preparing written and comprehensive risk management policies, strategies and frameworks including overall risk limits and per type of risk, taking into account the level of risk to be taken and the risk tolerance according to the company's conditions and taking into account the impact of risks on capital adequacy.

- 2). Evaluating and/or updating risk management policies, strategies and frameworks at least once a year or more frequently in case there are changes in factors that significantly affect the Company's business activities, risk exposure, and/or risk profile.

- 3). Having an adequate understanding of the risks inherent in all business activities in the Company and capable of taking the necessary actions in accordance with the Company's risk profile, among others by giving recommendations or proposals related to the application of risk management to each work unit in the Company.

- 4). Specifying the organizational structure including clear authorities and responsibilities at each level of position related to the application of risk management.

- 5). Ensuring the implementation of corrective measures for problems or deviations in the Company's business activities found by the work unit performing the internal audit function.

- 6). Developing a risk management culture including risk awareness at all levels of the organization, including adequate communication to all levels of the organization regarding the significance of effective internal control.

- 7). Ensuring adequate financial support and infrastructures to manage and control the risks.

- 8). Ensuring that the risk management function has been applied independently as reflected, among others in: the separation of functions between the work unit performing the

MANAJEMEN RISIKO Risk Management

fungsi manajemen risiko yang melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian Risiko dengan satuan kerja yang melakukan fungsi pengendalian internal dan penerapan manajemen risiko bebas dari benturan kepentingan antar satuan kerja.

9). Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Perusahaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10. Memastikan penerapan manajemen risiko telah memadai sesuai dengan karakteristik, kompleksitas dan profil risiko perusahaan.

b. Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko serta Penetapan Limit Risiko

Perseroan memiliki Kebijakan Manajemen Risiko yang dijadikan sebagai pedoman utama dalam melaksanakan manajemen risiko. Untuk area bisnis yang lebih spesifik, Perseroan memiliki kebijakan dan prosedur yang lebih khusus, misalnya di bidang pembiayaan, operasional, *human capital*, APU PPT, dan sebagainya.

Dalam kebijakan dan prosedur tersebut, antara lain diatur mengenai tugas dan tanggung jawab dan penetapan limit untuk masing-masing aktivitas, baik pada level portofolio maupun transaksional.

Seluruh kebijakan dan prosedur di Perseroan merupakan bentuk pengelolaan risiko yang melekat pada setiap aktivitas operasi Perseroan yang dievaluasi secara berkala sesuai jenis dan level regulasi internal tersebut.

Penetapan limit risiko Perseroan mencakup limit per risiko maupun limit secara keseluruhan. Kebijakan, prosedur dan limit Risiko tersebut secara berkala dilakukan review dengan persetujuan sampai dengan tingkat Direksi melalui rapat komite ataupun melalui sirkulasi kepada Direksi sesuai dengan tingkat kewenangan.

Dalam menetapkan regulasi internal, Perseroan memiliki suatu tatanan dan hierarki untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip tata kelola yang berlaku, yaitu:

risk management function that identifies, measures, monitors and controls Risks and the work unit performing the internal control function and the risk management application to be free from conflicts of interest between the work units.

9). Ensuring that all policies, provisions, systems, and procedures, as well as business activities carried out by the Company have complied with the applicable legislation.

10). Ensuring that the risk management application has been adequate in accordance with the characteristics, complexity and risk profile of the company.

b. Risk Management Policies and Procedures and Risk Limits Setting

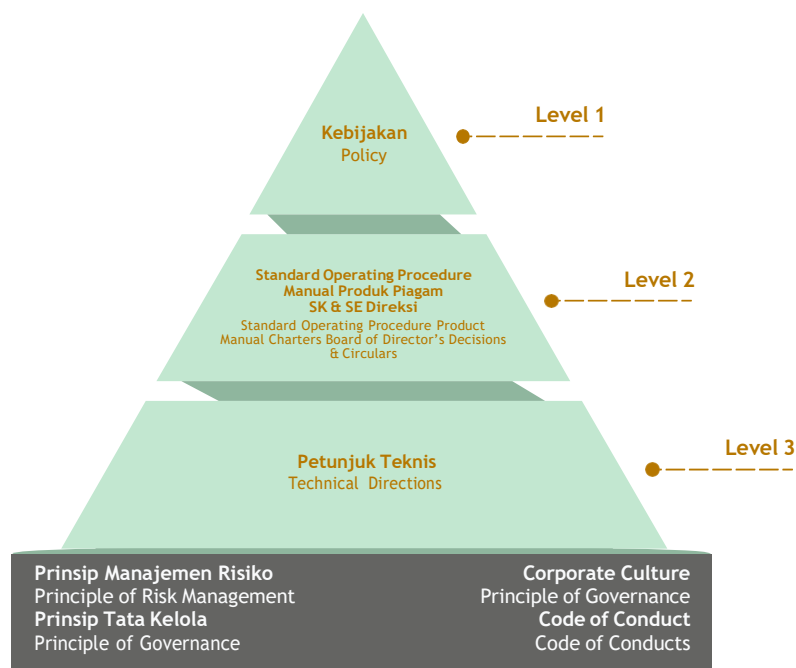
The Company has the Risk Management Policy to serve as the main guideline in implementing risk management. For more specific business areas, the Company has more specific policies and procedures, for example in the sectors of financing, operation, human capital, AML-CFT (anti-money laundering and combating the financing of terrorism), and so on.

The policies and procedures among others arrange the duties and responsibilities and set the limits for each activity, both at the portfolio and transactional levels.

All policies and procedures in the Company are a form of risk management inherent in each of the Company's operational activities which are evaluated periodically according to the type and level of the internal regulations.

The setting of Company's risk limits includes the limits per risk as well as limits as a whole. The policies, procedures and limits of risks are periodically reviewed with approval up to the Board of Directors' level by committee meetings or by circulars to the Board of Directors according to the level of authority.

In specifying internal regulations, the Company has an order and hierarchy to ensure compliance with the applicable governance principles, namely:



Regulasi internal dikategorikan menjadi 3 (tiga) level, dimana level tertinggi adalah level 1 yaitu kebijakan. Level 1 adalah prinsip-prinsip dasar yang berlaku secara menyeluruh (company wide) dan menjadi landasan bagi seluruh ketentuan internal di bawahnya. Pada Level 2 adalah dokumen-dokumen turunan dari kebijakan yang sifatnya lebih rinci untuk penerapan dari kebijakan tersebut. Pada Level 3 adalah petunjuk teknis yang berisi teknis dari aturan/sistem yang ditetapkan sebelumnya pada level 2.

Selama tahun 2020, Perseroan telah melakukan evaluasi terhadap limit dan kewenangan, antara lain batas wewenang memutus pembiayaan, batas wewenang komite penjualan asset, dan kewenangan pengadaan barang dan jasa.

Selain itu, Perseroan juga telah melakukan evaluasi dan penetapan *Risk Appetite & Risk Tolerance* Tahun 2020 sesuai kondisi terkini.

c. Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko.

Proses manajemen risiko Perseroan mencakup proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko secara berkesinambungan terhadap seluruh faktor risiko yang bersifat material dengan didukung oleh Sistem Informasi Manajemen Risiko.

1). Identifikasi

Proses Identifikasi risiko dilakukan untuk menganalisa sumber, tingkat kemungkinan

Internal regulations are categorized into 3 (three) levels, of which the highest level is level 1, namely policy. Level 1 is of the basic principles that apply as a whole (company wide) and become the basis for all internal regulations under it. At Level 2 are found derivative documents of the policy which are more detailed in nature for the policy application. At Level 3 are found technical directions containing the technicalities of the rules/systems specified earlier at level 2.

During 2020, the Company has conducted evaluation on the limits and authorities, including the limit of authority to decide on financing, the limit of authority of the asset sales committee, and the authority to procure goods and services.

In addition, the Company has also conducted evaluation and specification of the 2020 Risk Appetite & Risk Tolerance according to the latest conditions.

c. Processes of Identification, Measuring, Monitoring, and Control of Risks

The Company's risk management process covers continuous processes of risk identification, measuring, monitoring and control for all material risk factors supported by the Risk Management Information System.

1). Identification

The process of risk identification is conducted to analyze the source, level of possibility of risk

timbulnya risiko dan dampaknya.

2). Pengukuran

Proses pengukuran risiko dilakukan untuk mengetahui besarnya eksposur risiko sebagai acuan dalam melakukan pengendalian risiko. Pengukuran risiko dilakukan secara kuantitatif dan/atau kualitatif sesuai metode pengukuran yang ditetapkan oleh regulator atau dengan menggunakan metode internal untuk metode yang belum ditetapkan secara khusus.

3). Pemantauan

Proses pemantauan risiko dilakukan untuk memastikan bahwa risiko telah dikelola dengan baik antara lain melalui pemantauan terhadap mitigasi dan limit risiko yang telah ditetapkan. Pemantauan risiko dilakukan baik oleh Business Unit (risk taking unit) sebagai pemilik risiko (risk owner) maupun oleh Fungsi Manajemen Risiko sebagai risk control unit.

Hasil pemantauan disajikan dalam laporan berkala yang disampaikan kepada manajemen dalam rangka mitigasi risiko dan tindak lanjut yang diperlukan.

4). Pengendalian Risiko

Proses pengendalian risiko dilakukan terutama untuk mengelola risiko yang dapat mengganggu kelangsungan usaha Perusahaan. Strategi pengendalian risiko yang dilakukan oleh Perusahaan adalah menerima risiko (*risk acceptance*), menghindari risiko (*risk avoidance*), memindahkan risiko (*risk transfer*) dan mengurangi risiko (*risk mitigation*).

Sistem Informasi Manajemen Risiko

- d. Sistem informasi Manajemen Risiko ditujukan untuk mendukung pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, dan memastikan tersedianya informasi yang akurat, lengkap, informatif, tepat waktu, dan dapat diandalkan sehingga dapat digunakan dalam rangka proses pengambilan keputusan oleh Manajemen.

Pada level individual entitas, Perusahaan memiliki *Risk Management Dashboard* yang berisi indikator risiko tertentu dipergunakan untuk mengukur dan memantau kejadian aktual dengan limit risiko yang telah ditetapkan. Hasil pemantauan disampaikan kepada manajemen sebagai bahan evaluasi dan *warning system* untuk mempersiapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk pengendalian risiko.

Pada level konglomerasi keuangan, Perusahaan menggunakan *Integrated Risk Management System* yang merupakan sistem informasi manajemen risiko yang dipergunakan oleh

occurrence and its impact.

2). Measuring

The process of risk measuring is conducted to determine the amount of risk exposure as a reference in controlling risk. Risk measuring is conducted quantitatively and/or qualitatively according to the measuring method specified by the regulator or by using internal methods for methods not specifically specified yet.

3). Monitoring

The process of risk monitoring is conducted to ensure that risks have been managed properly, among others by monitoring of risk mitigation and limits already set. Risk monitoring is carried out both by the Business Unit (risk taking unit) as the risk owner and by the Risk Management Function as the risk control unit. The results of monitoring are presented in periodic reports submitted to the management in the context of risk mitigation and follow-up required.

4). Risk Control

The process of risk control is conducted especially to manage risks that may interfere with the Company's business continuity.

The risk control strategy undertaken by the Company is to accept risks (risk acceptance), avoid risks (risk avoidance), transfer risks (risk transfer) and mitigate risks (risk mitigation).

- d. Risk Management Information System

The Risk Management information system is intended to support the implementation of the processes of risk identification, measuring, monitoring, and control, and to ensure the availability of accurate, complete, informative, timely, and reliable information so that it can be used in the process of decision-making by the Management.

At the level of individual entity, the Company has a Risk Management Dashboard containing certain risk indicators used to measure and monitor actual events by the specified risk limits. The results of monitoring are submitted to the management as material for evaluation and warning system to prepare the necessary measures for risk control.

At the level of financial conglomerate, the Company uses an Integrated Risk Management System, which is a risk management information system used by all members of the financial conglomerate. The results

seluruh anggota konglomerasi keuangan. Hasil pemantauan disampaikan kepada manajemen, perusahaan induk, dan entitas utama, termasuk Komite Manajemen Risiko Terintegrasi.

of monitoring are submitted to the management, parent company, and main entities, including the Integrated Risk Management Committee.

e. Sistem Pengendalian Internal Yang Menyeluruh

e. Comprehensive Internal Control System

Perseroan menjalankan praktik pengelolaan risiko yang efektif di seluruh Unit Kerja dengan menerapkan kebijakan Three Line of Defense Models dalam pengelolaan risiko dan dilakukan pengawasan oleh Dewan Komisaris dan Direksi, seperti gambar di bawah ini:

The Company carries out effective risk management practices in all Work Units by applying the Three Line of Defense Models policy in risk management supervised by the Board of Commissioners and Board of Directors, as shown below:



1). 1st Line of Defense

Garis pertahanan pertama terdiri dari unit kerja pengambil dan pemilik risiko yang melaksanakan fungsi bisnis dan unit kerja pendukung. Unit kerja tersebut dalam melaksanakan aktivitas hariannya berhadapan langsung dengan berbagai jenis dan kemungkinan risiko yang dihadapi Perseroan. Seluruh fungsi pada garis pertahanan pertama bertanggung jawab dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko yang melekat pada setiap produk, kegiatan, proses dan sistem yang dijalankan.

1). 1st Line of Defense

The first line of defense consists of work units of risk taker and risk owner that perform business functions and supporting work units. The work units in carrying out their daily activities directly deal with various types and possibilities of risks faced by the Company. All functions in the first line of defense are responsible for identifying and managing the risks inherent in every product, activity, process and system undertaken.

2). 2nd Line of Defense

Garis pertahanan kedua terdiri dari unit kerja manajemen risiko, kepatuhan dan APU PPT. Garis pertahanan kedua bertugas melakukan fungsi pengawasan yang independen dari aktivitas bisnis dan pelaporan ke manajemen untuk memastikan bahwa Perseroan melakukan aktivitas bisnis dan beroperasi sesuai dengan appetite dan ketentuan dari regulator. Unit yang termasuk dalam lini kedua ini juga mengembangkan dan menyusun strategi dan mengimplementasikan kebijakan

2). 2nd Line of Defense

The second line of defense consists of work units of risk management, compliance and AML-CFT. The second line of defense is in charge of conducting independent supervisory functions of business activities and reporting to the management to ensure that the Company conducts business activities and operates according to the appetite and conditions of the regulator. The units included in this second line also develop and formulate strategies and implement policies and procedures, as well as

dan prosedur, serta mengumpulkan informasi untuk memperoleh pandangan menyeluruh atas risiko yang dimiliki dan dihadapi oleh Perseroan.

3). *3rd Line of Defense*

Pada garis ketiga pertahanan terdiri dari unit internal audit. Internal audit berfungsi sebagai suatu unit independen yang bertanggung jawab untuk mengevaluasi pelaksanaan manajemen risiko dan proses pengendalian di Perseroan secara keseluruhan, baik pada *1st line* maupun *2nd line of defense*. Unit ini bertugas melakukan audit yang memberikan nilai tambah kepada *1st line dan 2nd line of defense*, untuk memastikan bahwa seluruh elemen Perseroan telah melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya dengan baik termasuk memastikan kesesuaian dengan kebijakan manajemen Perseroan dan regulasi yang

berlaku.

Pengelolaan Manajemen Risiko di Tahun 2020

5. Sepanjang tahun 2020, Perseroan meningkatkan efektivitas manajemen risiko Perseroan guna memperkuat kinerja di masa depan. Oleh karena itu fokus Perseroan di tahun 2020 adalah untuk memperkuat dan memperbaiki sistem yang kuat dan mengakar ke seluruh struktur organisasi.
- a. Risiko Kredit

Dampak dari pandemi Covid-19 yang terjadi sejak awal tahun 2020 terhadap perekonomian Indonesia dan signifikan terhadap sebagian besar industri di Indonesia, terutama dengan adanya kebijakan pemerintah untuk menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) demi mencegah penyebaran Covid-19, menyebabkan kegiatan usaha sebagian besar industri sangat terbatas. Hal ini kemudian berdampak kepada kinerja usaha debitur dan kemampuan debitur Perseroan dalam membayar kewajibannya kepada Perseroan. Hal ini berdampak signifikan terhadap industri pembiayaan. Data statistik industri perusahaan pembiayaan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan dampak tersebut misalnya pada tingkat Non Performing Financing (NPF) Industri Pembiayaan pada Juni 2020 bahkan mencapai lebih dari 5%.

Meskipun demikian, Perseroan berupaya semaksimal mungkin untuk dapat menjaga kualitas pembiayaan dengan meningkatkan pemantauan kepada debitur dan penyesuaian regulasi internal terkait dengan proses penyelamatan (restrukturisasi) pembiayaan debitur terutama yang terdampak Covid-19.

gather information to obtain a comprehensive view of the risks that are owned and faced by the Company.

3). 3rd Line of Defense

The third line of defense consists of the internal audit unit. The internal audit functions as an independent unit responsible for evaluating the implementation of risk management and control process in the Company as a whole, both in the 1st line and 2nd line of defense.

This unit is assigned to conduct audits that give added value to the 1st line and 2nd line of defense, to ensure that all elements of the Company have performed their functions and responsibilities properly, including ensuring compliance with the Company's management policies and applicable regulations.

5. Administering Risk Management in 2020

Throughout 2020, the Company increased the effectiveness of its risk management in order to strengthen future performance. Therefore, the Company's focus in 2020 is to strengthen and improve a system that is strong and rooted in the entire organizational structure.

a. Credit Risk

The impact of the COVID-19 pandemic that has occurred since early 2020 on the Indonesian economy and is significant for most industries in Indonesia, especially by the government's policy to implement Large-Scale Social Restrictions (PSBB) to prevent the spread of COVID-19, has caused the business activities of most industries to be very limited. This then has an impact on debtors' business performance and the ability of the Company's debtors to pay their liabilities to the Company. This has a significant impact on the financing industry. The statistical data on the industry of financing companies published by the Financial Services Authority show that the impact, for example, at the level of Non Performing Financing (NPF) of Financing Industry in June 2020 even reached more than 5%.

Nevertheless, the Company made every effort to maintain the quality of financing by increasing monitoring on debtors and adjusting internal regulations related to the process of rescuing (restructuring) debtors' financing, especially those affected by COVID-19.

Selain itu, Perseroan juga membentuk pencadangan yang cukup untuk pembiayaan dengan mengacu kepada peraturan standar akuntansi dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.

Dalam menyalurkan pembiayaan, Perseroan senantiasa mengedepankan prinsip kehati-hatian dengan menempatkan fungsi analisis pembiayaan yang dilakukan oleh unit bisnis dan Credit Analyst yang independen. Perseroan senantiasa berpedoman pada Kebijakan Pembiayaan, Manual Produk Pembiayaan, dan Standar Operating Procedure (SOP) dalam mengelola risiko kredit secara *end-to-end*. Secara operasional, kebijakan ini dituangkan dalam bentuk Petunjuk Teknis dan Surat Edaran/Surat Keputusan Direksi.

Risiko Strategis

- b. Kondisi pandemi Covid-19 yang terjadi sejak awal tahun 2020 berdampak kepada perekonomian Indonesia secara umum dan industri perusahaan pembiayaan secara lebih khusus. Data statistik industri perusahaan pembiayaan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan dampak tersebut secara kuantitatif dimana secara umum, kinerja keuangan industri perusahaan pembiayaan mengalami penurunan.

Sebagai salah satu bagian dari industri perusahaan pembiayaan, dalam menyikapi kondisi tersebut, Perseroan mengevaluasi kembali strategi bisnis yang sudah direncanakan dan melakukan penyesuaian baik dari segi bisnis maupun operasional Perseroan.

Untuk tetap bertahan dalam kondisi pandemi tersebut, Perseroan mempelajari dan melakukan kajian terhadap industri atau sektor yang tetap memiliki prospek bagus meski dalam kondisi pandemi, serta dapat menarik bagi pihak perbankan sehingga menyalurkan pendanaan kepada Perseroan. Selanjutnya berdasarkan kajian, Perseroan menyusun rencana untuk melakukan diversifikasi produk dan mengembangkan portofolio kepada industri/sektor tertentu.

Perseroan melakukan penyesuaian terhadap rencana bisnis atau rencana strategis tahunan untuk tahun 2020 menyesuaikan kondisi makro ekonomi yang terjadi. Selanjutnya Perseroan juga menyesuaikan *Risk Appetite Statement* (RAS) dan *Risk Tolerance* (RT) Perseroan dengan mempertimbangkan rencana strategis yang telah disesuaikan tersebut.

In addition, the Company also established sufficient reserves for financing by referring to the applicable accounting standards and regulations of the Financial Services Authority.

In distributing financing, the Company always prioritizes the principle of prudence by placing the financing analysis function carried out by the business unit and independent Credit Analyst. The Company always adheres to the Financing Policy, Financing Product Manual, and Standard Operating Procedure (SOP) in managing end-to-end credit risk. Operationally, this policy is set forth in the form of Technical Directions and Circulars/Decisions of the Board of Directors.

- b. Strategic Risk

The condition of COVID-19 pandemic that has occurred since early 2020 has impacted the Indonesian economy in general and the financing company industry in particular. The statistical data of financing company industry published by the Financial Services Authority show the impact quantitatively of which in general, the financial performance of financing company industry has decreased.

As a part of the financing company industry, in responding to this condition, the Company re-evaluated the planned business strategy and made adjustment both in terms of the Company's business and operations.

To survive in this pandemic condition, the Company delved and conducted studies on industries or sectors that still have good prospects even in the pandemic condition, and could still attract banks to distribute funds to the Company. Furthermore, based on the study, the Company prepared the plans to diversify products and develop portfolios for certain industries/sectors.

The Company made adjustment to its business plan or annual strategic plan for 2020 according to the occurring macroeconomic conditions. Further, the Company also adjusted the Company's Risk Appetite Statement (RAS) and Risk Tolerance (RT) by considering the adjusted strategic plans.

Guna memastikan pelaksanaan dari rencana strategis yang telah ditetapkan, maka dilakukan pemantauan, baik melalui report harian, rapat koordinasi secara bulanan, serta rapat kerja bersama dengan seluruh unit bisnis.

- c. Risiko Reputasi
Salah satu langkah dalam mengendalikan risiko reputasi, Perseroan senantiasa memantau berita atau publikasi lainnya yang terkait dengan Perseroan untuk memastikan.

Selain itu, Perseroan senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada debitur dan menyediakan media yang transparan bagi debitur/konsumen untuk menyampaikan saran/keluhan kepada Perseroan. Prosedur mengenai penyampaian saran/keluhan kepada Perseroan disampaikan kepada debitur/konsumen dalam satu *bundle* dokumen yang disebut "*starter pack*".

Strater pack merupakan satu *bundle* dokumen yang disampaikan kepada debitur/konsumen setiap setelah pencairan pembiayaan, berisi:

- 1). Kontrak
- 2). Polis Asuransi
- 3). Panduan Pengaduan Nasabah
- 4). Panduan Pembayaran Angsuran
- 5). Panduan Claim Asuransi
- 6). Thank You Letter.

Selain itu, Perseroan juga menyediakan hotline customer care untuk memudahkan debitur/konsumen menghubungi Perseroan dalam hal terdapat keluhan atau permintaan informasi.

Pada tahun 2020, Perseroan juga melanjutkan program penerapan keuangan berkelanjutan atau *Environment, Social, and Government* (ESG) ke dalam bisnis dan operasional Perseroan.

Meskipun kondisi pandemi Covid-19 menyebabkan banyak Perusahaan Pembiayaan yang melakukan restrukturisasi kepada pihak perbankan sesuai dengan permohonan debitur, namun Perseroan tetap dapat mempertahankan likuiditasnya dan tidak meminta restrukturisasi kepada pihak perbankan. Hal ini dilakukan untuk menjaga kredibilitas dan menunjukkan kekuatan Perseroan dalam bertahan bahkan dalam kondisi pandemic (*worse condition*).

Risiko Likuiditas

- d. Terutama semenjak terjadinya Pandemi Covid-19, Perseroan memperketat pemantauan terhadap kondisi likuiditas

To ensure the implementation of the specified strategic plans, monitoring is conducted, either by daily reports, monthly coordination meetings, and joint work meetings with all business units.

- c. Reputation Risk
As one of the measures in controlling reputation risk, the Company at all times monitors news or other publications related to the Company for certainty.

In addition, the Company always strives to improve the quality of service to debtors and provides transparent media for debtors/consumers to submit suggestions/complaints to the Company. The procedure for submitting suggestions/complaints to the Company is informed to debtors/consumers in a bundle of documents called "*starter pack*".

The Starter pack is a bundle of documents submitted to debtors/consumers every time after disbursement of financing, containing:

- 1). Contract
- 2). Insurance Policy
- 3). Customer Complaint Guide
- 4). Installment Payment Guide
- 5). Insurance Claim Guide
- 6). Thank You Letter.

In addition, the Company also provides a customer care hotline to facilitate the debtors/consumers to contact the Company in case of complaints or requests for information.

In 2020, the Company also continued the program for application of Environmental, Social, and Government (ESG) sustainable finance into the Company's business and operations.

Even though the Covid-19 pandemic has caused many Financing Companies to conduct restructuring to banks according to debtors' requests, the Company was still able to maintain its liquidity and has not asked for restructuring from banks. This is done to maintain the Company's credibility and demonstrate its strength in surviving even in the pandemic (worse) condition.

- d. Liquidity Risk
Especially since the Covid-19 pandemic, the Company has tightened monitoring of the Company's liquidity conditions. The

Perseroan. Manajemen mengambil beberapa Langkah, antara lain:

- 1). Pemantauan *cash in* dan/atau *cash flow* Perseroan secara lebih ketat.
- 2). Penerapan program *cost reduction*
- 3). Menjaga kecukupan *cash ratio* dan *current ratio*

e. Risiko Operasional

Risiko operasional dapat memicu timbulnya risiko-risiko lain seperti risiko reputasi, risiko strategik, risiko hukum, risiko pasar, risiko kredit, risiko kepatuhan dan risiko likuiditas. Apabila Perseroan dapat mengelola risiko operasional secara efektif dan konsisten, maka potensi timbulnya risiko-risiko lain dapat diminimalisir. Risiko operasional secara inheren/melekat terdapat dalam setiap produk/aktivitas/proses operasional Perseroan dalam menjalankan organisasi.

Strategi Mitigasi Risiko Operasional merupakan bagian tidak terpisahkan dari seluruh prosedur operasional Perseroan pelaksanaan yang menggambarkan peran dan tanggung jawab personil dalam melaksanakan tugas dalam alur proses kerja, limit kewenangan dan batasannya, garis pelaporan dan eskalasi, *maker-checker-approver*, dan lain-lain.

Kebijakan dan prosedur juga berfungsi sebagai sarana *knowledge management* karena mengandung informasi berharga dan sering digunakan sebagai sarana pelatihan untuk mempertahankan dan mentransfer pengetahuan.

Pada tahun 2020, Perseroan melakukan upaya peningkatan dalam mengelola risiko operasional melalui beberapa inisiatif dan perubahan proses serta kebijakan, antara lain:

- 1). Contingency Plan Covid-19 dan Manajemen (Protokol Kesehatan) di lingkungan Perseroan

Pandemi Covid-19 yang terjadi semenjak awal tahun 2020 merupakan kejadian tak terduga yang berdampak signifikan, baik terhadap bisnis maupun kegiatan operasional Perseroan.

Selain *concern* Manajemen terhadap Kesehatan dan keselamatan karyawan/ti Perseroan, adanya kebijakan pemerintah untuk menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada beberapa daerah, sehingga diperlukan implementasi Contingency Plan terhadap Covid-19.

Management has taken several measures, namely:

- 1). More stringent monitoring of the Company's cash in and/or cash flow.
- 2). Implementation of cost reduction program.
- 3). Maintaining adequate cash ratio and current ratio

e. Operational Risk

Operational risk can trigger other risks such as reputation risk, strategy risk, legal risk, market risk, credit risk, compliance risk and liquidity risk. If the Company is able to manage operational risk effectively and consistently, the potential occurrence of other risks can be minimized. Operational risk is inherent in every product/activity/process of the Company's operation in undertaking the organization.

The Strategy of Operational Risk Mitigation is an integral part of all operational procedures of the Company, which describes the roles and responsibilities of personnel in carrying out the jobs in the work process flow, authority limits and limitations, reporting and escalation lines, *maker-checker-approver*, etc.

Policies and procedures also serve as a means of knowledge management because they contain valuable information and are often used as training tools to retain and transfer knowledge.

In 2020, the Company made efforts of improvement in dealing with operational risk through several initiatives in and changes to processes and policies, namely:

- 1). Covid-19 Contingency Plan and Management (Health Protocol) in the Company's environment

The Covid-19 pandemic that has occurred since early 2020 was an unexpected event having significant impacts, both on the Company's business and operational activities.

Besides the Management's concern for the health and safety of the Company's employees, there was a government policy to implement Large-Scale Social Restrictions (PSBB) in several areas, so that the implementation of a Contingency Plan against Covid-19 was required.

Adapun beberapa hal yang diterapkan dalam *contingency plan* adalah kebijakan *work from home*, pembatasan/pengurangan waktu kerja, serta pembagian waktu kerja (*shifting*) bagi level pekerjaan tertentu.

Selain itu, Perseroan juga menyusun dan menerapkan protokol kesehatan sesuai *best practice* untuk Covid-19, seperti pengukuran suhu badan karyawan, penyediaan sabun, hand sanitizer, masker, bantuan obat atau vitamin, hingga penyemprotan disinfektan secara harian. Campaign atau sosialisasi dilakukan kepada karyawan/ti terkait pandemic Covid-19 seperti cara penyebaran, cara pencegahan, dan lainnya.

2). Perbaikan dalam proses pengadaan barang dan jasa dan pengelolaan vendor (*vendor management*)

Tata cara pengelolaan vendor juga telah distandarisasi dengan tujuan agar pemilihan dan penerimaan vendor lebih sesuai dengan standar kriteria yang dapat diterima Perseroan, serta agar dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap seluruh vendor.

Perbaikan terhadap proses pengadaan barang dan jasa, antara lain melalui evaluasi dan update terhadap kewenangan pejabat yang dapat menyetujui pengadaan barang dan jasa, perbaikan proses dan metode pengadaan barang dan jasa, serta penyesuaian tugas dan tanggung jawab sesuai dengan perubahan struktur organisasi yang berlaku.

3). *Dual control* dengan memanfaatkan system

Data debitur yang diinput dalam system Perseroan sangat penting, karena akan berdampak kepada pengambilan keputusan dan pelaporan baik kepada internal maupun eksternal. Oleh karena itu, untuk meyakini kesesuaian data debitur yang telah diinput ke dalam system dengan dokumen pendukung, maka pada saat pengecekan dokumen kontrak, Perseroan mengecek kembali hal tersebut dengan mencetak lembar control (LK) dari system.

4). Dokumen jaminan
Pengelolaan dokumen merupakan salah

There were several things implemented in the contingency plan, namely the work from home policy, limitation/reduction of working time, as well as shifting for certain levels of work.

Furthermore, the Company also developed and applied health protocols according to best practice for Covid-19, such as measuring employees' body temperatures, providing soap, hand sanitizers, masks, support of drugs or vitamins, to spraying disinfectants on a daily basis. Campaigns or socialization were conducted on employees related to the Covid-19 pandemic such as the methods of spreading, the methods of prevention, etc.

2). Improvement in the process of procurement of goods and services and vendor management

Vendor management procedures were also standardized in order that the selection and acceptance of vendors were more in line with standard criteria acceptable to the Company, and that periodic monitoring and evaluation were conducted to all vendors.

Improvements to the process of goods and services, among others through evaluation and updating of the authority of officials who could approve procurement of goods and services, improvement of processes and methods of goods and services procurement, as well as adjustment of duties and responsibilities in accordance with changes in the applicable organizational structure.

3). *Dual control* by utilizing the system

Debtors' data inputted into the Company's system were very important, because they would have impacts on decision making and reporting both internally and externally. Therefore, to ensure the suitability of debtors' data inputted into the system with supporting documents, when checking contract documents, the Company would recheck them by printing the control sheets (LK) from the system.

4). Guarantee document
Document management is one of the

satu proses dokumentasi yang memegang peranan penting dalam pembiayaan. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan diatur bahwa Perusahaan Pembiayaan wajib memiliki pedoman tertulis dalam melakukan penyimpanan dan pemeliharaan bukti kepemilikan atas agunan.

Pengelolaan dokumen jaminan telah distandarisasi dan dilengkapi dengan pedoman tertulis, melingkupi tata cara penerimaan, penyimpanan, hingga pengeluaran dokumen jaminan.

5). Pengelolaan Atribut Perseroan

Atribut Perseroan yang dimaksud adalah logo, tulisan, lambang atau tanda lainnya dari sebuah perusahaan yang merupakan simbol untuk memberi penjelasan tentang citra dari perusahaan, yang lebih dikenal dengan sebutan *branding* atau *corporate identity*.

Jika terjadi penyalahgunaan dari atribut Perseroan akan berakibat fatal bagi reputasi Perseroan, sehingga untuk menghindari hal tersebut pengelolaannya harus distandarisasi dan dikontrol.

6). Penyimpanan (Custodian) Dokumen Pembiayaan

Seluruh dokumen pembiayaan yang muncul selama Perseroan berhubungan dengan debitur/konsumen, mulai dari pengajuan dari debitur, analisa, persetujuan, pencairan, hingga pemantauan merupakan dokumen penting harus didokumentasikan secara tertib dan teratur.

Oleh karena itu, selain penyimpanan dokumen secara fisik, diperlukan penyimpanan secara digital. Untuk itu, Perseroan membuat document management system untuk menyimpan dokumen pembiayaan secara digital.

Risiko Pasar

- f. Strategi dan kebijakan bisnis terkait penyaluran pembiayaan dan perolehan pendanaan yang sensitif terhadap risiko pasar, termasuk suku bunga dan valuta asing tergolong berisiko rendah. Hal ini disebabkan Perseroan tidak memiliki piutang pembiayaan dengan suku bunga mengambang (floating), tidak memiliki pembiayaan dengan suku bunga mengambang (floating), tidak memiliki pinjaman dengan

documentation processes playing an important role in financing. The Financial Services Authority Regulation (POJK) No.35/POJK.05/2018 on Implementation of Financing Companies' Businesses stipulates that Financing Companies shall have written guidelines for keeping and maintaining proofs of collateral ownership.

The management of guarantee documents has been standardized and is complete with written guidelines, covering procedures for receiving, keeping, to issuing guarantee documents.

5). Management of Company's Attributes

The Company's attributes in question are logos, writings, symbols or other signs of a company which are symbols to give explanation of the company's image, which is better known as branding or corporate identity.

In case of misuse of the Company's attributes, it will be fatal for the Company's reputation, so to avoid this, their management must be standardized and controlled.

6). Keeping (Custodian of) Financing Documents

All financing documents produced during the Company's dealings with debtors/consumers, from submissions from debtors, analysis, approval, disbursement, to monitoring are important documents that must be documented in an orderly and regular manner.

Therefore, besides physical keeping of documents, digital keeping is required.

For that purpose, the Company has created a document management system to keep financing documents digitally.

f. Market Risk

Business strategies and policies related to financing distribution and funding acquirement that are sensitive to market risk, including interest rate and foreign exchange are classified as low risk. This is because the Company has no financing receivables with floating interest rate, no financing with floating interest rate, no loans with floating interest rate, and no securities issued with floating interest rate.

suku bunga mengambang (floating), dan tidak memiliki surat berharga yang diterbitkan dengan suku bunga mengambang (floating).

Selain itu, Perseroan tidak memiliki pinjaman dalam valuta asing, tidak memiliki surat berharga yang diterbitkan pembiayaan dalam valuta asing, dan tidak memiliki liabilitas dalam valuta asing.

g. Risiko Hukum

Manajemen risiko hukum dikelola oleh Legal Corporate di bawah pengawasan aktif Direktur Utama. Selain itu, dalam kegiatan operasional Perseroan, didukung oleh Unit Legal Operation untuk memastikan kelengkapan aspek legalitas dalam proses operasional pembiayaan.

Dalam pengelolaan risiko hukum, Legal Corporate bekerja sama dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko dalam melakukan penilaian dan pemantauan implementasi Manajemen Risiko Hukum secara berkala.

Proses pengendalian risiko hukum digunakan terutama terhadap kegiatan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Perseroan. Proses pengendalian Risiko Hukum, dilakukan antara lain dengan:

- 1). Melakukan penilaian/assessment terhadap aspek legalitas dalam hal terdapat produk baru dan/atau aktivitas baru atau terdapat penambahan/perubahan fitur atas produk Pembiayaan.
- 2). Memberikan nasehat hukum dan/atau pendampingan hukum dalam hal terdapat risiko hukum dalam aktivitas operasionalnya.

- 3). Melakukan kaji ulang berkala terhadap format standar perjanjian dan dokumen-dokumen pendukungnya, khususnya perjanjian pembiayaan, guna memastikan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan serta ketentuan lain yang

berlaku.

h. Risiko Kepatuhan

Sebagai upaya memitigasi terjaidnya risiko kepatuhan, Perseroan telah melakukan beberapa program kepatuhan sebagai berikut:

- 1). Monitoring terkait pemenuhan kewajiban atas regulasi baru dan me-reminder kewajiban regulasi kepada Unit Kerja terkait.

- 2). Compliance Review terhadap rancangan produk dan aktivitas baru.

- 3). Melakukan kajian kepatuhan terhadap rancangan produk dan aktivitas baru.

- 4). Melakukan kajian kepatuhan terhadap rancangan regulasi internal.

Besides, the Company has no loans in foreign currencies, no securities issued by financing in foreign currencies, and no liabilities in foreign currencies.

g. Legal Risk

Legal risk management is administered by Legal Corporate under the President Director's active supervision. Furthermore, in the Company's operational activities, it is supported by the Legal Operations Unit to ensure the completeness of legal aspects in the financing operational process.

In managing legal risk, Legal Corporate cooperates with the Risk Management Work Unit in assessing and monitoring the implementation of Legal Risk Management periodically.

The legal risk control process is used primarily for activities that may endanger the Company's business continuity. The Legal Risk control process is carried out, among others by:

- 1). Conducting assessment on the legality aspect in case of new products and/or new activities or additions/changes to features of Financing products.

- 2). Providing legal advice and/or legal assistance in case of any legal risks in its operational activities.

- 3). Conducting periodic reviews of the standard format of the agreements and supporting documents, especially financing agreements, to ensure compliance with the legislation and other applicable provisions.

h. Compliance Risk

As an effort mitigating the occurrence of compliance risk, the Company has carried out several compliance programs as follows:

- 1). Monitoring related to fulfillment of obligations under new regulations and reminding the relevant Work Units of regulatory obligations.

- 2). Compliance Review on new product designs and activities.

- 3). Conducting study on compliance with new product designs and activities.

- 4). Conducting study on compliance with draft internal regulations.

5). Melakukan kajian terhadap regulasi eksternal terbaru maupun perubahan regulasi eksternal, untuk memastikan kepatuhan dan tindak lanjut yang diperlukan oleh Perseroan agar patuh

terhadap regulasi eksternal tersebut.

6). Peningkatan kompetensi dan pengetahuan, baik kepada personil Satuan Kerja Kepatuhan maupun unit kerja lain yang terkait dengan penegakkan kepatuhan di Perseroan, melalui sosialisasi regulasi eksternal, pelatihan/sertifikasi, dan sebagainya.

7). Monitoring kepatuhan terhadap indikator-indikator keuangan yang telah ditetapkan batas atau standar oleh regulator.

Hasil Penilaian Profil Risiko Tahun 2020

6. Secara keseluruhan, berdasarkan hasil penilaian sendiri (*self-assessment*), Tingkat Kesehatan Perseroan Per 31 Desember 2020 berada pada Peringkat 2 (Sehat).

Peringkat profil risiko tersebut merupakan hasil penilaian dari risiko inheren dinilai pada peringkat 2 (Sedang Rendah) dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) berada pada peringkat 2 (Agak Kuat). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun masih terdapat kelemahan, namun Perseroan dapat mengatasi kelemahan tersebut pada bisnis dengan aktivitas normal.

5). Conducting study on the latest external regulations and changes of external regulations to ensure compliance and follow-ups required by the Company in order to comply with those external regulations.

6). Improving competence and knowledge, both to the Compliance Unit and other work units personnel related to enforcement of compliance in the Company, by socialization of external regulations, training/certification, and so on.

7). Monitoring compliance with financial indicators which limits or standards have been set by the regulator.

6. Results of Risk Profile Assessment of 2020

Overall, based on the result of self-assessment, the Company's Health Level as of December 31, 2020 was rated at 2 (Solvent).

The risk profile rating was the result of assessment of inherent risk rated at 2 (Medium Low) and the Quality of Risk Management Implementation (KPMR) is rated at 2 (Slightly Strong). This indicates that despite the existing weaknesses, the Company was able to overcome these weaknesses in business by normal activities.



TATA KELOLA
PERUSAHAAN

06

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Corporate Governance

1. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

a. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

- 1). Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Perusahaan.
- 2). Direksi bertanggung jawab untuk menetapkan arah strategis jangka pendek dan jangka panjang serta prioritas Perusahaan.
- 3). Direksi wajib:
 - Memimpin dan mengurus Perusahaan sesuai dengan tujuan Perusahaan.
 - Mengelola Perusahaan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan perundang-undangan peraturan yang berlaku.
 - Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
 - Menguasai, memelihara, dan mengurus kekayaan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan.
 - Menciptakan struktur pengendalian internal, menjamin terselenggaranya fungsi audit internal Perusahaan dalam setiap tingkatan manajemen.
 - Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi audit internal Perusahaan, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan hasil pengawasan otoritas lainnya.
 - Dengan konsisten melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
 - Mempertimbangkan risiko usaha dalam setiap pengambilan keputusan.
 - Membangun dan mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Perusahaan.
- 4). Direksi wajib memelihara hubungan yang sehat dan terbuka dengan Dewan Komisaris dan mendukung Dewan

1. JOBS AND RESPONSIBILITIES

a. Jobs and Responsibilities of the Board of Directors

- 1). The Board of Directors is fully responsible for the implementation of the Company's management.
- 2). The Board of Directors is responsible for specifying the short-term and long-term strategic directions and priorities of the Company.
- 3). The Board of Directors is required to:
 - Lead and manage the Company in accordance with the Company's objectives.
 - Manage the Company in accordance with its authorities and responsibilities as stipulated in the Articles of Association and the applicable laws and regulations.
 - Each member of the Board of Directors shall in good faith and with full responsibility carry out their duties by observing the applicable legislation.
 - Organize annual General Meeting of Shareholders (GMS) and other GMS as stipulated in the legislation and the Articles of Association.
 - Control, maintain, and manage the Company's assets for the Company's benefit.
 - Create an internal control structure, ensure the implementation of the Company's internal audit function at every management level.
 - Follow up on audit findings and recommendations of the Company's internal audit, external auditors, the results of the Financial Services Authority's (OJK) supervision, and the results of other authorities' supervision.
 - Consistently carry out Good Corporate Governance principles in every business activity at all levels or stages of the organization.
 - Consider business risks in each decision making.
 - Build and materialize the implementation of compliance culture at all levels of the Company's business organization and activities.
- 4). The Board of Directors shall maintain a healthy and open relation with the Board of Commissioners and support the Board

Komisaris dalam menjalankan perannya sebagai organ pengawas.

5). Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.

6). Dalam rangka pelaksanaan tugasnya, Direksi dapat membentuk komite sesuai kebutuhan Perusahaan.

7). Mekanisme kerja dari para anggota Direksi Perusahaan dibagi berdasarkan *job description* masing-masing.

b. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

1). Dewan Komisaris melakukan tugas pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perusahaan maupun usaha Perusahaan, dan memberi nasihat kepada Direksi.

2). Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi.

3). Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perusahaan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.

4). Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan Komisaris atau lebih, tanggung jawab berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris.

5). Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian Perusahaan apabila dapat membuktikan:

- Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan;

- Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan

- Telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau

of Commissioners in undertaking its role as a supervisory organ.

5). The Board of Directors shall provide accurate, relevant, and timely data and information to the Board of Commissioners.

6). In order to carry out their duties, the Board of Directors may establish a committee according to the Company's needs.

7). The work mechanism of members of the Company's Board of Directors is distributed based on their respective job descriptions.

b. Jobs and Responsibilities of the Board of Commissioners

1). The Board of Commissioners performs the supervisory job on management policies, the course of management in general, both on the Company and the Company's business, and gives advice to the Board of Directors.

2). Each member of the Board of Commissioners shall in good faith, with prudence and responsibility, perform the supervisory job and give advice to the Board of Directors.

3). Each member of the Board of Commissioners shall be personally responsible for the Company's loss if the person concerned is at fault or negligent in performing his jobs.

4). If the Board of Commissioners consists of 2 (two) or more members of the Board of Commissioners, the responsibility shall apply jointly and severally to each member of the Board of Commissioners.

5). Members of the Board of Commissioners may not be held responsible for the Company's losses if they can prove:

- Having conducted supervision in good faith and prudence for the Company's interest and in accordance with the Company's purposes and objectives;

- Having no personal interest, either directly or indirectly, in the Board of Directors' management actions resulting in losses; and

- Having given advice to the Board of Directors to prevent the occurrence

berlanjutnya kerugian tersebut.

6). Pengawasan dan pemberian nasihat dilakukan untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak.

7). Menyusun laporan kegiatan Dewan Komisaris yang merupakan bagian dari laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

8). Memantau efektivitas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik.

9). Komisaris Independen mempunyai tugas pokok melakukan fungsi pengawasan untuk menyuarakan kepentingan Debitur, Kreditor, dan Pemangku Kepentingan lainnya.

c. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

1). Dewan Pengawas Syariah mempunyai tugas dan wewenang untuk memberikan nasihat dan saran kepada Direksi dan mengawasi aspek syariah kegiatan operasional pembiayaan syariah, antara lain Akad Pembiayaan Syariah dan praktik pemasaran pembiayaan syariah.

2). Pengawasan terhadap pembentukan produk pembiayaan dengan berdasarkan prinsip syariah.

3). Menganalisis laporan yang disampaikan oleh dan/atau yang diminta dari Direksi untuk mengetahui kualitas pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah atas - kegiatan pembiayaan.

4). Melakukan *review*, menilai dan mengevaluasi pemenuhan kegiatan pembiayaan dengan prinsip syariah secara berkala atas transaksi-transaksi keuangan, termasuk kebijakan dan *Standard Operating Procedure* (SOP) Perusahaan untuk memastikan kesesuaian antara ketentuan syariah dengan pelaksanaan dan praktek di lapangan.

5). Memberikan masukan dan nasihat serta rekomendasi atas rencana bisnis pembiayaan dengan prinsip syariah di dalam rapat DPS.

6). Mengawasi proses pengembangan produk baru kegiatan pembiayaan dengan prinsip syariah sejak awal sampai

or continuation of such losses.

6). The supervision and giving of advice are conducted in the Company's interest and in accordance with the Company's purposes and objectives and to maintain a balance of interests of all parties.

7). Preparing reports on the activities of the Board of Commissioners as a part of the report on implementation of Good Corporate Governance.

8). Monitoring the effectiveness of implementation of Good Corporate Governance.

9). The Independent Commissioners shall have the main job of carrying out the supervisory function to voice the interests of Debtors, Creditors and other Stakeholders.

c. Jobs and Responsibilities of the Sharia Supervisory Board

1). The Sharia Supervisory Board has the job and authority to give advice and suggestions to the Board of Directors and supervise the sharia aspects of sharia financing operational activities, namely Sharia Financing Contracts and sharia financing marketing practices.

2). Supervision of the establishment of financing products based on sharia principles.

3). Analyzing the reports submitted by and/or requested from the Board of Directors to identify the quality of implementation of sharia principles compliance on financing activities.

4). Reviewing, assessing and evaluating the fulfillment of financing activities by sharia principles periodically on financial transactions, including the Company's policies and Standard Operating Procedures (SOPs) to ensure conformity between sharia provisions and the field implementation and practice.

5). Giving input and advice as well as recommendations on financing business plans by sharia principles in DPS' (Sharia Supervisory Board's) meetings.

6). Supervising the process of new products development for financing activities by sharia principles from the beginning until

dengan diluncurkan.

- 7). Memberikan opini syariah dan persetujuan terhadap seluruh produk baru, kebijakan, SOP, akad-akad, sistem pencatatan (akuntansi) dan transaksi-transaksi syariah.
- 8). Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional atas produk-produk baru pembiayaan dengan prinsip syariah yang belum ada fatwanya.
- 9). Memberi nasihat dan saran kepada manajemen Perusahaan dalam rangka perbaikan, pemenuhan prinsip syariah secara tepat dan konsisten, serta mendorong pengembangan dan pertumbuhan serta kinerja kegiatan pembiayaan syariah.
- 10). Mengadakan rapat rutin DPS.
- 11). Menghadiri rapat-rapat Direksi dan Komisaris apabila dipandang perlu.
- 12). Memeriksa dan meminta keterangan, informasi, penjelasan dan data pendukung dari pejabat Perusahaan yang berwenang mengenai tujuan, karakteristik, kebijakan, SOP dan akad-akad yang digunakan pada produk-produk dan aktivitas keuangan pembiayaan dengan prinsip syariah.
- 13). Melakukan *review* dan menyetujui seluruh kebijakan, sistem, SOP, produk yang terkait dengan prinsip syariah dan akad yang dikeluarkan oleh Perusahaan.
- 14). Dewan Pengawas Syariah wajib menyusun tata tertib kerja Dewan Pengawas Syariah.
- 15). Anggota Dewan Pengawas Syariah berhak memperoleh informasi dari Direksi secara lengkap dan tepat waktu.

RANGKAP JABATAN

2. Definisi rangkap jabatan mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 30/POJK.05/2014 perihal Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan.

Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Perusahaan tidak memiliki rangkap jabatan di luar yang diperkenankan oleh peraturan yang berlaku dan dapat menimbulkan benturan kepentingan yang dilarang oleh peraturan perundangan.

launching.

- 7). Giving sharia opinion and approval on all new products, policies, SOPs, contracts, recording (accounting) systems and sharia transactions.
- 8). Requesting a fatwa from the National Sharia Council on new financing products by sharia principles having no fatwa yet.
- 9). Giving advice and suggestions to the Company's management in the context of improvement, compliance with sharia principles appropriately and consistently, and encouraging the development and growth and performance of sharia financing activities.
- 10). Holding regular DPS meetings.
- 11). Attending meetings of the Board of Directors and Commissioners if deemed necessary.
- 12). Examining and asking for statements, information, explanations and supporting data from the Company's authorized officials regarding the objectives, characteristics, policies, SOPs and contracts used in financing financial products and activities by sharia principles.
- 13). Reviewing and approving all policies, systems, SOPs, products related to sharia principles and contracts issued by the Company.
- 14). The Sharia Supervisory Board shall be required to draw up the work rules of the Sharia Supervisory Board.
- 15). Members of the Sharia Supervisory Board shall be entitled to obtain complete and timely information from the Board of Directors.

CONCURRENT POSITIONS

2. The definition of concurrent positions refers to the Financial Services Authority Regulation (POJK) No.30/POJK.05/2014 on Good Corporate Governance for Financing Companies.

Members of the Company's Board of Directors, Board of Commissioners, and Sharia Supervisory Board shall have no concurrent positions other than those permitted by applicable regulations and which may cause conflict of interest prohibited by the legislation.

TATA KELOLA PERUSAHAAN
Corporate Governance

a. **Rangkap Jabatan Direksi / Concurrent positions of Board of Directors**

No	Nama	Posisi di perusahaan	Posisi di perusahaan lain	Nama Perusahaan Lain yang Dimaksud	Bidang usaha
No	Name	Position in Company	Position in Other Company	Name of Other Company Referred to	Business Line
1.	Paulus Cholot N/A/N/A President Director	Direktur Utama			N/A
2.	N/A/N/A Yushandi Liauw Director	Direktur			N/A
3.	N/A/N/A Henri Gunawan Director	Direktur			N/A

b. **Rangkap Jabatan Dewan Komisaris / Concurrent Positions of Board of Commissioners**

No	Nama	Posisi di perusahaan	Posisi di perusahaan lain	Nama Perusahaan Lain yang Dimaksud	Bidang usaha
No	Name	Position in Company	Position in Other Company	Name of Other Company Referred to	Business Line
1.	Wito Mailoa	Komisaris Utama President Commissioner	N/A	N/A	N/A
2.	Erdie S. Manan	Komisaris Independen Independent Commissioner	N/A	N/A	N/A

c. Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah / Concurrent Positions of Sharia Supervisory Board

No No	Nama Name	Posisi di perusahaan Position in Company	Posisi di perusahaan lain Position in Other Company	Nama Perusahaan Lain yang Dimaksud Name of Other Company Referred to	Bidang usaha Business Line
1.	Muhamad Nadratuazzaman Hosen	Ketua Dewan Pengawas Syariah Chairman of Sharia Supervisory Board	Dewan Pengawas Syariah Sharia Supervisory Board	PT. Wahana Ottomitra Multiartha Tbk	Pembiayaan Financing
			Dewan Pengawas Syariah Sharia Supervisory Board	PT Treasure Fund Investama	Investasi Investment
			Dewan Pengawas Syariah Sharia Supervisory Board	PT GAP Capital	Investasi Investment
2.	Jaenal Effendi	Anggota Dewan Pengawas Syariah Member of Sharia Supervisory Board	Dewan Pengawas Syariah Sharia Supervisory Board	PT Tifa Finance Tbk	Pembiayaan Financing
			Dewan Pengawas Syariah Sharia Supervisory Board	PT Reindo Syariah	Asuransi Insurance
			Dewan Pengawas Syariah Sharia Supervisory Board	PT. Manulife	Asuransi Insurance

3. PELATIHAN/3. TRAINING

a. **Pelatihan/Workshop/Seminar/Pembicara Direksi** *Training/Workshop/Seminar/Speaker of Board of Directors*

No No	Nama Name	Pelatihan / Pembicara Training/Speaker	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer	Tempat Place
1.	Paulus Cholot Janala - Direktur Utama President Director	Seminar Nasional “Arah dan Kebijakan 2020” National Seminar “Directions and Policies of 2020”	20 Februari 2020 February 20, 2020	APPI	Le Meridien Hotel, Jakarta
		Webinar Nasional “Pemulihan Kesehatan Industri Pembiayaan” National Webinar “Financing Industry Health Recovery”	28 Juli 2020 July 28, 2020		
2.	Yusnandi Liauw - Direktur Director	Pembicara/pengajar pada Training of Basic Certification Program Speaker/Instructor in Training of Basic Certification Program	January 21-22, 2020 21 - 22 Januari 2020	APPI	Grand Orchardz Hotel Kemayoran
		Pembicara/pengajar pada Training of Basic Certification Program Speaker/instructor in Training Basic Certification Program	12 - 13 Maret 2020 March 12-13, 2020		
		Pembicara/pengajar pada Training Basic Certification Program Speaker/instructor in Training Basic Certification Program	21 September 2020 September 21, 2020		
3.	Henri Gunawan - Direktur Director	Sertifikasi Ahli Pembiayaan Certification of Financing Expert	28 Juli 2020 July 28, 2020	APPI	Webinar
		Workshop Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Perusahaan Batch 2 Workshop on Sustainable Finance Application for Company, Batch 2	1 Oktober 2020 October 1, 2020		

b. Pelatihan/Workshop/Seminar Dewan Komisaris / Training/Workshop/Seminar of Board of Commissioners

No No	Nama Name	Pelatihan/Pembicara Training/Speaker	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer	Tempat Place
1.	Wito Mailoa – Komisaris Utama	Seminar “Tantangan Industri Perasuransian dalam Mempersiapkan SDM Unggul Berbasis Karakter” Seminar “Challenges of Insurance Industry in Preparing Character-Based Superior HR”	24 Februari 2020 February 24, 2020	Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia	Jakarta
		Seminar Nasional “Arah dan Kebijakan 2020” National Seminar “Directions and Policies of 2020”	1 Oktober 2020 October 1, 2020	APPI	Webinar
2.	Erdie S. Manan – Komisaris Independen	Seminar Nasional “Arah dan Kebijakan 2020” Seminar Nasional “Arah dan Kebijakan 2020”	20 Februari 2020 February 20, 2020	APPI	Le Meridien Hotel, Jakarta

c. Pelatihan/Workshop/Seminar Dewan Pengawas Syariah / Training/Workshop/Seminar of Sharia Supervisory Board

No No	Nama Name	Pelatihan / Pembicara Training/Speaker	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer	Tempat Place
		Sosialisasi Ta’limat DSN-MUI No. U-209/DSN-MUI/V/2020 terkait Akad Hibah Mu’allaqah bi al-Syarth dan Batasan Ujrah pada Produk Asuransi Non-PAYDI Socialization of Ta’limat DSN-MUI No.U-209/DSN-MUI/V/2020 related to Mu’allaqah bi al-Syarth Grant Contract and Ujrah Limitation in Non-PAYDI Insurance Products	14 Mei 2020	DSN-MUI	Jakarta
1.	Muhamad Nad-ratuzzaman Hosen – Ketua DPS Chairman of DPS	International Webinar Series The 7th Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2020 “Exploring Innovation in Islamic Bank: Pros & Cons of Tawwaruq and Other Possible Alternatives” International Webinar The 7th Series of Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2020 “Exploring Innovation in Islamic Banks: Pros & Cons of Tawwaruq and Other Possible Alternatives”	9 September 2020	IAEI	Webinar

No No	Nama Name	Pelatihan / Pembicara Training / Speaker	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer	Tempat Place
2.	Jaenal Effendi — Anggota DPS Member of DPS	4th Annual International Conference on Social Science (AICSS 2020) 4th Annual International Conference on Social Science (AICSS 2020)	10-11 September 2020	Yildiz University	Webinar
		12th International Conference on Islamic Economics & Finance 12th International Conference on Islamic Economics & Finance	14-20 Juni 2020	IZU	Webinar

4. PELAKSANAAN KEGIATAN DAN REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

- a. Pelaksanaan Kegiatan dan Rekomendasi Dewan Komisaris
Pelaksanaan tugas Dewan Komisaris selama tahun 2020, antara lain meliputi:
- 1). Mengawasi tugas dan tanggung jawab dari masing-masing Direksi dan memberikan nasihat kepada Direksi dilakukan baik secara formal dalam Rapat, maupun secara informal. Rapat formal mencakup:
 - Rapat Komite di bawah pengawasan Dewan Komisaris, yang terdiri dari Rapat Komite Audit, Rapat Komite Pemantau Risiko, Rapat Komite Tata Kelola, dan Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi.
 - Rapat Dewan Komisaris bersama dengan Direksi.
 - 2). Menetapkan *Risk Appetite Statement (RAS) & Risk Tolerance* Tahun 2020 bersama dengan Direksi, serta mengawasi perkembangan dan tingkat eksposur risiko.
 - 3). Melakukan pengawasan atas tindak lanjut Direksi atas hasil temuan Auditor Internal dan Eksternal, serta memastikan bahwa seluruh temuan telah diselesaikan dengan baik sesuai tenggat waktu yang ditetapkan.
 - 4). Memberikan saran dan pendapat atas keputusan Direksi terhadap

4. IMPLEMENTATION OF ACTIVITIES AND RECOMMENDATIONS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND SHARIA SUPERVISORY BOARD

- a. Implementation of Activities and Recommendations of the Board of Commissioners
The jobs of the Board of Commissioners implemented during 2020 were namely:
- 1). Supervising the duties and responsibilities of each member of the Board of Directors and giving advice to the Board of Directors, conducted both formally in Meetings, or informally. Formal meetings include:
 - Committee's meetings under the Board of Commissioners' supervision, consisting of Audit Committee's Meetings, Risk Monitoring Committee's Meetings, Governance Committee's Meetings, and Remuneration and Nomination Committee's Meetings.
 - Meetings of the Board of Commissioners together with the Board of Directors.
 - 2). Specifying the Risk Appetite Statement (RAS) & Risk Tolerance Of 2020 together with the Board of Directors, and monitoring the development and level of risk exposure.
 - 3). Supervising the Board of Directors' follow-up on the findings of Internal and External Auditors, and ensuring that all findings have been properly resolved according to the specified deadline.
 - 4). Giving advice and opinion on the

pemberian fasilitas Pembiayaan di atas jumlah tertentu yang wajib memperoleh opini dari Komisaris, sebagai salah satu bentuk pengawasan dan pemastian prinsip kehati-hatian.

5). Melakukan pengawasan terhadap kewenangan dan limit, antara lain untuk Komite Pembiayaan dan Komite Penjualan Aset sehingga dilakukan secara berjenjang dan menerapkan prinsip kehati-hatian.

6). Memberikan arahan, memantau penyusunan, serta memberikan persetujuan atas usulan Rencana Bisnis Tahun 2021.

7). Melakukan *review* atas pelaksanaan audit yang dilakukan KAP atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2019.

8). Mengawasi pelaksanaan penerapan Anti Pencucian Uang & Pencegahan Penerapan Terorisme.

9). Melakukan pengawasan terhadap Penerapan Tata Kelola, Fungsi Kepatuhan, Fungsi Internal Audit, dan Fungsi Manajemen Risiko pada Perusahaan.

10). Memberikan persetujuan terhadap kebijakan yang akan diberlakukan di Perusahaan dan laporan, antara lain:

Board of Directors' decisions on the providing of Financing facilities above certain amounts required to obtain the Board of Commissioners' opinion, as a kind of monitoring and ensuring the principle of prudence.

5). Supervising the authorities and limits, among others for the Financing Committee and the Asset Sales Committee so that they are carried out in stages and apply the principle of prudence.

6). Giving direction, monitoring the preparation, and giving approval to the proposed Business Plan Of 2021.

7). Reviewing the audit conducted by KAP on the Financial Statement Of Fiscal Year 2019.

8). Supervising the implementation of Anti-Money Laundering & Combating the Financing of Terrorism.

9). Supervising the Implementation of Governance, Compliance Function, Internal Audit Function, and Risk Management Function in the Company.

10). (10) Giving approval on the policies to be applied in the Company and the reports, namely:

No	Perihal	Nomor	Tanggal
No	Re	Number	Date
1.	Kebijakan Risk Appetite & Risk Tolerance Policy of Risk Appetite & Risk Tolerance	008/KBJ-MNCGUI/2020	Januari 2020
2.	Kebijakan APU PPT Policy of AML-CFT	004/KBJ-MNCGUI/2020	27 Maret 2020
3.	Laporan Hasil Penilaian Sendiri atas Penerapan Manajemen Risiko Perusahaan Pembiayaan tahun 2019 Report on Results of Self-Assessment on Risk Management Application to Financing Companies in 2019	044/MNCGUI/CEO-SRT/II/2020	Februari 2020
4.	Laporan Hasil Penilaian Sendiri atas Penerapan Manajemen Risiko Perusahaan Pembiayaan yang Menyelenggarakan Sebagian Usahanya Berdasarkan Prinsip Syariah tahun 2019 Report on Results of Self-Assessment on Risk Management Application to Financing Companies organizing Parts of Their Businesses Based on Sharia Principles of 2019	045/MNCGUI/CEO-SRT/II/2020	Februari 2020
5.	Kebijakan Risk Appetite & Risk Tolerance Policy of Risk Appetite & Risk Tolerance	008/KBJ-MNCGUI/2020	30 Juni 2020
6.	Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Report on Board of Commissioners' Supervision	209/MNCGUI/DIR-SRT/VII/2020	30 Juli 2020

No No	Perihal Re	Nomor Number	Tanggal Date
7.	SK Dewan Komisaris tentang Komite Audit Decision of Board of Commissioners on Audit Committee	01/MNCL/IX/2020	07 September 2020
8.	SK Dewan Komisaris tentang Komite Pemantau Risiko Decision of Board of Commissioners on Risk Monitoring Committee	02/MNCL/IX/2020	07 September 2020
9.	SK Dewan Komisaris tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Decision of Board of Commissioners on Nomination and Remuneration Committee	03/MNCL/IX/2020	07 September 2020
10	SK Dewan Komisaris tentang Komite Tata Kelola Decision of Board of Commissioners on Governance Committee	04/MNCL/IX/2020	07 September 2020
.	Kebijakan Tata Kelola (Ed. 3) Policy of Governance (Ed. 3)	002/KBJ-MNCGUI/2020	1 Oktober 2020
11	Kebijakan Kepatuhan (Ed. 2) Policy of Compliance (Ed. 2)	003/KBJ-MNCGUI/2020	1 Oktober 2020
.	Laporan Rencana Bisnis Tahun 2021 Report on Business Plan of 2021	283/MNCGUI/DIR-SRT/XI/2020	23 November 2020
12	SK Dewan Komisaris tentang Rekomendasi Penunjukkan KAP Decision of Board of Commissioners on Recommendation of KAP Appointment	05/MNCL/IX/2020	07 Desember 2020
13			
b.	<p>Pelaksanaan Kegiatan dan Rekomendasi Dewan Pengawas Syariah Dewan Pengawas Syariah telah secara aktif memberikan nasihat dan saran kepada Direksi, mengawasi aspek syariah kegiatan operasional Unit Usaha Syariah (UUS) di PT MNC Guna Usaha Indonesia, antara lain melalui:</p> <p>(1). Mengadakan rapat rutin DPS (2). Melakukan evaluasi terhadap pemenuhan Prinsip Syariah, antara lain meliputi:</p> <p>a. Kegiatan pendanaan dan pembiayaan Syariah b. Evaluasi prosedur operasional standar c. Praktik pemasaran pembiayaan Syariah yang dilakukan perusahaan d. Penerapan akuntansi.</p> <p>(3). Memberikan masukan dan nasihat serta rekomendasi terkait dengan strategi funding unit usaha syariah. (4). Memberikan masukan dan nasihat serta rekomendasi terkait dengan rencana pengembangan produk pembiayaan Syariah, mencakup skema akad yang sebaiknya digunakan, (5). Memberikan masukan terkait kebutuhan pelatihan atau <i>training</i> bagi tim marketing pembiayaan syariah.</p>	<p>b. Implementation of Activities and Recommendations of Sharia Supervisory Board The Sharia Supervisory Board (DPS) has actively given advice and suggestions to the Board of Directors, supervised the sharia aspects of operational activities of the Sharia Business Unit (UUS) at PT MNC Guna Usaha Indonesia, among others by:</p> <p>(1). Holding regular DPS' meetings. (2). Evaluating the fulfillment of Sharia Principles, namely:</p> <p>a. Activities of Sharia funding and financing b. Evaluation of standard operating procedures c. Sharia financing marketing practices carried out by the company d. Application of accounting.</p> <p>(3). Giving input and advice and recommendation related to the funding strategy of sharia business unit. (4). Giving input and advice and recommendation related to the plans for developing Sharia financing products, including contract schemes that should be used. (5). Giving input regarding the need for training or training for the sharia financing marketing team.</p>	

5. PELAKSANAAN TUGAS KOMISARIS INDEPENDEN

Komisaris Independen akan melaporkan kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender dalam hal ditemukannya:

- pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan; dan/atau
- keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Perusahaan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Komisaris Independen diangkat sebagai Ketua Komite Audit dan Ketua Komite Tata Kelola. Melalui rapat Komite tersebut dan rapat Dewan Komisaris bersama Direksi, Komisaris Independen melakukan pemantauan dan memberikan nasihat, serta rekomendasi kepada Direksi sebagai bahan perbaikan.

Komisaris Independen juga diangkat sebagai anggota Komite Pemantau Risiko, yaitu sebagai pihak independen untuk membantu mengawasi pelaksanaan dan penerapan manajemen risiko di Perusahaan.

5. IMPLEMENTATION OF JOBS OF INDEPENDENT COMMISSIONER

The Independent Commissioner will report to OJK not later than 10 (ten) calendar days in case of finding of:

- violation of legislation in financing sector; and/or
- any situation or predicted situation that may endanger the Company's business continuity.

In performing his jobs, the Independent Commissioner is appointed as Chairman of the Audit Committee and Chairman of the Governance Committee. By the Committees' meeting and the meeting of the Board of Commissioners with the Board of Directors, the Independent Commissioner monitors and gives advice, and recommendation to the Board of Directors for improvement.

The Independent Commissioner is also appointed as a member of the Risk Monitoring Committee, namely as an independent party to help supervise the implementation and application of risk management in the Company.

6. PELAKSANAAN RAPAT DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

- a. Rapat Direksi
Selama tahun 2020, Direksi telah melaksanakan rapat minimal 1 (satu) kali sebulan dengan total rapat sebanyak 12 (dua belas) kali dalam setahun, dengan rekapitulasi sebagai berikut:

6. IMPLEMENTATION OF MEETINGS OF BOARD OF DIRECTORS, BOARD OF COMMISSIONERS, AND SHARIA SUPERVISORY BOARDS

- a. Board of Directors' Meetings
During 2020, the Board of Directors held meetings at least 1x (once) a month with a total of 12 (twelve) meetings a year, by the following recapitulation:

No No	Nama Name	Periode Period	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendees		% Kehadiran % Attendance
				Fisik Media Physic	Means of Electronic Sarana Media Elektronik	
1.	Paulus Cholot Janala	1 Januari 2020 – 31 Desember 2020 1st January 2020 – 31st December 2020	12	12	0	100%
2.	Yusnandi Liauw	1 Januari 2020 – 31 Desember 2020 1st January 2020 – 31st December 2020	12	12	0	100%
3.	Henri Gunawan	22 November 2020 – 31 Desember 2020 22nd November 2020 – 31st December 2020	12	12	0	100%

Adapun hal yang dibahas dalam Rapat Direksi selama tahun 2020 adalah terkait permasalahan dan kegiatan operasional Perusahaan, dengan ringkasan risalah rapat sebagai berikut:

The matters discussed at the Board of Directors' Meetings in 2020 were related to the Company's problems and operational activities, with the summary of meeting minutes as follows:

Bulan Month	Risalah Rapat Meeting Minutes
<p>Januari January</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Progress</i> kerjasama pihak ketiga seperti asuransi kredit dan lainnya. • Pembahasan terkait dengan putusan MK atas UU Fidusia maka agar dikaji sehingga proper pada saat melakukan eksekusi. Selain itu perlu di-<i>review</i> kembali terhadap perjanjian Installment Financing. • Pembahasan mengenai Sustainability Report (SR) untuk keperluan funding maupun pemenuhan persyaratan OJK. Penginputan segmen harus dilakukan dengan tertib, terutama untuk segmen UMKM yang dapat dipergunakan sebagai penerapan SR.
<p>Februari February</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>progress report</i> Pembahasan terkait rencana dan perolehan funding dari perbankan yang akan segera cair. • Pelaksanaan rencana CSR MNC Leasing berupa penanaman 1.000 pohon mangrove di Mangrove Ecotourism Center PIK. • Arahan Direksi agar setiap Jumat, seluruh head agar dapat memberikan summary pekerjaan serta pekerjaan yang telah dilakukan selama 1 (satu) minggu. <p><i>progress</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Discussion related to plans and progress reports on obtaining funding from banks which will soon be disbursed. • Implementation of the plan of CSR MNC Leasing in the form of planting 1,000 mangrove trees at PIK's Mangrove Ecotourism Center. • The Board of Directors' directives that every Friday, all heads are able to provide a summary and progress of the work carried out for 1 (one) week.
<p>Maret March</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan salah satu cost reduction program, yaitu penghentian sementara rekrutmen non sales untuk menjaga BOPO. • <i>Update</i> mengenai pembukaan KSKC JKT 2-5 dan Pontianak sudah selesai dan sudah dilaporkan ke OJK. • Pembahasan mengenai kondisi pandemi COVID-19 sampai saat ini kondisi masih menunggu keputusan resmi dari manajemen, untuk sementara tetap masuk kantor seperti biasa. Dihimbau kepada karyawan agar dapat hidup bersih, mengurangi kontak fisik, hindari keramaian dan perjalanan keluar kota. <ul style="list-style-type: none"> • Discussion on one of the cost reduction programs, namely the temporary discontinuation of non-sales recruitment to maintain BOPO. • The update on the opening of KSKC of JKT 2-5 and Pontianak has been completed and has been reported to OJK. • Discussion on the condition of the COVID-19 pandemic which is still waiting for the management's official decision, for the time being still working in the office as usual. Employees are urged to live clean, reduce physical contact, and avoid crowds and traveling out of town.

Bulan Month	Risalah Rapat Meeting Minutes
	<ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan mengenai kondisi pandemi COVID-19, sudah dilakukan pengumuman di website, pembuatan <i>draft</i> surat permohonan restrukturisasi serta tanggapan kepada nasabah. • Sudah terjadi penurunan kualitas bayar yang mengakibatkan Overdue 11-30 meningkat. Oleh karena itu, akan dilakukan conference call dengan seluruh KSKC untuk memaksimalkan penagihan, termasuk memberdayakan tim sales untuk bantu melakukan penagihan. • Surat masuk dari debitur terkait permohonan restruktur akan segera ditindaklanjuti. Yang paling mengetahui mengenai kondisi debitur adalah rekan-rekan di KSKC, oleh karenanya <i>pre assessment</i> harus dilakukan oleh KSKC. • Terkait pemberian restruktur kepada debitur perlu diingat bahwa <i>history</i> pembayaran yang baik belum tentu terulang kembali, oleh karenanya harus dipastikan bahwa debitur yang diberikan restrukturisasi memang merupakan debitur yang masih memiliki prospek usaha dan mampu melakukan pembayaran kepada MNC Leasing. Akan dilakukan perhitungan <i>stress test cashflow</i> untuk dapat menentukan berapa maksimal debitur • yang dapat kita proses untuk restruktur tanpa MNC Leasing perlu mengajukan restruktur ke pihak perbankan.
<p>April April</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Discussion regarding the condition of the COVID-19 pandemic, announcements made on the website, drafting of restructuring requests and responses to customers. • There was a decline in the payment quality which resulted in an increase in Overdue 11-30. Therefore, a conference call would be held with all KSKCs to maximize billing, including empowering the sales team to help with billing. • Incoming letters from debtors on request for restructuring would be followed up immediately. The ones who knew best about the debtors' conditions were colleagues at KSKC, therefore pre-assessment had to be carried out by KSKC. • Regarding the giving of restructuring to debtors, it should be remembered that a good payment history might not be repeated, therefore it had to be ensured that debtors who were given restructuring were really those who still had business prospects and were able to make payments to MNC Leasing. A cash flow stress test would be conducted to determine the maximum number of debtors we could process for restructuring without requiring MNC Leasing to apply for restructuring to the banking sector.

Bulan Month	Risalah Rapat Meeting Minutes
Mei May	<ul style="list-style-type: none"> Arahan Direksi untuk strategi bisnis 3 (tiga) bulan ke depan, mengingat kondisi pandemi COVID-19 dan beberapa subsidiary grup mengajukan restrukturisasi ke perbankan sehingga hal ini mengakibatkan lebih kecilnya kemungkinan bagi MNC Leasing untuk memperoleh funding dari perbankan. Sampai saat ini perbankan masih melihat parameter angka bukan melihat kondisi pandemi. Saat ini bisnis yang dapat dijalankan adalah dana haji. Oleh karenanya terkait existing man power (BM & AO) akan dipersiapkan KPI sementara yang mana semua difokuskan untuk pembiayaan dana haji dan penagihan. Selama masa pandemi COVID-19, setiap minggu kedua seluruh BM akan ikut bergabung secara online dalam meeting koordinasi agar ter-<i>update</i> dengan kondisi terkini, sehingga informasi yang diterima baik di HO maupun di KSKC sama. Efisiensi di kantor sangat penting untuk dilakukan. Dalam perekrutan karyawan juga harus benar-benar dipertimbangkan yang benar-benar memiliki <i>value</i> terhadap MNC Leasing. Setiap leader harus kuat secara leadership dan harus lead timnya dengan baik. Leader harus memastikan bahwa tim sudah efisien dan melakukan improvement secara berkelanjutan. <ul style="list-style-type: none"> Direction of the Board of Directors for the next 3 (three) months business strategy, considering the COVID-19 pandemic condition and several subsidiary groups requesting for restructuring to banks, causing MNC Leasing less likely to obtain funding from banks. Until now, banks still observe the numerical parameters, instead of the pandemic condition. Currently the business able to undertake is the Hajj fund. Therefore, related to existing manpower (BM & AO) temporary KPIs will be prepared, all of which are focused on financing hajj funds and collection. During the COVID-19 pandemic, every second week all BMs will join in a coordination meeting online to be updated with the latest conditions, so that the information received both at HO and at KSKC is the same. Efficiency in the office is very important to do. Employees recruitment must also really consider those who really have value to MNC Leasing. Each leader must be strong in leadership and must lead his team well. Leaders must ensure that the team is efficient and makes continuous improvement.

Bulan Month	Risalah Rapat Meeting Minutes
	<ul style="list-style-type: none"> • Fokus utama saat ini adalah maintain cash in yang berasal dari angsuran, denda dan asuransi. Sedangkan untuk KSKC saat ini akan fokus mengerjakan dana haji dan juga collection untuk menurunkan NPF. • Untuk bisnis dana haji ini harus di-<i>monitor</i> setiap hari mulai dari aplikasi masuk sampai dengan keluarnya porsi haji. Perlu di-<i>monitor</i> dari mulai aplikasi in sampai proses <i>approval</i>, pembukaan rekening di bank serta proses di Kemenag. • Mengingat dana haji ini bisnis baru agar dilakukan sosialisasi berkala untuk refreshment kepada rekan-rekan di KSKC agar pemahaman mereka semakin baik. • Simplifikasi akad pembiayaan dana haji sudah dilakukan dan selanjutnya akan disosialisasikan oleh tim terkait. • Terkait dengan penerapan program Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT), agar diperhatikan pengkinian data nasabah agar optimal sesuai rencana yang telah disampaikan kepada OJK.
<p>Juni June</p>	<ul style="list-style-type: none"> • The main focus at this time is maintaining cash in originated from installments, penalties and insurance. Meanwhile, KSKC will now focus on working on hajj funds and the collections to reduce NPF. • This Hajj fund business must be monitored every day starting from the incoming application to the outgoing Hajj portion. It should be monitored starting from the application to the approval process, account opening in bank and process in the Ministry of Religion. • Since this Hajj fund is a new business, periodic socialization for refreshment should be carried out to colleagues at KSKC so that they will have better understanding. • Simplification of the Hajj fund financing agreement has been conducted and then will be socialized by the related team. • Regarding the implementation of the Anti-Money Laundering & Combating the Financing of Terrorism (APU & PPT) program, it should be noted that the progress of customer data updating is optimal according to the plan submitted to OJK.
	<ul style="list-style-type: none"> • Beberapa Bank lebih berminat memberikan fasilitas untuk pembiayaan alat kesehatan. Tim alat kesehatan dan produk agar dapat mencari irisan antara supplier rekanan dengan rumah sakit sehingga bisa digarap keduanya. • Perlu dilakukannya koordinasi dengan tim UUS terkait sosialisasi berkala kepada Kantor Selain Kantor Cabang (“KSKC”) terkait proses pembiayaan dana haji. • Presentasi mengenai proses transformasi digital di MNC Leasing. • Manajemen data perlu diperbaiki dan ditingkatkan kualitasnya, karena data yang valid akan sangat penting dalam melakukan analisa serta pengambilan keputusan. Harus dibuat manajemen data yang baik.
<p>Juli July</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Several banks are more interested in providing facilities for financing medical devices. The medical devices and products team should be able to find a wedge between vendor suppliers and hospitals so that both can be worked on. • It is necessary to coordinate with the UUS team regarding periodic socialization to Offices Other than Branch Offices (“KSKC”) regarding the process of financing hajj funds. • Presentation on the digital transformation process at MNC Leasing. • Data management should be improved and the quality enhanced, because valid data will be very important in analyzing and making decisions. Good data management must be made.

Bulan Month	Risalah Rapat Meeting Minutes
	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu adanya penambahan manpower pada Kantor Selain Kantor Cabang (“KSKC”) Banjarmasin dengan tujuan untuk dapat mengembangkan pembiayaan di Kalsel. • Perlu adanya strategi baru untuk penetrasi pasar produk Dana Haji. • Pembukaan seluruh Kantor Selain Kantor Cabang (“KSKC”) Syariah sudah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga pemasaran produk pembiayaan syariah juga dapat dilakukan melalui Kantor Selain Kantor Cabang (“KSKC”) Syariah, tidak hanya melalui Unit Usaha Syariah (UUS). • Perlu dilakukan training/sosialisasi kepada Kantor Selain Kantor Cabang (“KSKC”) mengenai prospek Rumah Sakit/ Supplier dan akses ke e-catalog untuk mendapatkan informasi untuk Alat Kesehatan.
Agustus August	<ul style="list-style-type: none"> • It is necessary to add manpower to the Office Other than Branch Offices (“KSKC”) of Banjarmasin to enable developing financing in South Kalimantan. • A new strategy is required for market penetration of Hajj Fund products. • The opening of all Sharia Offices Other than Branch Offices (“KSKC”) has been reported to the Financial Services Authority (OJK), so that the marketing of sharia financing products can also be carried out through Sharia Offices Other than Branch Offices (“KSKC”), not only through Sharia Business Units (UUS). • It is necessary to conduct training/socialization to Offices Other than Branch Offices (“KSKC”) regarding the prospects of Hospitals/ Suppliers and access to e-catalogs to obtain information for Medical Devices.
September September	<ul style="list-style-type: none"> • Funding agar digunakan sebaik-baiknya karena kondisi sedang sulit. • Perlunya mengingatkan kembali protokol kesehatan bagi seluruh karyawan PT MNC Guna Usaha Indonesia ditengah pandemik Covid 19 ini dan mulai diberlakukan kembali pembatasan untuk jumlah karyawan yang bekerja di kantor sehingga <i>Work From Home</i> kembali diberlakukan. • Perlunya kesiapan Tim HRD untuk melakukan perekrutan manpower yang akan ditempatkan pada tim sales. • Sudah dilakukan training terkait Alat Berat untuk Account officer dan Credit Analyst dengan peserta sebanyak 12 orang. • Funding should be used to the best possible due to the difficult condition. • It is necessary to recall the health protocol for all employees of PT MNC Guna Usaha Indonesia in the midst of this Covid-19 pandemic and to start re-applying the restriction on the number of employees working in the office so that Work From Home is again applied. • It is necessary for the HRD Team to be ready to recruit manpower to be placed in the sales team. • Training on Heavy Equipment for Account officers and Credit Analysts was conducted with 12 participants.
Oktober October	<ul style="list-style-type: none"> • Admin pada setiap Kantor Selain Kantor Cabang saat ini hanya terdapat 1 (satu) orang, oleh karena hal tersebut semakin berkembangnya bisnis MNC GUI, maka perlu untuk dipikirkan penyesuaiannya tersebut. • Untuk Business Manager dan RBM supaya mengejar volume pembiayaan. • Dalam pembuatan Standard Operating Procedure (“SOP”) yang berhubungan dengan keuangan perlu mendapat perhatian khusus agar lebih hati-hati. • Akan diadakan training untuk data mining, dimana digitalisasi fokus pada 3 hal: people, process, technology. • There was currently only 1 (one) administrator in each Office Other than Branch Offices, since the MNC GUI business is growing, it is necessary to think about the adjustment. • Business Managers and RBMs were expected to pursue financing volumes. • Special attention is required in making the Standard Operating Procedure (“SOP”) related to finance and it should be made more carefully. • There will be training for data mining, in which digitization is focused on 3 aspects: people, process, and technology.

Bulan Month	Risalah Rapat Meeting Minutes
November November	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk dapat lebih menjangkau calon debitur lebih banyak, maka proses digitalisasi untuk pembiayaan haji harus dipersiapkan dengan baik, termasuk perbaikan website dan persiapan untuk membuat mobile app. • Terkait dengan pelaksanaan program APU PPT, agar pelatihan APU PPT kepada karyawan pada tahun ini segera diselenggarakan melalui zoom meeting dan dipastikan kelengkapan dokumentasinya. Agar mulai dijajaki kerjasama dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri untuk pemanfaatan akses ke data kependudukan untuk keperluan scoring atau verifikasi di dalam menganalisa debitur. • Data FPD dari periode Jan 2019 s.d Feb 2020 harus dianalisa ulang dan semua Business Manager terkait agar melakukan review dan diskusi bersama RBM dan Credit Analyst dan dipresentasikan kepada BOD untuk dijadikan lesson learn dan agar ke depannya lebih berhati-hati. <ul style="list-style-type: none"> • To be able to reach more prospective debtors, the digitization process for Hajj financing must be well prepared, including website improvement and preparation to create a mobile app. • Regarding the implementation of the AML-CFT program, AML-CFT training for employees this year should be immediately held by zoom meeting and the documentation completeness ensured. • To start exploring cooperation with the Directorate General of Population and Civil Registration, Ministry of Home Affairs to utilize access to population data for scoring or verification purposes in analyzing debtors. • FPD data from the period of Jan 2019 to Feb 2020 should be re-analyzed and all relevant Business Managers should conduct reviews and discussions with RBM and Credit Analysts and present them to BOD to be used as lessons learned and to be more careful in the future.
Desember December	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk dapat lebih menjangkau calon debitur lebih banyak, maka proses digitalisasi untuk pembiayaan haji harus dipersiapkan dengan baik, termasuk perbaikan website dan persiapan untuk membuat mobile app. • Permintaan dokumen tambahan dari OJK setelah audiensi terkait produk pembiayaan porsi haji pada bulan November 2020, agar segera dilengkapi dan dikirim. • Perlu dikaji kembali kebijakan internal mengenai kecukupan protokol kesehatan COVID-19 agar lingkungan kerja dapat tetap terjaga. • Sehubungan dengan akan adanya libur natal dan tahun baru pada akhir bulan, maka proses penagihan dan collection agar diambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memitigasi penundaan atau keterlambatan pembayaran dari debitur. • Sebelum dilakukan rapat kerja (raker) pada bulan Januari 2021 nanti, agar dilakukan terlebih dahulu mini-raker melalui zoom dengan beberapa unit bisnis terkait agar informasi yang disampaikan ke para Business Manager pada rapat kerja nantinya lebih tepat sasaran dan efektif. • Pelaksanaan edukasi literasi keuangan untuk tahun 2020 agar segera dilakukan dan jika memungkinkan untuk berkolaborasi dengan MNC Kapital. <ul style="list-style-type: none"> • To be able to reach more prospective debtors, the digitization process for Hajj financing should be well prepared, including website improvement and preparation to create a mobile app. • The request for additional documents from the OJK after the hearing of financing product for the Hajj portion in November 2020, should be completed and delivered immediately. • It is necessary to review internal policies regarding the adequacy of the COVID-19 health protocol to enable maintaining the work environment. • Since there will be Christmas and New Year holidays at the end of the month, the billing and collection process should take the necessary measures to mitigate postponement or delay in payments from debtors. • Before holding a work meeting in January 2021, a mini work meeting should be first held via zoom with several related business units so that the information related to Business Managers at the work meeting will be more targeted and effective. • The implementation of financial literacy education for 2020 should be carried out immediately and if possible to collaborate with MNC Kapital.

b. Rapat Dewan Komisaris

Selama tahun 2020, Dewan Komisaris melaksanakan rapat sebanyak 4 (empat) kali, dengan rekapitulasi sebagai berikut:

b. Board of Commissioners' Meetings

During 2020, the Board of Commissioners held meetings 4 (four) times, by the following recapitulation:

No	Nama	Periode	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran		% Kehadiran
				Sarana Media Fisik	Sarana Media Elektronik	
No	Name	Period	Number of Meetings	Physic	Means of Electronic Media	% Attendance
1.	Wito Mailoa	1 Januari 2019 – 31 Desember 2019 1st January 2019 - 31st December 2019	4	4	0	100%
2.	Erdie Suriaherdadi Manan	1 Januari 2019 – 31 Desember 2019 1st January 2019 - 31st December 2019	4	4	0	100%

Adapun hal yang dibahas dalam Rapat Dewan Komisaris selama tahun 2020, antara lain:

- Pembahasan mengenai perhitungan indikator risiko dan penetapan threshold, agar disesuaikan dengan regulasi eksternal (OJK).
- Pembahasan terkait kondisi bisnis operating lease.
 - Pembahasan mengenai tindak lanjut temuan audit internal khususnya terkait system dan teknologi.
 - Masukan dan saran dari Dewan Komisaris mengenai penentuan program dan prioritas IT Project di Perseroan.
- Pembahasan mengenai risiko pembiayaan dan tingkat NPF, khususnya semenjak pandemic COVID-19.
 - Pembahasan mengenai pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia seperti pelatihan dan seminar.
 - Pembahasan mengenai cost reduction program untuk efisiensi biaya dalam rangka mengendalikan BOPO dan menjaga tingkat Kesehatan Perseroan.
- Pembahasan mengenai tindak lanjut temuan audit pada credit analyst.
 - Masukan dan saran dari Dewan Komisaris untuk pemantauan regular kolektibilitas atau NPF sekurang-kurangnya setiap minggu, terutama yang memiliki eksposur besar.
 - Masukan dari Dewan Komisaris untuk evaluasi strategi bisnis dan proses

The matters discussed in the Board of Commissioners' Meetings during 2020 were namely:

- Discussion on calculation of risk indicators and threshold setting, to be adjusted to external regulations (OJK).
- Discussion related to operating lease business condition.
 - Discussion on the follow-up of internal audit findings, especially those related to systems and technology.
 - Inputs and suggestions from the Board of Commissioners regarding the designation of IT Project program and priority in the Company.
- Discussion on financing risk and NPF level, especially since the COVID-19 pandemic.
 - Discussion on the implementation of human resource development such as training and seminar.
 - Discussion on the cost reduction program for cost efficiency in order to control BOPO and maintain the Company's Health level.
- Discussion on the follow-up of audit findings in the credit analyst.
 - Inputs and suggestions from the Board of Commissioners for regular monitoring of collectibility or NPF at least every week, especially those with large exposures.
 - Inputs from the Board of Commissioners for evaluation of business strategies and

- pemantauan lebih ketat untuk menghadapi kondisi Pandemic COVID-19 dan era new normal.
- Pembahasan mengenai sertifikasi karyawan sesuai regulasi eksternal.
 - Masukan dan saran dari Dewan Komisaris agar dalam menghadapi kondisi Pandemic COVID-19, perlu benchmarking atau membanding kondisi dengan industri pembiayaan dan perusahaan pembiayaan lain.
 - Masukan dan saran dari Dewan Komisaris agar mengenai kelengkapan materi rapat komite audit agar ditambahkan informasi realisasi terhadap audit plan.
 - Pembahasan terkait dengan pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT), agar pelatihan APU PPT tetap diupayakan untuk dilakukan dengan tetap memperhatikan safe protocol dalam situasi pandemic COVID-19.
 - Pembenahan struktur organisasi pembiayaan untuk mendukung strategi bisnis Perseroan.
 - Pembahasan mengenai kebijakan pemerintah terkait Program Pemulihan Ekonomi Nasional.
 - Pembahasan mengenai penyesuaian strategi bisnis dan diversifikasi produk pembiayaan.
- Rapat Dewan Pengawas Syariah
- c. Selama tahun 2020, Dewan Pengawas Syariah (DPS) telah melaksanakan rapat sebanyak 6 (enam) kali dengan rekapitulasi sebagai berikut:

- stricter monitoring processes to deal with the conditions of COVID-19 Pandemic and the new normal era.
- Discussion on employee certification in accordance with external regulations.
 - Inputs and suggestions from the Board of Commissioners so that in dealing with the COVID-19 Pandemic, it is necessary to benchmark or compare the conditions with financing industry and other financing companies.
 - Inputs and suggestions from the Board of Commissioners regarding the completeness of the audit committee meeting materials so that information on realization of the audit plan is added.
 - Discussion related to the implementation of Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism (AML-CFT) Program, so that the AML-CFT training can still be carried out while still paying attention to safe protocols in the COVID-19 pandemic situation.
 - Fixing the organizational structure of financing to support the Company's business strategy.
 - Discussion on government policies related to the National Economic Recovery Program.
 - Discussion on adjustment of business strategy and diversification of financing products.
- Sharia Supervisory Board's Meetings
- c. During 2020, the Sharia Supervisory Board (DPS) held meetings 6 (six) times, by the following recapitulation:

No No	Nama Name	Periode Period	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendees		% Kehadiran % Attendance
				Fisik Media Physic	Means of Electronic Sarana Media Elektronik	
1.	M. Nadrattuzaman Hosen	1 Januari 2020 – 31 Desember 2020 1st January 2020 - 31st December 2020	6	6	0	100%
2.	Jaenal Effendi	1 Januari 2020 – 31 Desember 2019 1st January 2019 - 31st December 2020	6	6	0	100%

Adapun hal yang dibahas dalam Rapat Dewan Pengawas Syariah selama tahun 2020, antara lain:

- Pembahasan mengenai penggunaan akad untuk pembiayaan Syariah.
 - Pembahasan mengenai persiapan pelaksanaan produk pembiayaan porsi haji, seperti system, asuransi, dan sebagainya.
 - Pembahasan terkait dengan pencatatan atau perlakuan akuntansi terhadap ujarah pada pembiayaan porsi haji.
 - Rencana pembinaan dari DPS terhadap debitur pembiayaan porsi haji secara berkala.
 - Pembahasan mengenai kinerja dan rencana pengembangan unit usaha Syariah (UUS), terutama program pemasaran pembiayaan porsi haji.
 - Update mengenai sosialisasi dan pelatihan produk dan teknis pelaksanaan atas produk pembiayaan porsi haji yang telah dilakukan.
 - Pembahasan mengenai dampak dari pandemic COVID-19 terhadap bisnis Syariah dan strategi atau antisipasi yang dapat dilakukan.
 - Pembahasan terkait pengembangan kerjasama dengan pola kemitraan untuk mengembangkan bisnis pembiayaan porsi haji.
 - Pembahasan mengenai rencana pelaksanaan edukasi syariah bagi masyarakat untuk memudahkan dan mengenalkan keutamaan haji dan fasilitas pembiayaan syariah yang dilakukan.
- pembiayaan syariah yang dilakukan.

The matters discussed in the Sharia Supervisory Board's Meetings during 2020 were namely:

- Discussion on the use of contracts for Sharia financing.
 - Discussion on the preparation of implementation of financing products of the hajj portion, such as system, insurance, etc.
 - Discussion related to the recording or accounting treatment of ujarah in the financing of hajj portion.
 - Development plan from DPS for debtors of periodical financing of hajj portion.
- Discussion on the performance and development plan of Sharia business unit (UUS), especially the marketing program for the hajj portion financing.
- Update on product socialization and training and technical implementation of hajj portion financing products that have been carried out.
- Discussion on the impact of COVID-19 pandemic on Sharia business and the strategies or anticipations that can be carried out.
- Discussion related to the development of cooperation with a partnership scheme to develop the financing business of Hajj portion.
- Discussion of the plan for implementation of sharia education for public to facilitate and introduce the virtues of Hajj and sharia financing facilities carried out.

7. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE AUDIT

- a. Struktur, Keanggotaan, dan Keahlian Komite Audit
Susunan keanggotaan Komite Audit per 31 Desember 2020, adalah sebagai berikut:

7. COMPLETENESS AND IMPLEMENTATION OF JOBS OF AUDIT COMMITTEE

- a. Structure, Membership and Expertise of the Audit Committee
The structure of the Audit Committee membership as of December 31, 2020, is as follows:

No No	Nama Name	Jabatan Position	Profil Profile
1.	Erdie S. Manan	Ketua Chairman	Sesuai profil Komisaris Independen According to the profile of Independent Commissioner
2.	Wito Mailoa	Anggota Member	Sesuai profil Komisaris Utama According to the profile of President Commissioner Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1966. Saat ini berdomisili di Jakarta. Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi - Jurusan Manajemen Perbankan dari STIE Perbanas, Jakarta pada 1989, dan Magister Marketing Management dari Universitas Indonesia pada 1997. Beliau memulai karir sebagai di Citibank dengan posisi terakhir sebagai Telesales Management Head (1990-1997), kemudian berkarir di Standard Chartered Bank dengan posisi terakhir sebagai Head of Sales – SME Banking (1997-2008), lalu di ABN Amro / RBS Indonesia sebagai Head of SME (2008-2010), lalu di ANZ Indonesia dengan posisi terakhir sebagai Head of SME (2010-2011), dan PT PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai General Manager (2011-2015). Bergabung dengan MNC Group melalui PT MNC Guna Usaha Indonesia sebagai Direktur Utama (2015-2018) dan menjadi Direktur Utama PT Bank MNC Internasional Tbk (2017-2018), kemudian diangkat sebagai Direktur PT MNC Kapital Indonesia Tbk sejak tahun 2019. Sejak tanggal 26 Juni 2019, berdasarkan keputusan Dewan Komisaris PT MNC Guna Usaha Indonesia, beliau diangkat sebagai anggota Komite Audit PT MNC Guna Usaha Indonesia.
3.	Ageng Purwanto	Anggota Member	Indonesian citizen, born in 1966. Currently domiciled in Jakarta. He got his Bachelor degree in Economics - Majoring in Banking Management of STIE Perbanas, Jakarta in 1989, and Master in Marketing Management of Indonesia Univ in 1997. He started his career at Citibank with his last position as Telesales Management Head (1990-1997), then had his career at Standard Chartered Bank with the last position as Head of Sales – SME Banking (1997-2008), then at ABN Amro/ RBS Indonesia as Head of SME (2008-2010), then at ANZ Indonesia with the last position as Head of SME (2010-2011), and PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk as General Manager (2011-2015). Joined MNC Group through PT MNC Guna Usaha Indonesia as President Director (2015-2018) and became President Director of PT Bank MNC Internasional Tbk (2017-2018), then appointed as Director of PT MNC Kapital Indonesia Tbk since 2019. Since June 26, 2019, based on the decision of the Board of Commissioners of PT MNC Guna Usaha Indonesia, he was appointed as a member of the Audit Committee of PT MNC Guna Usaha Indonesia.

No No	Nama Name	Jabatan Position	Profil Profile
			<p>Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1971. Saat ini berdomisili di Jakarta. Beliau meraih gelar Bachelor of Arts in Economics dari University of Houston, Houston, Texas, Amerika Serikat pada tahun 1995 dan Master of Arts in Economics dari University of San Francisco, San Francisco, California, Amerika Serikat pada tahun 2000.</p> <p>Beliau memulai karir di Salestar (Amerika Serikat) sebagai Research Analyst (2000-2001), kemudian berkarir di Managed Health Network (Amerika Serikat) sebagai Financial Planning Analyst (2001-2002), lalu di Tridaya Multiartha Sejahtera sebagai Manager Finance and Accounting (2002- 2003), kemudian di PT Colliers International Indonesia sebagai Senior Consultant (2003-2007), di PT Farpoint Prima sebagai Associate Director Finance & Accounting (2007-2011), kemudian di PT Gunung Bara Utama sebagai General Manager Finance & Accounting (2011-2014).</p> <p>Saat ini beliau juga menduduki jabatan sebagai Direktur di PT MNC Kapital Indonesia, Tbk, CFO PT MNC Land Surabaya, CFO PT MNC Land Bali, unit bisnis dari PT MNC Land Tbk., dan sebelumnya menjabat sebagai CFO PT MNC Energy & Natural Resources, unit bisnis dari PT MNC Investama Tbk.</p> <p>Sejak tanggal 7 September 2020, berdasarkan keputusan Dewan Komisaris PT MNC Guna Usaha Indonesia, beliau diangkat sebagai anggota Komite Audit PT MNC Guna Usaha Indonesia.</p>
4.	Darma Widjaja	Anggota Member	<p>Indonesian citizen, born in 1971. Currently domiciled in Jakarta. He got his Bachelor of Arts in Economics from the University of Houston, Houston, Texas, USA in 1995 and Master of Arts in Economics from the University of San Francisco, San Francisco, California, USA in 2000.</p> <p>He started his career at Salestar (United States of America) as Research Analyst (2000-2001), then had his career in Managed Health Network (United States) as Financial Planning Analyst (2001-2002), then at Tridaya Multiartha Sejahtera as Finance and Accounting Manager (2002 -2003), then at PT Colliers International Indonesia as Senior Consultant (2003-2007), at PT Farpoint Prima as Associate Director Finance & Accounting (2007-2011), then at PT Gunung Bara Utama as General Manager of Finance & Accounting (2011- 2014).</p> <p>Currently he also holds the position of Director at PT MNC Kapital Indonesia, Tbk, CFO of PT MNC Land Surabaya, CFO of PT MNC Land Bali, a business unit of PT MNC Land Tbk., and previously served as CFO of PT MNC Energy & Natural Resources, a unit business of PT MNC Investama Tbk.</p> <p>Since September 7, 2020, based on the decision of the Board of Commissioners of PT MNC Guna Usaha Indonesia, he was appointed as a member of the Audit Committee of PT MNC Guna Usaha Indonesia.</p>

- b. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit
Tugas dan tanggung jawab Komite Audit, antara lain sebagai berikut:
- (1). Terkait Laporan atau Informasi Keuangan
Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perusahaan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perusahaan.
 - (2). Terkait Audit Internal
Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh manajemen/Direksi atas temuan auditor internal.
 - (3). Terkait Audit Eksternal
 - Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukkan auditor eksternal yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa.
 - Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan auditor eksternal atas jasa yang diberikannya.
 - (4). Terkait Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal
Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko dan pengendalian internal yang dilakukan oleh manajemen/Direksi.
 - (5). Terkait Peraturan Perundang-undangan
Melakukan penelaahan atas ketaatan Perusahaan terhadap undang-undang dan peraturan yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan.
 - (6). Terkait Pengaduan
 - Menelaah pengaduan yang diterima Perusahaan berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perusahaan.
 - Memantau tindak lanjut pengaduan yang berkaitan dengan Perusahaan.
 - Syarat pengaduan:
 - 1). Disampaikan secara tertulis.
 - 2). Jika pelapor menyebutkan identitasnya, Komite Audit wajib merahasiakan jati diri pelapor.
 - 3). Laporan mengenai
- b. Jobs and Responsibilities of Audit Committee
The duties and responsibilities of the Audit Committee, among others, are as follows:
- (1). Related to Financial Reports or Information
Reviewing the financial information to be issued by the Company to public and/or the authorities, namely, financial statements, projections, and other reports related to the Company's financial information.
 - (2). Related to Internal Audit
Reviewing the implementation of audit by the internal auditor and supervising the implementation of follow-ups by the management/Board of Directors on the internal auditor's findings.
 - (3). Related to External Audit
 - Giving recommendations to the Board of Commissioners regarding the appointment of external auditor based on independence, scope of assignment, and recompensation.
 - Giving an independent opinion in case of difference of opinion between the management and external auditor on the services provided.
 - (4). (Related to Risk Management and Internal Control
Reviewing the implementation of risk management and internal control activities carried out by the management/Board of Directors.
 - (5). Related to Legislation
Reviewing the Company's observance to the legislation related to the Company's activities.
 - (6). Related to Complaints
 - Reviewing the complaints received by the Company related to the Company's accounting and financial reporting processes.
 - Monitoring the follow-up of complaints related to the Company.
 - Conditions of Complaint:
 - 1). Submitted in writing.
 - 2). If the reporter mentions his identity, the Audit Committee shall keep the reporter's identity confidential.
 - 3). Reports on deviations from

penyimpangan standar akuntansi, kelemahan pengendalian internal, kecurangan (*fraud*) serta perilaku manajemen yang tidak terpuji yang dapat mengganggu operasi Perusahaan.

- Dalam menangani pengaduan yang disampaikan oleh pihak ketiga, Komite Audit dapat meminta dilakukan audit investigasi dengan bekerjasama dengan manajemen, Audit Internal atau tenaga ahli dari luar Perusahaan yang independen.

- Komite Audit melaporkan hasil penelaahan kepada Dewan Komisaris dan memantau tindak lanjut hasil penelaahan bila diminta oleh Dewan Komisaris.

(7). Tugas lainnya

- Melaksanakan tugas-tugas pengawasan lain sesuai dengan permintaan Dewan Komisaris.

- Melakukan *review* terhadap Piagam sesuai kebutuhan dan mengusulkan perubahannya kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan.

- Melakukan evaluasi terhadap kinerja Komite Audit dan para anggotanya secara berkala.

- Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan.

Pelaksanaan Rapat Komite Audit

- c. Selama tahun 2020, Komite Audit telah menyelenggarakan 4 (empat) kali Rapat Komite Audit, dengan rincian kehadiran masing-masing anggota, sebagai berikut:

accounting standards, weaknesses in internal control, fraud and inappropriate management behavior that may interfere with the Company's operations.

- In handling complaints submitted by third parties, the Audit Committee may request an investigative audit to be conducted in collaboration with the management, Internal Audit or independent experts from outside the Company.

- The Audit Committee reports the results of review to the Board of Commissioners and monitors the follow-up on the results of review when requested by the Board of Commissioners.

(7). Other jobs

- Performing other supervisory jobs as requested by the Board of Commissioners.

- Reviewing the Charter as required and proposing its amendments to the Board of Commissioners for approval.

- Evaluating the Audit Committee's and its members' performance periodically.

- Keeping the Company's documents, data and information confidential.

- c. Implementation of Audit Committee's Meetings
During 2020, the Audit Committee held 4 (four) times Audit Committee's Meeting, with the details of each member's attendance as follows:

No No	Nama Name	Jabatan Position	Periode Period	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendees	% Kehadiran % Attendance
1.	Erdie S. Manan	Ketua Chairman	1 Januari 2020 s.d 31 Desember 2019 1st January 2020 to 31st December 2019	4	4	100%
2.	Wito Mailoa	Anggota Member	1 Januari 2020 s.d 31 Desember 2020 1st January 2020 to 31st December 2020	4	4	100%
3.	Ageng Purwanto*)	Anggota Member	1 Januari 2020 s.d 31 Desember 2019 1st January 2020 to 31st December 2019	3	2	67%
4.	Darma Widjaja	Anggota Member	7 September 2020 s.d 31 Desember 2020 7st September 2020 to 31st December 2020	1	1	100%
5.	Natalia Purnama	Anggota Member	1 Januari 2020 s.d 31 Desember 2020 1st January 2020 to 31st December 2020	3	2	67%

d. Program Kerja Komite Audit dan Realisasinya

d. Work Programs of Audit Committee and their
Realization

No No	Program Kerja Work Program	Realisasi Realization
1.	Melakukan pemantauan atas Kerja Internal Monitoring the realization of the Internal Audit Plan of 2030. been conducted by the Audit Committee's meeting. This is stated in the minutes of Audit Committee's meeting.	realisasi Rencana Kerja Internal Audit Tahun 2020 melalui rapat Komite Audit. Hal ini tertuang dalam risalah rapat Komite Audit. Telah dilakukan pemantauan atas Rencana Kerja Internal Audit Tahun 2020 melalui rapat Komite Audit. Hal ini tertuang dalam risalah rapat Komite Audit.
2.	Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut Direksi atas temuan internal dan eksternal audit. Hal ini tertuang dalam risalah rapat Komite Audit. Monitoring the implementation of the Board of Directors' follow-up on the internal and external audit findings. the internal and external audit findings through the Audit Committee's meeting. This is stated in the minutes of Au- dit Committee's meeting.	Telah dilakukan pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut untuk perbaikan oleh Direksi atas temuan- temuan audit internal dan eksternal audit melalui rapat Komite Audit.

No No	Program Kerja Work Program	Realisasi Realization
3.	Melakukan evaluasi terhadap Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk terkait dengan Pelaksanaan Audit Laporan Keuangan Tahun 2019. rat No. 167/MNCGUI/CEO-SRT/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020.	Telah dilakukan evaluasi atas KAP dan hasil evaluasi telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat No. 167/MNCGUI/CEO-SRT/VI/2020 dated June 12, 2020.
4.	Membuat rekomendasi penunjukan Kantor Akuntan Publik tahun buku 2020. Kantor Akuntan Publik dan termasuk dalam dokumen yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam Laporan Penunjukkan KAP melalui Surat No. 290/MNCGUI/DIR-SRT/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020.	Telah dilakukan pembuatan rekomendasi penunjukkan Kantor Akuntan Publik dan termasuk dalam dokumen yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam Laporan Penunjukkan KAP melalui Surat No. 290/MNCGUI/DIR-SRT/XII/2020 dated December 17, 2020.
5.	Mengevaluasi hasil pelaksanaan Internal Audit dan rencana tindak lanjut. Komite Audit atas pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh Internal Audit.	Telah dilakukan evaluasi secara berkala melalui rapat dan kecukupan rencana tindak lanjut. Komite Audit atas pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh Internal Audit.

8. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE LAINNYA

- a. Komite Pemantau Risiko
(1). Susunan Keanggotaan
Susunan dan keanggotaan Komite Pemantau Risiko Per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

8. COMPLETENESS AND IMPLEMENTATION OF OTHER COMMITTEES' JOBS

- a. Risk Monitoring Committee
(1). Membership Structure
The structure and membership of the Risk Monitoring Committee as of December 31, 2020 are as follows:

No No	Nama Name	Posisi Position	Profil Profile
1	Erdie S. Manan	Ketua Chairman	Sesuai profil Komisaris Independen As the profile of President Commissioner
.	Wito Mailoa	Anggota Member	Sesuai profil Komisaris Utama As the profile of Independent Commissioner
2	Ageng Purwanto	Anggota Member	Sesuai profil pada Susunan Keanggotaan Komite Audit As the profile of member of Audit Committee
.			
3			
.			

No No	Nama Name	Posisi Position	Profil Profile
		Anggota Member	<p>Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1985. Saat ini berdomisili di Jakarta. Beliau meraih gelar Bachelor of Science (B.Sc.), Mathematics Science (Discrete, Combinatorial and Computational Science) dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Bandung, Jawa Barat pada tahun 2008.</p> <p>Beliau memulai karir di PermataBank dengan posisi terakhir sebagai Senior Wholesale Banking Auditor (2008-2011), kemudian berkarir di Maybank sebagai Corporate Banking Audit Team Leader (2011-2012), lalu di United Overseas Bank Limited (UOB) sebagai Operational Risk Portfolio Manager (2012-2013), kemudian di Maybank sebagai Corporate Banking Audit Manager (2013-2015), di HSBC sebagai Assistant Vice President of Regulatory Compliance Monitoring & Testing (2015-2016), kemudian di PT Visionet Internasional (OVO) dengan jabatan terakhir sebagai Head of Compliance & Risk (2016-2017), lalu di Bluepay Co., Ltd. sebagai Director of Risk, Legal and Compliance (2017-2018), kemudian di PT Veritra Sentosa Internasional (PayTren) sebagai Director & Chief of Risk, Legal, Compliance & Investor Relations Officer (2018-2020), dan di PT Paytren Urun Ekuitas (UrunanYuk.id) sebagai Independent Commissioner (2020-2020).</p> <p>Saat ini, beliau juga menduduki jabatan sebagai Direktur di PT MNC Kapital Indonesia, Tbk, Director di PT ADS Konsultan Internasional (ADS Associates), dan President Commissioner di PT Cipta Abiyasa Nusantara (CAN).</p> <p>Sejak tanggal 7 September 2020, berdasarkan keputusan Dewan Komisaris PT MNC Guna Usaha Indonesia, beliau diangkat sebagai anggota Komite Pemantau Risiko PT MNC Guna Usaha Indonesia.</p> <p>Sejak tanggal 7 September 2020, berdasarkan keputusan Dewan Komisaris PT MNC Guna Usaha Indonesia, beliau diangkat sebagai anggota Komite Pemantau Risiko PT MNC Guna Usaha Indonesia.</p>
4.	Samuel Mulyono		<p>Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1985. Saat ini berdomisili di Jakarta. Beliau meraih gelar Bachelor of Science (B.Sc.), Mathematics Science (Discrete, Combinatorial and Computational Science) dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Bandung, West Java in 2008.</p> <p>He started his career at Permata Bank with the last position as Senior Wholesale Banking Auditor (2008-2011), then had his career at Maybank as Corporate Banking Audit Team Leader (2011-2012), then at United Overseas Bank Limited (UOB) as Operational Risk Portfolio Manager (2012-2013), then at Maybank as Corporate Banking Audit Manager (2013-2015), at HSBC as Assistant Vice President of Regulatory Compliance Monitoring & Testing (2015-2016), then at PT Visionet Internasional (OVO) with the last position as Head of Compliance & Risk (2016-2017), then at Bluepay Co., Ltd. as Director of Risk, Legal and Compliance (2017-2018), then at PT Veritra Sentosa Internasional (PayTren) as Director & Chief of Risk, Legal, Compliance & Investor Relation Officer (2018-2020), and at PT Paytren Urun Ekuitas (UrunanYuk.id) as Independent Commissioner (2020-2020).</p> <p>Today, he also serves as Director at PT MNC Kapital Indonesia, Tbk, Director at PT ADS Consultant International (ADS Associates), and President Commissioner at PT Cipta Abiyasa Nusantara (CAN).</p> <p>Since September 7, 2020, based on decision of the Board of Commissioners of PT MNC Guna Usaha Indonesia, he was appointed as a member of the Risk Monitoring Committee of PT MNC Guna Usaha Indonesia.</p>

(2). Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko sebagaimana diatur dalam Piagam Komite Pemantau Risiko, adalah untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi, dengan memberikan pendapat, saran, maupun rekomendasi yang terkait dengan penerapan manajemen risiko yang efektif, seperti:

- Mengevaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko Perusahaan dan kebijakan manajemen risiko terintegrasi.

- Mengevaluasi kebijakan dan strategi manajemen risiko paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha secara signifikan.

- Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko secara berkala. Evaluasi dilakukan dalam rangka memastikan bahwa Direksi mengelola aktivitas dan risiko secara efektif.

- Melakukan penelaahan serta memberikan pendapat atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris apabila diperlukan terhadap laporan, usulan/permintaan persetujuan atau hal-hal lain terkait dengan risiko yang disampaikan Direksi kepada Dewan Komisaris.

- Melakukan *review* secara komprehensif dan memantau tingkat kesehatan keuangan perusahaan sesuai dengan regulatory parameter serta merekomendasikan langkah-langkah yang diperlukan untuk memelihara atau meningkatkan tingkat kesehatan keuangan.

- Menyetujui kebijakan manajemen risiko termasuk strategi dan kerangka manajemen risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*).

- Memantau kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian, dan sistem informasi manajemen risiko.

(2). Jobs and Responsibilities of Risk Monitoring Committee

The Jobs and responsibilities of the Risk Monitoring Committee as stipulated in the Risk Monitoring Committee Charter, are to assist the Board of Commissioners in carrying out the jobs and responsibilities of supervising and giving advice to the Board of Directors, by giving opinions, suggestions, and recommendations related to the implementation of effective risk management, such as:

- Evaluating the conformity between the Company's risk management policies and integrated risk management policies.

- Evaluating the risk management policies and strategies at least once a year or more frequently in case there are changes in factors significantly affecting the business activities.

- Evaluating the Board of Directors' accountability and giving direction for improvement of the implementation of risk management policies periodically. The evaluation is carried out in order to ensure that the Board of Directors manages the activities and risks effectively.

- Reviewing and giving opinion or recommendation to the Board of Commissioners if necessary on reports, proposals/requests of approval or other matters related to risks submitted by the Board of Directors to the Board of Commissioners.

- Making a comprehensive review and monitoring the level of the company's financial health in accordance with regulatory parameters and recommending the measures required to maintain or improve the level of financial health.

- Approving the risk management policies including risk management strategies and frameworks specified according to the risk level to be taken (*risk appetite*) and risk tolerance.

- Monitoring the adequacy of processes of identification, measuring, monitoring, control, and information system of risk management.

- Setiap anggota Komite wajib menjaga kerahasiaan atas seluruh dokumen dan segala sesuai yang berhubungan dengan tugas Komite.
- Menyelenggarakan rapat secara rutin dan memastikan seluruh penyelenggaraan rapat terdokumentasi dengan tertib.

(3). Pelaksanaan Rapat Komite Pemantau Risiko

- Each member of the Committee shall keep the confidentiality of all documents and everything related to the Committee's jobs.
- Holding regular meetings and ensuring all meetings are documented orderly.

(3). Implementation of Risk Monitoring Committee's Meetings

No No	Nama Name	Jabatan Position	Periode Period	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendees	% Kehadiran % Attendance
1.	Erdie S. Manan	Ketua Chairman	1 Januari 2020 s.d 31 Desember 2019 1 January 2020 to 31st December 2019	4	4	100%
2.	Wito Mailoa	Anggota Member	1 Januari 2020 s.d 31 Desember 2020 1st January 2020 to 31st December 2020	4	4	100%
3.	Ageng Purwanto	Anggota Member	1 Januari 2020 s.d 31 Desember 2019 1st January 2020 to 31st December 2019	3	3	100%
4.	Samuel Mulyono	Anggota Member	7 September 2020 s.d 31 Desember 2020 7st September 2020 to 31st December 2020	1	1	100%
5.	Natalia Purnama	Anggota Member	1 Januari 2020 s.d 7 September 2020 1st January 2020 to 7st September 2020	3	3	100%

(4). Program Kerja Komite Pemantau Risiko dan Realisasinya

(4). Work Programs of Risk Monitoring Committee and their Realizations

No No	Program Kerja Work Program	Realisasi Realization
1.	Melakukan pemantauan atas pengelolaan risiko di Perusahaan rapat Komite Pemantau Risiko atas beberapa indikator utama dari seluruh jenis risiko yang dikelola, baik risiko secara individu maupun risiko secara terintegrasi konglomerasi keuangan. erapan manajemen risiko. Monitoring the risk management in the Company	Atas pembahasan tersebut, Komite Pemantau Risiko memberikan rekomendasi dan saran untuk perbaikan. Monitoring has been conducted by discussions in the Risk Monitoring Committee's meeting on several main indicators of all types of risks managed, both individual risks and integrated risks of financial conglomerates. Based on the discussion, the Risk Monitoring Committee has given recommendation and suggestion for improving the implementation of risk management.

TATA KELOLA PERUSAHAAN
Corporate Governance

No	Program Kerja	Realisasi
No	Work Program	Realization
2.	Pemantauan atas <i>Risk Appetite & Risk Tolerance</i> Tahun 2020 Monitoring the Risk Appetite & Risk Tolerance of 2020the Risk Monitoring Committee's meeting.	Pemantauan telah dilakukan melalui pembahasan secara berkala melalui rapat Komite Pemantau Risiko. Monitoring has been conducted by regular discussions in the Risk Monitoring Committee's meeting.
b.	Komite Tata Kelola (1). Susunan Keanggotaan Susunan dan keanggotaan Komite Tata Kelola per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:	b. Governance Committee (1). Membership Structure The structure and membership of the Governance Committee as of December 31, 2020 are as follows:

No	Nama	Posisi	Profil
No	Name	Position	Profile
1.	Wito Mailoa	Ketua Chairman	Sesuai profil Komisaris Utama According to the profile of President Commissioner.
2.	Ageng Purwanto	Anggota Member	Sesuai profil pada Susunan Keanggotaan Komite Audit According to the profile in the Audit Committee's Membership Structure.
3.	Samuel Mulyono	Anggota Member	Sesuai profil pada Susunan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko According to the profile in the Risk Monitoring Committee's Membership Structure.
4.	Jessica Tanoesoedibjo	Anggota Member	Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1994. Beliau meraih gelar Bachelor of Commerce dari University of New South Wales, Sydney, Australia pada tahun 2014. Kemudian beliau melanjutkan studinya di Macquarie University, Sydney, Australia, dan meraih gelar Master of International Trade & Commerce Law di tahun 2015. Pada tahun 2017, beliau meraih gelar Master of Arts in Biblical & Theological Studies dari Biola University, Los Angeles, Amerika Serikat. Selain menjabat sebagai Direktur Perseroan, saat ini beliau juga sedang melanjutkan studi untuk memperoleh Master of Arts in Education di Biola University, Los Angeles, Amerika Serikat. Saat ini beliau menjabat sebagai Direktur PT MNC Kapital Indonesia Tbk sejak tahun 2018, selain itu juga menjabat sebagai Wakil Koordinator MNC STIE & STKIP, Jakarta. Beliau turut menjabat sebagai anggota Komite Tata Kelola di PT MNC Guna Usaha Indonesia sejak September 2018. Indonesian citizen, born in 1994. She got her Bachelor of Commerce of the University of New South Wales, Sydney, Australia in 2014. Then she continued her study at Macquarie University, Sydney, Australia, and got her Master of International Trade & Commerce Law in 2015. In 2017, she got her Master of Arts in Biblical & Theological Studies of Biola University, Los Angeles, United States. In addition to serving as the Company's Director, she is currently continuing her study to acquire a Master of Arts in Education at Biola University, Los Angeles, United States. She currently serves as Director of PT MNC Kapital Indonesia Tbk since 2018, besides she is also serving as Deputy Coordinator of MNC STIE & STKIP, Jakarta.

- (2). Tugas dan Tanggung Jawab Komite Tata Kelola
- Mengevaluasi dan merekomendasikan kerangka dan Kebijakan Tata Kelola.
 - Memantau pelaksanaan tata kelola pada seluruh aktivitas bisnis.
 - Menilai konsistensi penerapan tata kelola dalam Perusahaan dan kecukupan pengendalian internal di Perusahaan.
 - Melaporkan kepada Dewan Komisaris berbagai ketidaksesuaian pelaksanaan tata kelola dan menyampaikan tindakan-tindakan yang dapat diambil dalam rangka perbaikan.
 - Mengkaji laporan tata kelola yang dikeluarkan oleh Perusahaan untuk memastikan transparansi dan akurasi laporan tersebut serta merekomendasikan perbaikan kepada Direksi.
 - Menyampaikan rekomendasi atas laporan dan Kebijakan Tata Kelola kepada Dewan Komisaris.
 - Memantau pelaksanaan fungsi kepatuhan.
 - Memantau dan memberikan saran dalam rangka pengelolaan dan pengendalian risiko tata kelola dan risiko kepatuhan yang dihadapi oleh Perusahaan.
 - Menyusun, mengkaji dan mengkinikan Piagam Komite Tata Kelola Perusahaan secara berkala.
 - Menjaga kerahasiaan seluruh dokumen, data, dan informasi Perusahaan.

- (2). Jobs and Responsibilities of Governance Committee
- Evaluating and recommending the Governance Policy and framework.
 - Monitoring the implementation of governance in all business activities.
 - Assessing the consistency of governance application within the Company and the adequacy of internal control in the Company.
 - Reporting to the Board of Commissioners of various non-conformities in the governance implementation and submitting actions that may be taken for improvement.
 - Reviewing the report of governance issued by the Company to ensure transparency and accuracy of the report as well as recommending improvements to the Board of Directors.
 - Giving recommendations on the reports and Policies of Governance to the Board of Commissioners.
 - Monitoring the implementation of compliance function.
 - Monitoring and giving suggestions in the context of management and control of governance risks and compliance risks faced by the Company.
 - Preparing, reviewing and updating the Charter of Corporate Governance Committee periodically.
 - Keeping the confidentiality of all Company's documents, data and information.

TATA KELOLA PERUSAHAAN
Corporate Governance

(3). Pelaksanaan Rapat Komite Tata Kelola

(3). Implementation of
Committee's Meetings

Governance

No No	Nama Name	Jabatan Position	Periode Period	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendees	% Kehadiran % Attendance
1.	Wito Mailoa	Ketua Chairman	1 Januari 2020 s.d 31 Desember 2019 1st January 2020 to 31st December 2019	4	4	100%
2.	Ageng Purwanto	Anggota Member	1 Januari 2020 s.d 31 Desember 2020 1st January 2020 to 31st December 2020	4	4	100%
3.	Jessica H. Tanoe- soedibjo	Anggota Member	1 Januari 2020 s.d 31 Desember 2019 1st January 2020 to 31st December 2019	4	4	100%
4.	Samuel Mulyono	Anggota Member	7 September 2020 s.d 31 Desember 2020 7st September 2020 to 31st December 2020	1	1	100%
5.	Erdie S. Manan	Anggota Member	1 Januari 2020 s.d 7 September 2020 1st January 2020 to 7st September 2020	3	3	100%
6.	Susanty T. Sanusi	Anggota Member	1 Januari 2020 s.d 7 September 2020 1st January 2020 to 7st September 2020	3	3	100%
7.	Nurul Fikri M.	Anggota Member	1 Januari 2020 s.d 7 September 2020 1st January 2020 to 7st September 2020	3	3	100%

(4). Program Kerja Komite Tata Kelola dan Realisasinya

(4). Work Programs of Governance Committee and their Realization

No No	Program Kerja Work Program	Realisasi Realization
1.	Melakukan evaluasi terhadap penerapan Telah dilakukan pemantauan dan evaluasi, serta pemberian saran/prinsip tata kelola di Perusahaan rekomendasi untuk langkah-langkah perbaikan atas penerapan Tata Kelola di Perusahaan melalui Rapat Komite Tata Kelola. To evaluate the application of governance Monitoring and evaluation were conducted, and suggestions/principle in the Company recommendations were given for correction measures on the Governance application in the Company in the Governance Committee's meeting.	
2.	Memantau kelengkapan governance Telah dilakukan pemantauan dan saran perbaikan untuk kelengkapan documents seperti tata tertib Direksi, governance documents tersebut. DPS, Dewan Komisaris, dan piagam Komite. To monitor the completeness of Monitoring and suggestions for improvement were conducted for governance documents such as orders the governance documents completeness of the Board of Directors, DPS, Board of Commissioners, and the Committee charter	
3.	Melakukan pemantauan atas pelaksanaan Telah dilakukan secara berkala, antara lain dengan memantau kerja Organ Utama Perusahaan, yaitu pelaksanaan rapat, kecukupan komposisi masing-masing organ, Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan kecukupan pelatihan dan pengembangan masing-masing organ, Pengawas Syariah (DPS). dan dengan memperhatikan rekomendasi dan keputusan yang dikeluarkan oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS. To monitor the implementation of Conducted periodically, among others by monitoring the meeting performance of the Company's Main implementation, adequacy of each organ's composition, sufficiency Organs, i.e. the Board of Directors, of training and development of each organ, and observing the Board of Commissioners, and Sharia recommendations and decisions issued by the Board of Directors, Supervisory Board (DPS) Board of Commissioners and DPS.	
4.	Melakukan pemantauan atas pelaksanaan Telah dilakukan dengan memastikan pemantauan rasio dan indikator Fungsi Kepatuhan tertentu telah comply atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Compliance Function of Conducted by ensuring that the monitoring of certain ratios and indicators has complied with or conformed to the prevailing legislation.	
5.	Melakukan pemantauan atas penerapan Telah dilakukan, pemantauan mencakup: Anti Pencucian Uang & Pencegahan • Kerangka kerja penerapan APU PPT. Pendanaan Terorisme • Kecukupan kebijakan & prosedur APU PPT. • Pemastian pelatihan APU PPT telah dilaksanakan. To monitor the application of Anti Money Monitoring was conducted, covering: Laundering & Prevention of Terrorism • Framework of APU PPT application. Funding • Sufficiency of APU PPT policy & procedure. • Ensuring the APU PPT training has been conducted.	
c.	Komite Nominasi dan Remunerasi. (1). Susunan Keanggotaan Susunan dan keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:	Nomination and Remuneration Committee (1). Membership Structure The structure and membership of the Nomination and Remuneration Committee as of December 31, 2020 are as follows:

TATA KELOLA PERUSAHAAN
Corporate Governance

No No	Nama Name	Posisi Position	Profil Profile
1	Erdie S. Manan	Ketua Chairman	Sesuai profil Komisaris Independen As the profile of Independent Commissioner
.	Wito Mailoa	Anggota Member	Sesuai profil Komisaris Utama As the profile of President Commissioner
2	Jessica Tanoesoedibjo	Anggota Member	Sesuai profil pada Anggota Komite Tata Kelola As the profile in Member of Governance Committee
.		Anggota	Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1963. Beliau meraih gelar Diploma of Banking dari Emile Woolf & Associates, London, Inggris pada tahun 1985.
3			Sebelum bergabung dengan MNC Group, beliau meniti karir sebagai Head of HR Strategic Business Partner and Recruitment CIMB Niaga (2010-2013), Regional HR Citibank, N.A (2008-2010), HR Head Citibank, N.A (2005-2008), HR Generalist Citibank, N.A (2000-2005), HR Head PT. Unibank Tbk (1999-2000), Training Manager PT. Unibank Tbk (1997-1999), Head of Training and General Affairs PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk (1996-1997), Training Manager PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk (1990-1996) dan Training Officer Citibank, N.A (1987-1990). Beliau bergabung dengan MNC Group pada tahun 2013 sebagai Direktur PT MNC Investama Tbk dan sejak April 2014 diangkat sebagai Wakil Direktur Utama dan Direktur Independen PT MNC Investama Tbk.
4.	Susanty Tjandra Sanusi	Member	Sejak tahun 2018, Beliau turut menjabat sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi di PT MNC Guna Usaha Indonesia. Indonesian citizen, born in 1963. She got a Diploma of Banking of Emile Woolf & Associates, London, England in 1985. Before joining MNC Group, she pursued his career as Head of HR Strategic Business Partner and Recruitment of CIMB Niaga (2010-2013), Regional HR of Citibank, NA (2008-2010), HR Head of Citibank, NA (2005-2008), HR Generalist of Citibank, NA (2000-2005), HR Head of PT. Unibank Tbk (1999-2000), Training Manager of PT. Unibank Tbk (1997-1999), Head of Training and General Affairs of PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk (1996-1997), Training Manager of PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk (1990-1996) and Training Officer of Citibank, N.A (1987-1990). She joined MNC Group in 2013 as Director of PT MNC Investama Tbk and since April 2014 was appointed as Vice President Director and Independent Director of PT MNC Investama Tbk.
5.	Antonius Iwan Santoso	Anggota Member	Since 2018, she has also served as a member of the Nomination and Remuneration Committee at PT MNC Guna Usaha Indonesia.

(2). Tugas dan Tanggung Jawab Komite
Nominasi dan Remunerasi

Terkait dengan fungsi nominasi:

- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - (a). Komposisi jabatan anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi.
 - (b). Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi.
 - (c). Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris termasuk Dewan Pengawas Syariah kepada Dewan Komisaris.

- Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.

- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi.

- Memberikan usulan calon anggota yang memenuhi syarat sebagai anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disetujui Otoritas Jasa Keuangan dan Rapat Umum Pemegang Saham.

Terkait dengan fungsi remunerasi:

- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai struktur, kebijakan dan besaran remunerasi Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi. Struktur remunerasi dapat berupa gaji, honorarium, insentif dan/atau tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variabel.
- Penyusunan struktur, kebijakan dan besaran remunerasi tersebut harus memperhatikan:

- (a). Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan perusahaan sejenis dan skala usaha dari Perseroan dalam

(2). Jobs and Responsibilities of the
Nomination and Remuneration Committee
Related to nomination function:

- Giving recommendations to the Board of Commissioners regarding:
 - (a). The office structure of members of the Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board and Board of Directors.
 - (b). The policies and criteria required in a nomination process.
 - (c). The policies for performance evaluation of members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners, including Sharia Supervisory Board to the Board of Commissioners.

- Assisting the Board of Commissioners in assessing the performance of members of the Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board and Board of Directors based on the benchmarks prepared as the evaluation materials.

- Giving recommendations to the Board of Commissioners on the program of capacity building of members of the Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board, and Board of Directors.

- Giving proposals for prospective members who meet the requirements as members of the Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board and Board of Directors to the Board of Commissioners for approval by the Financial Services Authority and the General Meeting of Shareholders.

Related to remuneration functions:

- Giving recommendations to the Board of Commissioners regarding the structures, policies and amounts of remuneration for the Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board and Board of Directors. The remuneration structures may be in the form of salary, honorarium, incentives and/or allowances that are fixed and/or variable.

- The preparation of the structures, policies and amounts of remuneration should take into account:

- (a). The remuneration applicable to the industry is according to activities of similar companies and the business scale of the

industri (peer group).

(b). Tugas, tanggung jawab dan wewenang anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Perseroan.

(c). Target kinerja Perseroan atau kinerja masing-masing anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi.

(d). Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel dengan mempertimbangkan sasaran dan strategi jangka panjang Perseroan.

- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi secara keseluruhan bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai untuk disampaikan kepada Direksi.

- Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi.

Company in its industry (peer group).

(b). The jobs, responsibilities and authorities of members of the Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board and Board of Directors are related to the achievement of the Company's objectives and performance.

(c). The targets of Company's performance or the performance of each member of the Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board and Board of Directors.

(d). The balance between fixed and variable allowances by considering the Company's long-term goals and strategies.

- Giving recommendations to the Board of Commissioners regarding the overall remuneration policy for Executive Officers and employees to be presented to the Board of Directors.
- Assisting the Board of Commissioners in assessing performance in accordance with the remuneration received by each member of the Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board and Board of Directors.

(3). Pelaksanaan Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

(3). Implementation of Nomination and Remuneration Committee's Meeting

No No	Nama Name	Jabatan Position	Periode Period	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendees	Kehadiran % Attendance
1.	Erdie S. Manan	Ketua Chairman	7 Januari 2020 s.d 31 Desember 2019 7st January 2020 to 31st December 2019	1	1	100%
2.	Wito Mailoa	Anggota Member	1 Januari 2020 s.d 31 Desember 2020 1st January 2020 to 31st December 2020	1	1	100%
3.	Susanty T. Sanusi	Anggota Member	1 Januari 2020 s.d 31 Desember 2019 1st January 2020 to 31st December 2019	1	1	100%
4.	Jessica H. Tanoë-soedibjo	Anggota Member	1 Januari 2020 s.d 7 Desember 2020 1st January 2020 to 7st December 2020	1	1	100%
5.	Antonius Iwan Santoso	Anggota Member	7 September 2020 s.d 31 Desember 2020 7st September 2020 to 31st December 2020	1	1	100%

(4). Program Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi dan Realisasinya

(4). Work Programs of National and Remuneration Committee and their Realization

No No	Program Kerja Work Program	Realisasi Realization
1.	Melakukan evaluasi terhadap Struktur Organisasi Perusahaan To evaluate the Company's Organizational Structure	Telah dilakukan evaluasi terhadap Struktur Organisasi Perusahaan sesuai dengan skala usaha, termasuk juga Man Power Planning (MPP) yang diperlukan. Hal ini tercantum dalam Risalah Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi. Evaluation was conducted on the Company's Organizational Structure according to the business scale, including the required Man Power Planning (MPP). This is specified in the Meeting Minutes of Nomination and Remuneration Committee.
2.	Memantau kebijakan remunerasi kepada karyawan Remunerasi. To monitor the policy of remuneration to employees	Telah dilakukan pemantauan pada rapat Komite Nominasi dan Remunerasi. Monitoring was conducted in the Nomination and Remuneration Committee's meeting.

TATA KELOLA PERUSAHAAN
Corporate Governance

- d. Komite Produk dan Pengembangan Unit Usaha Syariah (UUS)
(1). Susunan Keanggotaan
Komite Produk dan Pengembangan Unit Usaha Syariah (UUS) adalah Komite yang dibentuk oleh Direksi untuk membantu dalam penyusunan dan pengembangan produk pembiayaan syariah.
Susunan dan keanggotaan Komite Produk dan Pengembangan Unit Usaha Syariah (UUS) melekat pada jabatan, dengan kondisi per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

- d. Sharia Business Unit (UUS) Product and Development Committee
(1). Membership Structure
The Sharia Business Unit (UUS) Product and Development Committee (UUS) is a committee established by the Board of Directors to assist in the preparation and development of sharia financing products. The structure and membership of the Sharia Business Unit (UUS) Product and Development Committee is inherent in the position, with the conditions as of December 31, 2020 as follows:

No	Posisi	Posisi
No	Work Program	Realization
1	Pimpinan UUS Head of UUS	Ketua Chairman
·	Direktur Utama President Director	
2	Direktur (Keuangan) Director (Finance)	
·	Direktur (Bisnis 1) Director (Business 1)	Anggota Member
3	Direktur (Bisnis 2) atau Kuasa Direksi bagian Bisnis 2 selama Direktur Bisnis 2 belum diangkat. Strategic & Initiative Business Division Head	
4		
·	(2). Tugas dan Tanggung Jawab Komite Produk dan Pengembangan Unit Usaha Syariah (UUS)	(2). Jobs and Responsibilities of Sharia Business Unit (UUS) Product and Development Committee
5	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan kajian dan analisis pengembangan produk atau kegiatan usaha syariah baru yang akan dilakukan atau dipasarkan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Conducting studies and analyzes on the development of new sharia products or business activities to be carried out or marketed.
6	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan evaluasi dan penyempurnaan atas setiap produk atau kegiatan usaha syariah. • Memberikan rekomendasi, saran, dan masukan serta evaluasi atas aspek pemasaran dan pemenuhan prinsip syariah dan mitigasi risiko. • Merumuskan dan mengusulkan capaian kinerja bulanan dan tahunan untuk kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluating and improving each sharia product or business activity. • Giving recommendations, suggestions, and inputs and evaluating aspects of marketing and compliance with sharia principles and risk mitigation. • Formulating and proposing monthly and annual performance achievements for business activities based on Sharia Principles.

(3). Pelaksanaan Rapat Komite Produk dan Pengembangan Unit Usaha Syariah (UUS)

(3). Implementation of Sharia Business Unit (UUS) Product and Development Committee's Meetings

No No	Posisi Work Program	Posisi Realization	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendees	% Kehadiran % Attendance
1	Pimpinan UUSKetua Head of UUSChairman		2	2	100
.	Direktur UtamaAnggota President DirectorMember		2	2	%
2	Direktur (Keuangan)Anggota Director (Finance)Member		2	2	100
.	Direktur (Bisnis 1)Anggota Director (Business 1)Member		2	2	%
3	Direktur (Bisnis 2) atau Kuasa Direksi bagian Bisnis 2 Anggota				100
5.	selama Direktur Bisnis 2 belum diangkat. Authorizree of Board of Directors (Business 2)	Member	2	2	100% %
4.	Strategic & Initiative Business Division HeadAnggota Strategic & Initiative Business Division Head	Member	2	2	100%
.					%

9. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDITOR INTERNAL, DAN AUDITOR EKSTERNAL

a. Fungsi Kepatuhan
(1). Anggota Direksi yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Satuan Kerja atau Pegawai yang Melaksanakan Fungsi Kepatuhan
Fungsi kepatuhan di PT MNC Guna Usaha Indonesia berada dalam Departemen Compliance & Risk Management yang dibawah langsung oleh Direktur Utama.

(2). Pelaksanaan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan
Agar pelaksanaan kepatuhan di Perseroan yang berkesinambungan, perlu terbentuk suatu budaya kepatuhan di seluruh level dan jajaran organisasi Perseroan. Untuk itu, maka Perseroan secara terus menerus membangun budaya kepatuhan, melalui 4 (strategi) penguatan kepatuhan, yaitu:

9. 9. APPLICATION OF COMPLIANCE FUNCTION, INTERNAL AUDITOR, AND EXTERNAL AUDITOR

a. Compliance Function
(1). (1) Members of the Board of Directors are in charge of the Compliance Function and Work Units or Employees Performing the Compliance Function
The compliance function at PT MNC Guna Usaha Indonesia is under the Compliance & Risk Management Department directly supervised by the President Director.

(2). Implementation of Compliance with Legislation
To enable sustainable implementation of compliance in the Company, it is necessary to establish a compliance culture at all levels and members of the Company's organization. For that purpose, the Company continuously builds the compliance culture, by 4 (strategies) of compliance strengthening, namely:



a). Compliance Policy

Dalam melaksanakan tugasnya, selain mengacu kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, Fungsi Kepatuhan mengacu kepada ketentuan internal yang diatur dalam dokumen Kebijakan Kepatuhan.

Kebijakan Kepatuhan mengatur tugas dan tanggung jawab Fungsi Kepatuhan, antara lain:

- Membuat kebijakan kepatuhan (*compliance policy*) termasuk melakukan kajian secara berkala agar tujuan kepatuhan dapat tercapai.
- Membuat langkah-langkah atau program kepatuhan dalam rangka mendukung terciptanya budaya kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Perusahaan pada setiap jenjang organisasi.
 - Melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan dengan mengacu pada peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Perusahaan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Melakukan kaji ulang dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Perusahaan agar sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha Perusahaan telah sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Melakukan fungsi penghubung (*liaison officer*) dengan pihak regulator, khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan kepatuhan.

a). Compliance Policy

In performing its jobs, besides referring to the applicable legislation, the Compliance Function also refers to the internal provisions stipulated in the Compliance Policy document.

The Compliance Policy regulates the jobs and responsibilities of the Compliance Function, namely:

- Making the compliance policy, including conducting periodic reviews to enable achievement of compliance objectives.
- Making compliance measures or programs in order to support the creation of compliance culture in all of the Company's business activities at every level of the organization.
- Identifying, measuring, monitoring, and controlling compliance risks by referring to OJK regulations and the applicable legislation.
- Assessing and evaluating the effectiveness, adequacy, and conformity of the Company's policies, provisions, systems and procedures with the prevailing legislation.
- Reviewing and/or recommending the updating and improving of the Company's policies, provisions, systems and procedures to comply with the OJK provisions and the applicable legislation.
- Making efforts to ensure that the Company's policies, provisions, systems and procedures, as well as business activities have complied with the provisions of OJK and the applicable legislation.
- Performing a liaison function (*liaison officer*) with the regulators, particularly those related to compliance implementation.

- Melaporkan Fungsi Kepatuhan dan status kepatuhan Perusahaan kepada Direksi melalui Direktur yang membawahi kepatuhan.

- Berfungsi sebagai tempat bertanya seluruh karyawan mengenai hal-hal yang terkait dengan peraturan dan perundangan. Dalam pelaksanaan fungsi ini, Unit Kepatuhan dapat meminta bantuan para ahli dari dalam maupun dari luar Perusahaan sesuai dengan pertanyaan yang diajukan.

- Memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan langsung ke Unit Bisnis maupun unit pendukung (compliance testing). Dalam melakukan pemeriksaan, wewenang yang diberikan meliputi akses untuk memeriksa semua bukti transaksi, catatan maupun dokumen.

- Unit Kepatuhan bertanggung jawab atas program pelatihan atau sosialisasi mengenai peraturan dan program kepatuhan lainnya.

- Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

b). Compliance Monitoring

• Monitoring Pelaporan

Untuk memastikan kepatuhan dengan peraturan dan perundang-undangan, Fungsi Kepatuhan melakukan pemantauan secara berkala atas kewajiban pelaporan, terutama kepada pihak eksternal.

- Monitoring Indikator Kepatuhan Fungsi Kepatuhan melakukan pemantauan setiap bulan atas indikator kepatuhan dan Hasil pemantauan indikator kepatuhan disampaikan kepada Manajemen. Yang dimaksud dengan indikator kepatuhan adalah indikator yang terdiri dari rasio keuangan dan batasan lainnya yang ditetapkan oleh regulator, khususnya OJK, mencakup antara lain:

- Reporting the Company's Compliance Function and compliance status to the Board of Directors through the Director in charge of compliance function.
- Functioning as a place for asking all employees on matters related to the rules and regulations. In carrying out this function, the Compliance Unit may ask for the aid of experts from inside or outside the Company according to the questions asked.

- Having the authority to conduct direct inspections to the Business Unit and support units (compliance testing). In conducting the inspection, the authority granted includes the access to examine all evidences of transactions, records and documents.

- The Compliance Unit shall be responsible for the training programs or socialization on the regulations and other compliance programs. Performing other jobs related to

- Compliance Function.

b). Compliance Monitoring

• Report Monitoring

To ensure compliance with legislation, the Compliance Function periodically monitors the reporting obligation, especially to external parties.

- Monitoring of Compliance Indicators

The Compliance Function conducts monthly monitoring on compliance indicators and the results of monitoring on compliance indicators are submitted to the Management. What is meant by compliance indicators are indicators consisting of financial ratios and other limits set by the regulators, especially OJK, covering among others:

TATA KELOLA PERUSAHAAN
Corporate Governance

- Permodalan
- *Non Performing Financing (NPF)*
- *Financing to Asset Ratio*
- Ekuitas
 - Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP)
- Gearing Ratio
- Jaminan
 - Anjak Piutang dengan Jaminan
 - Anjak Piutang Tanpa Jaminan
- Keuangan
 - Tingkat Kesehatan Kerja dan Investasi
 - Jumlah Pembiayaan Modal
 - Rasio Ekuitas terhadap Modal Disetor
- Penyertaan Langsung Ketiga
 - Insentif kepada Pihak Ketiga
- Kendaraan Bermotor
 - Uang Muka Pembiayaan
 - Anjak Piutang dengan Perusahaan Pembiayaan
- Lainnya
 - Fasilitas Modal Usaha dan Fasilitas Dana
- Larangan Regulator
 - Monitoring Kepatuhan terhadap Cakupan pemantauan tidak hanya terhadap kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan, tetapi juga mencakup kepatuhan untuk memastikan tidak melakukan hal-hal yang dilarang sesuai regulasi eksternal.
- Perubahan Regulasi Eksternal
 - Monitoring Regulasi Baru/ Fungsi kepatuhan memantau perubahan regulasi atau penerbitan regulasi eksternal yang baru untuk selanjutnya dilakukan *review* dampak terhadap operasional dan ketentuan internal Perusahaan.
- c). Compliance Review
 - Fungsi Kepatuhan melakukan *review* atau evaluasi berdasarkan hasil pemantauan, beberapa di antaranya mencakup:
 - Rancangan Regulasi Eksternal
 - Fungsi Kepatuhan melakukan *review* atas rancangan regulasi eksternal dari Otoritas

- Capital
 - Non Performing Financing (NPF)
 - Financing to Asset Ratio
 - Equity
 - Maximum Limit for Financing (BMPP)
- Gearing Ratio
- Factoring with Recourse
 - Factoring without Recourse
- Financial Health Level
 - Total Working Capital and Investment Financing
 - Ratio of Equity to Paid-up Capital
- Direct Participation
- Incentives to Third Parties
 - Motor Vehicle Financing Advance
 - Factoring with Other Financing Companies
- Business Capital Facilities and Fund Facilities
 - Monitoring of Compliance with Regulatory Prohibitions
 - The scope of monitoring does not only cover compliance with the specified standards, but also covers compliance to ensure not doing things that are prohibited according to external regulations.
- Monitoring of New Regulations/ Changes to External Regulations
 - The compliance function monitors regulatory changes or issuance of new external regulations for further conducting review of the impacts on the Company's internal operations and regulations.
- c). Compliance Review
 - The Compliance Function conducts reviews or evaluations based on monitoring results, some of which include:
 - Draft External Regulation
 - The Compliance Function reviews the draft external regulations of the Financial

Jasa Keuangan yang akan berdampak kepada kegiatan usaha Perusahaan.

Selama tahun 2020, Fungsi Kepatuhan telah me-review rancangan regulasi eksternal beberapa rancangan, antara lain:

- Rancangan POJK tentang Pengawasan Market Conduct Sektor Jasa

Keuangan

- Rancangan POJK tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan

LJKNB

- Rancangan POJK Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Nonbank

(RPOJK MRTI LJKNB)

Regulasi Eksternal

- Fungsi Kepatuhan me-review atas regulasi eksternal seperti peraturan dan surat edaran yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, serta peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan lembaga yang berwenang, khususnya yang memiliki dampak kepada kegiatan usaha Perusahaan.

Review terhadap regulasi eksternal ditujukan untuk mengetahui dan memastikan dampak dan langkah-langkah yang perlu dilakukan agar Perusahaan tetap dalam kondisi complied dengan regulasi eksternal.

Regulasi Internal

- Fungsi kepatuhan melakukan review atas ketentuan internal dalam berbagai bentuk, seperti Kebijakan, Standar Operating Procedure (SOP), Surat Edaran (SE), Surat Keputusan (SK), dan Petunjuk Teknis. Review dilakukan sebelum diajukan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

Review dilakukan untuk memastikan ketentuan internal yang disusun tidak melanggar atau bertentangan dengan regulasi eksternal yang berlaku.

Services Authority that will have impacts on the Company's business activities.

During 2020, the Compliance Function has reviewed several draft external regulations, namely:

- Draft POJK on Market Conduct Supervision of Financial Services Sector

- Draft POJK on Status Decision and Follow-Up of LJKNB (NBFSIs) Supervision

- Draft POJK on Risk Management in the Use of Information Technology by Non-Bank Financial Services Institutions (RPOJK MRTI LJKNB).

External Regulations

- The Compliance Function reviews external regulations such as regulations and circulars issued by the Financial Services Authority, and legislations issued by the government and authorized institutions, especially those having impacts on the Company's business activities.

The review on external regulations is for knowing and ensuring the impacts and measures required taking so that the Company remains in compliance with external regulations.

- Internal Regulations

The compliance function reviews internal provisions in various forms, such as Policies, Standard Operating Procedures (SOP), Circulars (SE), Decisions (SK), and Technical Instructions. The review is conducted before submission and signing by the authorized official.

The review is conducted to ensure that the internal provisions compiled are not breaching or conflicting with the applicable external regulations.

d). Compliance Campaign

Fungsi Kepatuhan melakukan *review* atau evaluasi berdasarkan hasil pemantauan, beberapa di antaranya mencakup:

Selama tahun 2020, dilakukan upaya-upaya untuk mewujudkan budaya kepatuhan adalah melalui kampanye kepatuhan, antara lain sebagai

berikut:

- Fungsi Kepatuhan melakukan *reminder* kewajiban pelaporan secara berkala kepada seluruh unit kerja yang bertanggung jawab (*in charge*) terhadap pelaporan dimaksud, baik melalui media tertulis seperti email dan internal memorandum, maupun media lisan/*virtual meeting* seperti pada saat rapat dan *morning briefing*.

dan *morning briefing*.
• Fungsi Kepatuhan melakukan sosialisasi dan/atau *refreshment* (sosialisasi ulang) atas regulasi eksternal yang relevan dengan kegiatan usaha Perusahaan.

(3). Tingkat Kesehatan Perusahaan

a). Landasan Hukum

- Sesuai dengan POJK No. 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, setiap Perusahaan Pembiayaan diwajibkan setiap waktu memenuhi persyaratan Tingkat Kesehatan dengan kondisi

minimum sehat.

- Penilaian Tingkat Kesehatan mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/SEOJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah.

b). Hasil Penilaian

Penilaian Sendiri Tingkat Kesehatan sesuai dengan Pedoman dari OJK meliputi penilaian terhadap:

d). Compliance Campaign

The Compliance Function conducts reviews or evaluations based on monitoring results, some of which

include:

During 2020, efforts were made to create a compliance culture through compliance campaigns, among

others as follows:

- The Compliance Function performs regular reminders of reporting obligation to all work units responsible for/in charge of the said reporting, either by written media such as email and internal memorandums, as well as verbal media/virtual meeting such as during meetings and morning briefings.

• The Compliance Function conducts socialization and/or refreshment on external regulations relevant to the Company's business activities.

(3). Company's Health Level

a). Legal Bases

- In accordance with POJK No.35/POJK.05/2018 on Business Implementation of Financing Companies, each Financing Company shall be required to meet the Health Level requirements at all times with the minimum health condition.

• The Health Level Assessment refers to the Financial Services Authority Regulation Number 28/POJK.05/2020 on Assessment of Health Level of Non-bank Financial Services Institutions and the Financial Services Authority Circular Number 11/SEOJK.05/2020 on Assessment of Health Level of Financing Companies and Sharia Financing Companies.

b). Assessment Results

Self-Assessment of Health Level in accordance with OJK Guidelines includes assessment on:

No No	Faktor Penilaian Assessment Factor	Peringkat Rating
1.	Tata kelola Perusahaan yang baik Good Corporate Governance	2
	Profil risiko Risk Profile	2
	Rentabilitas Rentability	2
	Permodalan Capital	1
4.	Peringkat Tingkat Kesehatan Perusahaan	2
	<p>Berdasarkan Penilaian Sendiri Tingkat Kesehatan PT MNC Guna Usaha Indonesia, Per 31 Desember 2020, berada pada Peringkat Komposit 2 (PK-2).</p> <p>Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 11/SEOJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Keuangan Nonbank, hal ini mencerminkan kondisi Perusahaan yang secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lain tercermin dari peringkat faktor penilaian, antara lain penerapan tata kelola perusahaan yang baik, profil risiko, rentabilitas, dan permodalan yang secara umum baik. Dalam hal terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan.</p> <p>(4). Kepemilikan Unit Kerja atau Fungsi Terkait Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT)</p> <p>a). Fungsi APU & PPT melekat pada pejabat yang menjalankan Fungsi Manajemen Risiko, berada dalam Departemen Compliance & Risk Management yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.</p> <p>b). Penunjukkan Penanggungjawab Penerapan Program APU PPT tertuang dalam Surat Keputusan Direksi No. 04/SK/DIR-MNCGUI/2018 tentang Penunjukkan Penanggung Jawab dan Pelaksana Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT).</p>	<p>Based on Self-Assessment, PT MNC Guna Usaha Indonesia's Health Level as of December 31, 2020 was at Composite Rating 2 (PK-2).</p> <p>Based on the Financial Services Authority Circular (SEOJK) No.11/SEOJK.05/2020 on Assessment of the Health Level of Non-Bank Financial Institutions, the Company's condition in general is reflected as healthy so that it is considered capable of facing the significantly negative influences from changes in business conditions and other external factors as reflected in the rating of assessment factors, such as the implementation of good corporate governance, risk profile, rentability, and generally good capital. In case of any weaknesses, these weaknesses are in general not significant.</p> <p>(4). Ownership of Work Units or Functions Related to Implementation of Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism (APU & PPT) Programs</p> <p>a). The APU & PPT function is inherent in officers who carry out the Risk Management Function, found in the Compliance & Risk Management Department directly responsible to the President Director.</p> <p>b). The appointment of the person in charge of the AML-CFT Program implementation is stated in Decision of the Board of Directors No.04/SK/DIR-MNCGUI/2018 on Appointment of Person in Charge and Performer of Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism (APU & PPT) Programs.</p>

- (5). Kepemilikan Unit Kerja atau Fungsi dalam Menangani dan Menyelesaikan Pengaduan yang Diajukan Konsumen
- a.) Untuk memantau dan memastikan penanganan dan penyelesaian pengaduan yang diajukan Konsumen, PT MNC Guna Usaha Indonesia membentuk Unit Khusus Pelayanan Nasabah (UKPN) yang berada di bawah supervisi Corporate Secretary.
 - b.) Penunjukkan Penanggungjawab Penerapan Program APU PPT tertuang dalam Surat Keputusan Direksi 06/SK/DIR-MNCGUI/2019 perihal Penunjukan Penanggungjawab Unit Pelayanan Nasabah.
 - c.) Unit Pelayanan Nasabah mencakup fungsi untuk menangani dan menyelesaikan pengaduan nasabah, fungsi literasi keuangan, dan fungsi inklusi keuangan.
- b. Auditor Internal
- (1). Ruang Lingkup Pekerjaan Auditor Internal
- a). Meyakinkan bahwa pengelolaan risiko, pengendalian internal dan proses tata kelola Perusahaan telah memadai dan berfungsi dengan baik.
 - b). Mengevaluasi ketaatan terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan kebijakan serta prosedur Perusahaan yang berlaku.
 - c). Melakukan evaluasi apakah informasi keuangan, manajemen, dan operasional yang signifikan dalam ruang lingkup audit sudah disajikan dengan akurat, lengkap, dapat dipercaya, dan tepat waktu.
 - d). Menilai kecukupan sarana untuk memelihara dan melindungi aset Perusahaan, dan melakukan verifikasi terhadap keberadaan aset.
 - e). Mengidentifikasi setiap potensi penghematan dan efektivitas biaya serta membuat rekomendasi dalam upaya meningkatkan terciptanya efisiensi dan efektivitas biaya.
 - f). Melaksanakan penugasan khusus dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit yang relevan dengan ruang lingkup pekerjaan tersebut di atas, seperti penyelidikan dan pengungkapan atas penyimpangan, kecurangan, dan pemborosan.
 - g). Menyiapkan laporan audit dan rekomendasi untuk perbaikan.
- (5). Ownership of Work Units or Functions in Handling and Resolving Complaints Filed by Consumers
- a.) To monitor and ensure the dealing with and resolution of complaints filed by consumers, PT MNC Guna Usaha Indonesia established a Special Customer Service Unit (UKPN) which is under the Corporate Secretary's supervision.
 - b.) The appointment of Person in Charge of the Implementation of AML-CFT Program is stated in Decision of the Board of Directors 06/SK/DIR-MNCGUI/2019 on Appointment of Person in Charge of the Customer Service Unit.
 - c.) The Customer Service Unit includes functions to deal with and resolve customer complaints, financial literacy function, and financial inclusion function.
- Internal Auditor
- b. (1). Scope of Work of Internal Auditor
- a). To ensure that risk management, internal control and corporate governance processes are adequate and functioning properly.
 - b). To evaluate compliance with laws, legislations, OJK regulations and applicable Company's policies and procedures.
 - c). To evaluate whether significant financial, management, and operational information within the scope of audit have been presented accurately, completely, reliably, and timely.
 - d). To assess the adequacy of facilities for maintaining and protecting the Company's assets, and to verify the existence of assets.
 - e). To identify any potential savings and cost effectiveness and to give recommendations in the effort of increasing the creation of efficiency and cost effectiveness.
 - f). To carry out special assignments of the Board of Directors, Board of Commissioners, and/or Audit Committee relevant to the scope of work mentioned above, such as investigation and disclosure of deviations, fraud, and waste.
 - g). To prepare audit reports and recommendations for improvement.

(2). Struktur atau Kedudukan Unit Audit Internal

- a). Unit Audit Internal dipimpin oleh seorang Kepala Unit Audit Internal.
- b). Auditor yang duduk dalam Unit Audit Internal bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Unit Audit Internal.
- c). Kepala Unit Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris.
- d). Dalam struktur organisasi, Kepala Unit Internal Audit bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama.

(3). Independensi Auditor Internal

- a). Seluruh kegiatan yang dijalankan oleh Unit Internal Audit wajib senantiasa bebas dari keterlibatan elemen apapun dalam Perusahaan termasuk masalah pemilihan audit, ruang lingkup, prosedur, frekuensi, waktu, atau isi laporan untuk meyakinkan independensi dan perilaku objektif yang dibutuhkan dalam menyajikan laporan.
- b). Unit Internal Audit tidak memiliki tanggung jawab terhadap operasional atau kewenangan terhadap aktivitas Perusahaan. Oleh karena itu, Unit Internal Audit tidak akan melakukan kegiatan operasional, penyusunan prosedur, pemasangan sistem, pencatatan, atau terlibat dalam aktivitas apapun yang dapat mengganggu penilaian Unit Internal Audit.
- c). Unit Internal Audit wajib menunjukkan tingkatan objektivitas tertinggi dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi terkait aktivitas atau proses yang sedang diperiksa. Unit Internal Audit wajib membuat penilaian berimbang mengenai seluruh keadaan yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi maupun kepentingan pihak lain dalam mengambil keputusan.
- d). Kepala dan personil unit audit internal dilarang untuk merangkap peran dan tanggung jawab sebagai pelaksana kegiatan operasional persroan.

(2). Structure or Position of Internal Audit Unit

- a). The Internal Audit Unit is directed by the Head of Internal Audit Unit.
- b). The Auditor sitting in the Internal Audit Unit is directly responsible to the Head of Internal Audit Unit.
- c). The Head of Internal Audit Unit is appointed and dismissed by the President Director with approval of the Board of Commissioners.
- d). In the organizational structure, the Head of Internal Audit Unit is directly responsible to the President Director.

(3). Independence of Internal Auditor

- a). All activities carried out by the Internal Audit Unit shall at all times be free from involvement of any elements in the Company including issues of audit selection, scope, procedure, frequency, timing, or content of reports to ensure independence and objective behavior required in presenting the reports.
- b). The Internal Audit Unit has no responsibility for operations or authority over the Company's activities. Therefore, the Internal Audit Unit shall not carry out operational activities, prepare procedures, install systems, make records, or be involved in any activities that may interfere with the Internal Audit Unit's assessment.
- c). The Internal Audit Unit shall demonstrate the highest level of objectivity in gathering, evaluating, and communicating information related to activities or processes being examined. The Internal Audit Unit shall make a balanced assessment of all relevant circumstances and not be influenced by personal interests or other parties' interests in making decisions.
- d). The head and personnel of the internal audit unit shall be prohibited from concurrent roles and responsibilities as executors of the company's operational activities.

(4). Uraian Tugas Unit Audit Internal

- a). Menyusun rencana audit tahunan berdasarkan metodologi berbasis resiko dan menyampaikan rencana audit tahunan kepada Presiden

Direktur.

- a). Mengimplementasikan rencana audit tahunan yang disetujui, termasuk tugas khusus atau proyek yang diminta oleh direksi.

- c). Memastikan tersedianya jumlah staf audit yang cukup dengan pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang memadai untuk melaksanakan audit.

- d). Melakukan aktivitas audit dan memberikan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya.

- e). Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada pihak yang diaudit dengan tembusan kepada Presiden Direktur dan unit lain yang berkepentingan serta kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit. Menginformasikan semua temuan significant yang timbul, kepada Direksi dan kepada Dewan Komisaris melalui Komite

Audit.

- f). Melaksanakan follow-up atas temuan dan rekomendasi audit. Seluruh temuan audit yang significant akan tetap berstatus belum selesai sampai temuan diselesaikan.

- g). Menginformasikan status tindakan perbaikan atas temuan audit dan rekomendasi hasil audit, kepada

Direksi.

- h). Menyiapkan ukuran – ukuran penilaian kinerja dan pencapaian tujuan internal audit.

(5). Profil Kepala Unit Audit Internal

Internal Audit dikepalai oleh Yehezkiel Rizki Winda Aristha, selaku Internal Audit & Anti Fraud Departemen Head yang merupakan Warga Negara Indonesia, lahir di Semarang pada Tahun 1986. Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Trisakti. Saat ini berdomisili di Jakarta, Indonesia.

Sebelum bergabung dengan MNC Group, beliau berkarir di bidang pembiayaan

(4). Job Description of Internal Audit Unit

- a). To prepare annual audit plans based on a risk-based methodology and present annual audit plans to the President Director.

- b). To implement the approved annual audit plans, including special assignments or projects requested by the board of directors.

- c). To ensure the availability of sufficient number of audit staff with adequate knowledge, expertise and experience to carry out the audit.

- d). To conduct audit activities and give assessment on efficiency and effectiveness in the fields of finance, accounting, operation, human resources, marketing, information technology and other activities.

- e). To make reports on audit results and submit the reports to the audited parties with copies to the President Director and other units concerned and to the Board of Commissioners through the Audit Committee. To inform all significant findings to the Board of Directors and Board of Commissioners through the Audit Committee.

- f). To carry out follow-up on audit findings and recommendations. All significant audit findings will remain having the status unfinished until the findings have been finalized.

- g). To inform the status of corrective actions on audit findings and recommendations on audit results to the Board of Directors.

- h). To prepare the measures of performance appraisal and achievement of internal audit objectives.

(5). Profile of Head of Internal Audit Unit

The Internal Audit is directed by Yehezkiel Rizki Winda Aristha, as the Internal Audit & Anti Fraud Department Head who is an Indonesian citizen, born in Semarang in 1986. He got his Bachelor's degree in Economics of Trisakti University and is currently domiciled in Jakarta, Indonesia.

Before joining MNC Group, he had his career in automotive financing at PT. CIMB Niaga Auto Finance as Branch Office

otomotif pada PT. CIMB Niaga Auto Finance sebagai Branch Office Audit Department Head and Audit QA & Development Department Head dan sebelumnya sebagai PJS Chief Audit Executive, Branch Office Audit Department Head, Head Of fice Department Head and QA & Development Audit Department Head pada perusahaan pembiayaan yang sama serta Area Audit Officer & Independent Control Unit Officer pada PT. Summit Oto Finance.

Bergabung di PT MNC Guna Usaha Indonesia sejak Agustus 2019 sebagai Internal Audit & Anti Fraud Department Head.

Audit Department Head and Audit QA & Development Department Head and formerly as PJS Chief Audit Executive, Branch Office Audit Department Head, Head Office Department Head and QA & Development Audit Department Head in the same financing company and as Area Audit Officer & Independent Control Unit Officer at PT. Summit Auto Finance. He joined PT MNC Guna Usaha Indonesia since August 2019 as Internal Audit & Anti Fraud Department Head.

(6). Jumlah Pegawai Pada Unit Audit Internal
Unit Audit Internal terdiri dari 3 (dua) orang pegawai termasuk Kepala Unit Audit Internal.

(6). Number of Employees in Internal Audit Unit
The Internal Audit Unit consists of 3 (two) employees including the Head of Internal Audit Unit.

(7). Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Audit Internal
Selama tahun 2020, Audit Internal telah melakukan pemeriksaan dengan objek pemeriksaan, antara lain:

- a). Operasional audit KSKC Jakarta 1
- b). Operasional audit KSKC Medan
- c). Operasional Audit KSKC Surabaya
- d). Operasional Audit KSKC Semarang
- e). Audit APUPPT
- f). Operasional Audit Insurance
 - g). Operasional Audit Credit Analyst
- h). Operasional Audit Jaminan
- i). Operasional Audit PDC

(7). Report on Implementation of Internal Audit Jobs
During 2020, the Internal Audit has conducted audits with the objects of audits as follows:

- a). Operational audit of KSKC Jakarta 1
- b). Operational audit of KSKC Medan
- c). Operational Audit of KSKC Surabaya
 - d). Operational Audit of KSKC Semarang
- e). AML-CFT Audit
- f). Operational Audit of Insurance
- g). Operational Audit of Credit Analyst
- h). Operational Audit of Assurance
- i). Operational Audit of PDC

Auditor Eksternal

- c. (1). Ruang Lingkup dan Cakupan Audit
Ruang Lingkup pemeriksaan oleh Auditor Eksternal adalah Laporan Posisi Keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2020, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif lain, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 serta catatan atas Laporan keuangan yang berisi ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya atas laporan keuangan tersebut.
- (2). Kantor Akuntan Publik yang melakukan Audit Laporan Keuangan Perusahaan selama 5 (lima) Tahun terakhir

External Auditor

- c. (1). Scope and Scope of Audit
The scope of audit by the External Auditor is the Company's Statement of Financial Position as of December 31, 2020, Statement of Profit and Loss and Other Comprehensive Income, Statement of Changes in Equity, and Statement of Cash Flow for the year ended December 31, 2020 and notes to the financial Statement containing an overview of significant accounting policies and other explanatory information on the financial statements.
- (2). Public Accounting Offices conducting Audit on the Company's Financial Statements for the last 5 (five) Years:

Tahun Year	Kantor Akuntan Publik Public Accountant Office	Nama Akuntan (Perorangan) dan Nomor Pendaftaran di OJK Name of Accountant (Individual) Registered in OJK	No Pendaftaran OJK OJK Registration No.
2020	Kanaka Puradiredja, Suhartono	Doly Fajar Damanik, CPA	AP.1625
2019	Kanaka Puradiredja, Suhartono	Helli Isharyanto Budi Susetyo, CPA	AP.1021
2019	Anwar & Rekan	Helli Isharyanto Budi Susetyo, CPA	AP.1021
2019	Anwar & Rekan	Helli Isharyanto Budi Susetyo, CPA	AP.1021
2018	Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo&Rekan q	Drs. Nunu Nurdiyaman, CPA	AP.0269

10. PENERAPAN ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME (APU PPT)

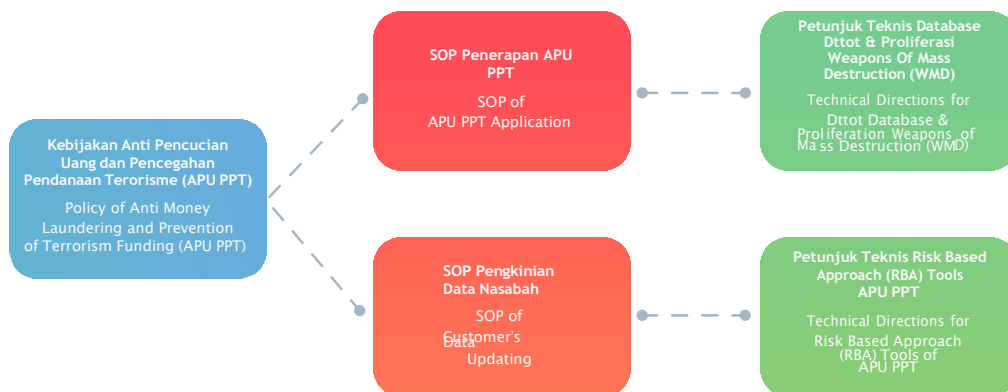
Dalam rangka penerapan APU PPT di Perusahaan, maka dilakukan beberapa upaya, antara lain sebagai berikut:

- a. Penyempurnaan Struktur Kebijakan APU PPT
Sebagai bagian dari penerapan APU PPT, Perusahaan menetapkan ketentuan internal sebagai acuan di internal Perusahaan dalam menerapkan APU PPT sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Adapun Struktur Kebijakan APU PPT yang saat ini berlaku, antara lain sebagai berikut:

10. IMPLEMENTATION OF ANTI-MONEY LAUNDERING AND COMBATING THE FINANCING OF TERRORISM (AML-CFT)

In the context of implementing AML-CFT in the Company, some efforts have been made, including the following:

- a. Completion of AML-CFT Policy Structure
As part of the implementation of AML-CFT, the Company stipulates internal provisions as the Company's internal reference in implementing AML-CFT in accordance with the applicable legislation.
The AML-CFT Policy Structure currently applied are as follows:



b. *Risk Based Approach (RBA) Tools* APU PPT Sesuai dengan SEOJK No. 37/SEOJK.05/2017 tanggal 17 Juli 2017 perihal Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Industri Keuangan Non-Bank dimana pemantauan dan pengkinian data Nasabah dilakukan berdasarkan tingkat risiko Nasabah. Untuk mengklasifikasikan nasabah berdasarkan tingkat risiko, maka Fungsi APU PPT menyusun RBA Tools yang menggunakan beberapa indikator di antaranya mengacu kepada:

- 1). *National Risk Assessment (NRA)* terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2015
 - 2). *National Risk Assessment (NRA)* terhadap Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Tahun 2015
 - 3). *Sectoral Risk Assessment (SRA)* terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2017
- Berdasarkan RBA Tools, maka nasabah dikelompokkan menjadi 3 (tiga) jenis risiko, yaitu tinggi, menengah dan rendah. Hasil klasifikasi nasabah akan menentukan strategi pemantauan.



- Nasabah Risiko Tinggi
High Risk Customer
- Nasabah Risiko Menengah
Medium Risk Customer
- Nasabah Risiko Rendah
Low Risk Customer



Pemantauan dan Pengkinian Data Nasabah
Customer's Data Monitoring and Updating

b. Risk-Based Approach (RBA) Tools of AML-CFT In accordance with SEOJK No.37/SEOJK.05/2017 dated July 17, 2017 on Guidelines for Implementation of Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism Programs in Non-Bank Financial Industry Sector, monitoring and updating of Customer data is carried out based on the level of Customer risk.

To classify customers based on the level of risk, the AML-CFT Function prepares the RBA Tools that apply several indicators, among others referring to:

- 1). National Risk Assessment (NRA) on Crimes of Money Laundering of 2015
- 2). National Risk Assessment (NRA) on Crimes of Terrorism Financing of 2015
- 3). Sectoral Risk Assessment (SRA) on Crimes of Money Laundering of 2017

Based on the RBA Tools, customers are classified into 3 (three) types of risk, namely high, medium and low. The results of customer classification will determine the monitoring strategy.

c. Pemantauan Pengkinian Data Nasabah Dalam rangka memenuhi rencana pengkinian data nasabah di tahun 2019 sebagaimana yang telah disampaikan kepada OJK, maka Perusahaan telah menyampaikan Realisasi Pengkinian Data Nasabah pada bulan Desember 2020 dengan hasil realisasi pengkinian data nasabah tersebut mencapai 100% terhadap rencana pengkinian data nasabah.

c. Monitoring of Customer Data Update In order to fulfill the plan for updating customer data in 2019 as submitted to the OJK, the Company submitted the Realization of Customer Data Update in December 2020 with the results of realization of customer data update reaching 100% of the customer data updating plan.

TATA KELOLA PERUSAHAAN
Corporate Governance

- d. Penyelenggaraan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT)
Perusahaan menyelenggarakan pelatihan APU PPT sebagai bagian dalam rangkaian dari kegiatan orientasi bagi karyawan baru maupun *refreshment* bagi karyawan lama. Selama Tahun 2020, telah dilakukan 6 (enam) kali pelatihan APU PPT melalui dengan rincian sebagai berikut:

- d. Organizing of Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism (AML-CFT) Training
The company organizes AML-CFT training as part of a series of orientation activities for new employees and refreshment for old employees. During 2020, 6 (six) AML-CFT trainings were conducted with the following details:

Penyelenggara Organizer	Tempat Place	Pemberi Materi Material Provider	Tanggal Date	Peserta Participant	Jumlah Peserta Number of Participants
Iconomics	Zoom	PPATK PPATK (Indonesian Financial Transaction Reports & Analyses)	24 Juni 2020 June 24, 2020	Risk & Compliance Dept Head	1
Risk & Compliance MNC Leasing	Zoom	Risk & APU PPT Supervisor Risk & AML-CFT Supervisor	Account Manag- 12 November 2020 November 12, 2020 and Admin R Support		33
Risk & Compliance MNC Leasing	Zoom	Risk & APU PPT Supervisor Risk & AML-CFT Supervisor	19 November 2020 November 19, 2020 counting & Finance	Marketing, Legal, CA, Credam, GA, SIB, Ac-	32
Risk & Compliance MNC Leasing	Zoom	Risk & APU PPT Supervisor Risk & AML-CFT Supervisor	OT, HC, Legal, CA, 23 November 2020 November 23, 2020 Management, SIB,	Admin, Collection, IT, Credam, GA & Asset Accounting & Finance	27
Risk & Compliance MNC Leasing	Zoom	Risk & APU PPT Supervisor Risk & AML-CFT Supervisor	3 Desember 2020 December 3, 2020	BS, Marketing, IT, Collection, OT	24
PT MNC Kapital Indonesia Tbk	Zoom	Risk & APU PPT Dept Head MNC Kapital Risk & AML-CFT Dept Head of MNC Kapital	18 Desember 2020 December 18, 2020	Fungsi APU PPT	2

Pada pelatihan APU PPT yang diselenggarakan oleh Perusahaan, setiap peserta pelatihan mengikuti *pre test* sebelum pelatihan dan *post test* setelah pelatihan dilakukan. Hal ini dilakukan untuk menguji kembali pemahaman para peserta pelatihan serta mengevaluasi efektivitas pelatihan yang sudah disampaikan.

In the AML-CFT training organized by the Company, each training participant took a pre-test before the training and a post-test after the training. This was conducted to re-examine the understanding of the training participants and evaluate the effectiveness of training delivered.

- e. Pelaporan terkait APU PPT
Fungsi APU PPT memantau dan/atau menyampaikan laporan terkait dengan kegiatan APU PPT kepada PPATK atau OJK, antara lain:
1). Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, yaitu paling lama 3 (tiga)

- e. Reporting related to AML-CFT
The AML-CFT function monitors and/or submits reports related to AML-CFT activities to PPATK or OJK, namely:

- 1). Report on Suspicious Financial Transactions, which is not later than 3

hari kerja setelah Perusahaan mengetahui adanya unsur Transaksi Keuangan Mencurigakan.

- 2). Laporan nasabah baru melalui SIPESAT secara triwulanan yaitu pada bulan Januari, April, Juli, dan Oktober 2020.
- 3). Laporan Rencana dan Realisasi Pengkinian Data Nasabah pada tanggal 26 Desember 2020.

(three) work days after the Company becomes aware of the existing elements of Suspicious Financial Transactions.

- 2). New customer reports through SIPESAT on a quarterly basis, namely in January, April, July, and October 2020.
- 6). Report on the Plan and Realization of Customer Data Update on December 26, 2020.

11. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN PERUSAHAAN YANG BELUM DIUNGKAP DALAM LAPORAN LAINNYA

- a. Transparansi Jasa Pembiayaan
Jasa pembiayaan yang disajikan dalam *website* Perusahaan, antara lain:
 1. Pembiayaan Konvensional, terdiri dari:
 - Pembiayaan Investasi, yaitu pembiayaan barang modal beserta jasa yang diperlukan untuk aktivitas usaha/investasi, rehabilitasi, modernisasi, ekspansi atau relokasi tempat usaha/investasi yang diberikan kepada debitur.
 - Pembiayaan Modal Kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran yang habis dalam satu siklus aktivitas usaha debitur.
 - Pembiayaan Multiguna, yaitu pembiayaan barang dan/atau jasa yang diperlukan oleh debitur untuk pemakaian/konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha atau aktivitas produktif dalam jangka waktu yang diperjanjikan.
 2. Pembiayaan Syariah, terdiri dari:
 - Pembiayaan Jual Beli, yaitu pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang melalui transaksi jual beli sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Syariah yang disepakati oleh para pihak.
 - Pembiayaan Investasi, yaitu pembiayaan dalam bentuk penyediaan modal dengan jangka waktu tertentu untuk kegiatan usaha produktif dengan pembagian keuntungan sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Syariah yang disepakati oleh para pihak.
 - Pembiayaan Jasa, yaitu pemberian/ penyediaan jasa baik dalam bentuk pemberian manfaat atas suatu barang, pemberian pinjaman, dan/

11. TRANSPARENCY OF THE COMPANY'S FINANCIAL AND NON-FINANCIAL CONDITIONS NOT YET DISCLOSED IN OTHER REPORTS

- a. Transparency of Financing Services
The financing services presented on the Company's website include:
 1. Conventional Financing, consisting of:
 - Investment Financing, namely the financing of capital goods and services required for activities of business/investment, rehabilitation, modernization, expansion or relocation of business/investment premises provided to debtors.
 - Working Capital Financing, namely financing to meet the needs of expenditure exhausted in one cycle of a debtor's business activity.
 - Multipurpose Financing, namely financing of goods and/or services required by debtors for use/ consumption and not for business purposes or productive activities within the agreed period.
 2. Sharia Financing, consisting of:
 - Sale and Purchase Financing, namely financing in the form of supply of goods via sale-purchase transactions in accordance with the Sharia Financing Agreement agreed upon by the parties.
 - Investment Financing, namely financing in the form of capital supply for a specific period for productive business activities by profit sharing according to the Sharia Financing Agreement agreed upon by the parties.
 - Service Financing, namely providing/ supply of services either in the form of giving benefits for an item, giving loans, and/or giving services with and/

atau pemberian pelayanan dengan dan/atau tanpa pembayaran imbal jasa sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Syariah yang disepakati

oleh para pihak.

b. **Transparansi Tata Cara Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa**

Sebagai bagian dari penerapan kebijakan perlindungan nasabah, maka Perusahaan telah menetapkan unit kerja khusus untuk mengelola pengaduan nasabah dan alur kerja tindak lanjut pengaduan nasabah. Pengaduan nasabah memegang peranan penting, selain untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, laporan yang diterima dapat dipergunakan untuk evaluasi perbaikan proses pelayanan dan pembiayaan di Perusahaan.

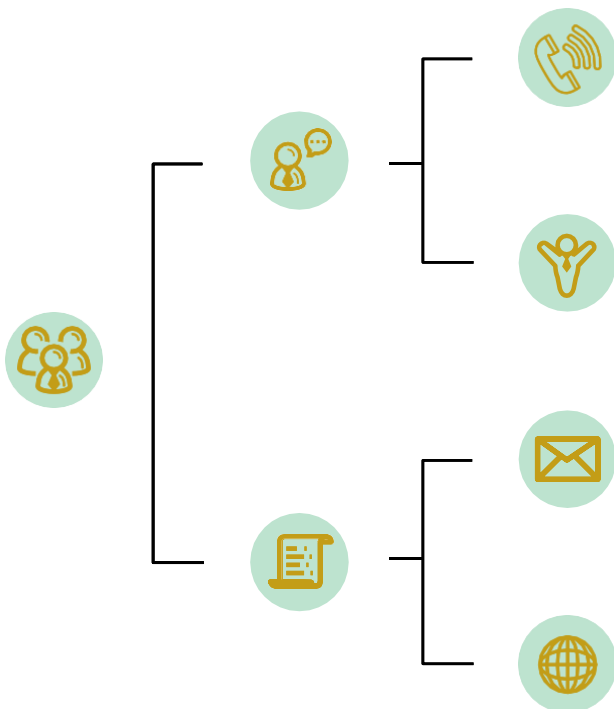
Mengingat peranan tersebut, maka Perusahaan membuka akses kepada nasabah untuk menyampaikan pengaduan kepada Perusahaan, baik secara lisan maupun tertulis. Informasi Prosedur Penyampaian Pengaduan dipublikasikan melalui situs web Perseroan untuk pelaksanaan ketentuan perlindungan konsumen.

or without payment of fees according to the Sharia Financing Agreement agreed upon by the parties.

b. **Transparency of Complaints and Dispute Resolution Procedures**

As part of the application of customer protection policy, the Company has established a special work unit to manage customer complaints and follow-up workflows for customer complaints. Customer complaints play an important role, not only for complying with applicable laws and regulations, but the reports received may also be used for evaluating the improvement of service and financing processes in the Company.

In view of this role, the Company opens access to customers to submit complaints to the Company, both verbally and in writing. Information on the Complaint Submission Procedure is published through the Company's website for the implementation of consumer protection provisions.



Menghubungi Customer Service kami di nomor 021-3910993

Mengunjungi kami di jaringan Kantor MNC Leasing terdekat, List kantor cabang kami dapat dilihat di <https://www.mncleasing.com/jaringan-kantor>

Menghubungi kami melalui email: info.mncleasing@mncgroup.com

Mengirimkan Surat Resmi ke MNC Leasing
UP: Unit Khusus Pelayanan Nasabah (UKPN)
MNC Tower 23rd Floor Jl. Kebon Sirih No 17-19, Jakarta Pusat 10340 - Indonesia

Website MNC Leasing
Mengisi form pengaduan nasabah
<https://www.mncleasing.com/formulir-pengaduan-nasabah>

dalam kondisi tertentu penyelesaian pengaduan dapat diperpanjang hingga paling lama 20 (dua puluh) hari kerja berikutnya sesuai POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Perpanjangan waktu penyelesaian pengaduan diberitahukan secara tertulis kepada konsumen.

The solution for settlement of customer complaints will be conducted within 20 work days and under certain conditions the settlement of complaints may be extended to maximum the next 20 (twenty) work days according to POJK Number 1/POJK.07/2013 on Consumer Protection of Financial Services Sector. Any extension of complaint settlement will be notified in writing to consumers.

12. PENGUNGKAPAN KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG MENCAPAI 50% (LIMA PULUH PERSEN) ATAU LEBIH, YANG MELIPUTI JENIS DAN JUMLAH LEMBAR SAHAM

Tidak terdapat anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang memiliki saham 50% (lima puluh persen) atau lebih pada PT MNC Guna Usaha Indonesia maupun perusahaan lain.

12. DISCLOSURE OF SHARE OWNERSHIP OF MEMBERS OF BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF COMMISSIONERS REACHING 50% (FIFTY PERCENT) OR MORE, INCLUDING THE TYPE AND NUMBER OF SHARES

There are no members of the Board of Directors and Board of Commissioners who hold 50% (fifty percent) or more shares in PT MNC Guna Usaha Indonesia or other companies.

13. PENGUNGKAPAN HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, DENGAN ANGGOTA DIREKSI LAIN, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DPS, DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN

13. DISCLOSURE OF FINANCIAL RELATIONSHIP AND FAMILY RELATION OF MEMBERS OF BOARD OF DIRECTORS AND MEMBERS OF BOARD OF COMMISSIONERS, WITH OTHER MEMBERS OF BOARD OF DIRECTORS, MEMBERS OF BOARD OF COMMISSIONERS, MEMBERS OF DPS, AND/OR SHAREHOLDERS OF THE COMPANY

No No	Nama Name	Hubungan Dengan Relation with	Bentuk Hubungan Form of Relationship Keuangan Keluarga Finance Family Ya/Tidak Ya/Tidak Yes No Yes No		Keterangan Remarks
			Ya	Tidak	
Paulus Cholot Janala – Direktur Utama		Direksi Lainnya Other Directors	√	√	
		Dewan Komisaris Commissioner	√	√	
		DPS s DPS	√	√	
		Pemegang Saham hareholders	√	√	
Yusnandi Liauw – Direktur		Direksi Lainnya Other Directors	√	√	
		Dewan Komisaris Commissioner	√	√	
		DPS s DPS	√	√	
		Pemegang Saham hareholders	√	√	

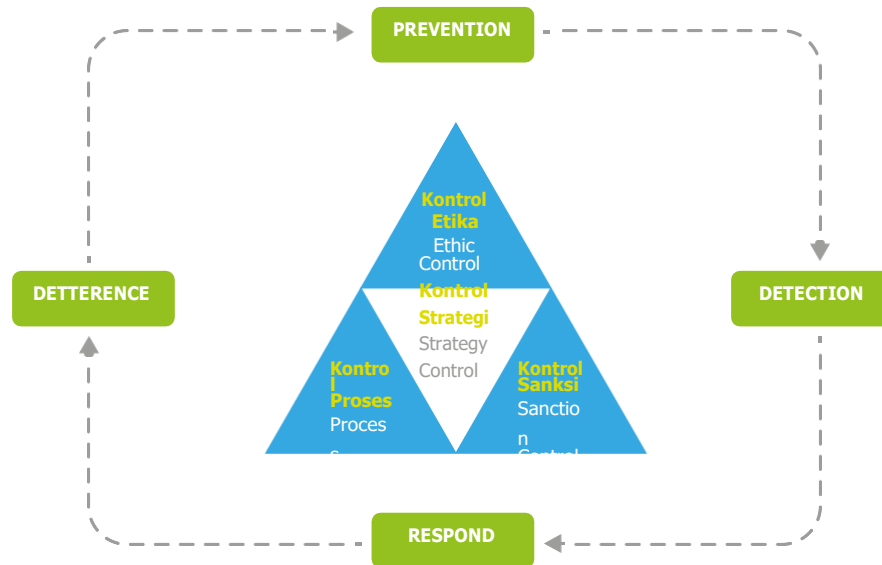
No No	Nama Name	Hubungan Dengan Relation with	Bentuk Hubungan Form of Relationship		Keterangan Remarks	
			Keuangan Finance	Keluarga Family		
			Ya Yes	Tidak No		
	Direksi Lainnya Other Directors		√	√		
	Henri Gunawan – Direktur DPS DPS	Dewan Komisaris Commissioners	√	√		
		Pemegang Saham Shareholders	√	√		
	Direksi Lainnya Other Directors		√	√		
	Wito Mailoa – Ko- misaris Utama DPS	Dewan Komisaris Commissioners	√	√		
		Pemegang Saham Shareholders	√	√		
	Direksi Lainnya Other Directors		√	√		
	Erdie S. Manan – Komisaris Inde- penden DPS	Dewan Komisaris Commissioners	√	√		
		Pemegang Saham Shareholders	√	√		

14. STRATEGI PENANGANAN ANTI FRAUD

Pengelolaan dan pengendalian fraud dilakukan berdasarkan kerangka fraud, yaitu menggunakan 4 (empat) pilar yang menjadi strategi anti fraud. Keempat pilar itu adalah pencegahan (*prevention*), deteksi (*detection*), investigasi, pelaporan dan sanksi (*respond*), serta evaluasi dan tindak lanjut (*deterrence*). Keempat pilar tersebut berdasarkan 3 (tiga) kontrol strategi, yaitu kontrol etika kontrol sanksi, dan kontrol proses. Ketiga strategi kontrol tersebut saling berkesinambungan dan dapat diimplementasikan ke dalam masing-masing pilar strategi anti fraud.

14. ANTI FRAUD HANDLING STRATEGY

Fraud management and control are conducted based on the fraud framework, using 4 (four) pillars as the anti-fraud strategy. The four pillars are prevention, detection, investigation, reporting and sanctions (response), and evaluation and follow-up (deterrence). The four pillars are based on 3 (three) strategic controls, namely ethical control, sanction control, and process control. The three control strategies are mutually sustainable and can be implemented into each pillar of the anti-fraud strategy.



1). Pencegahan (Prevention)

Tindakan/pola kerja sistematis yang bertujuan untuk mencegah atau melindungi dari suatu tindakan fraud yang dapat menimbulkan risiko/kerugian pada perusahaan. Tindakan ini biasanya berupa suatu usaha untuk mempersulit (memperkecil/menghilangkan kesempatan) atau menghilangkan motivasi pihak yang berniat melakukan perbuatan fraud. Program pencegahan meliputi namun tidak terbatas pada beberapa aktivitas berikut ini:

ini:

1). *Anti Fraud Awareness*

- Melakukan sosialisasi Anti Fraud Statement melalui training program anti fraud untuk seluruh karyawan secara berkala dan publikasi poster/himbauan program anti fraud (*employee awareness*).
- Melakukan sosialisasi atas setiap kasus fraud dalam bentuk email blasting yang berisi ringkasan kasus, sanksi yang telah diberikan, pesan manajemen dan pelajaran yang dapat diambil dari kasus tersebut.
- Menjalankan budaya anti fraud sebagai *control environment* dengan melalui pemahaman indikator-indikator risiko fraud dan tindak lanjut terhadap setiap kejadian fraud yang dilakukan secara berkesinambungan.
- Menindaklanjuti setiap laporan indikasi fraud yang terjadi sesegera mungkin.
- Meningkatkan kepedulian dan

1). Prevention

It is a work systematic action/scheme aimed at preventing or protecting from fraudulent acts that may pose risks/losses to the company. This action is usually in the form of an attempt to complicate (minimize/eliminate opportunities) or eliminate the motivation of those who intend to commit fraud. The prevention program includes but is not limited to the following activities:

1). Anti-Fraud Awareness

- Conducting socialization of Anti Fraud Statement by training of anti-fraud program for all employees periodically and publication of anti-fraud program posters/appeals (*employee awareness*).
- Conducting socialization of each case of fraud in the form of email blast containing summary of the case, sanctions given, management messages and lessons that can be drawn from the case.
- Performing an anti-fraud culture as control environment by understanding the indicators of fraud risk and following up any incident of fraud carried out sustainably.
- Following up on any reports on indications of occurring fraud as soon as possible.
- Increasing debtor concern and

kewaspadaan debitur (*customer awareness*) terhadap kemungkinan terjadinya fraud.

- Pelaksanaan system pengendalian fraud merupakan tanggung jawab dari semua pihak yang terkait di PT MNC Guna Usaha Indonesia.

- PT MNC Guna Usaha Indonesia menjalankan budaya anti fraud dengan menangani kasus secara konsisten tanpa mempertimbangkan jabatan atau lamanya bekerja pihak terkait fraud.

- Pemberian sanksi tegas terhadap pelaku fraud.

- Segala kerugian terkait fraud ditanggung oleh pelaku.

- Pendidikan dan sosialisasi program anti fraud bagi karyawan baru dan lama baik karyawan tetap maupun kontrak.

2). Identifikasi Kerawanan

- Identifikasi, analisa dan penilaian terhadap potensi terjadinya risiko fraud pada setiap aktivitas atau bagian melalui *review* produk dan aktivitas atau bagian melalui *review* produk dan aktivitas baru/perubahannya, *review* kebijakan dan prosedur, *review limit* dan wewenang.

- Penerapan basic control yang bersifat pencegahan (*dual control*, *dual custody*, dan lain-lain) dalam proses kerja.

- Hasil identifikasi didokumentasikan dan diinformasikan kepada pihak berkepentingan dan selalu diperbarui terutama terhadap aktivitas yang dinilai berisiko tinggi terjadinya fraud.

3). Know Your Employee

- Sistem dan prosedur rekrutmen yang efektif untuk memperoleh rekam jejak calon karyawan secara lengkap dan akurat.

- Sistem seleksi yang dilengkapi kualifikasi yang tepat dengan mempertimbangkan risiko, serta ditetapkan secara obyektif dan transparan.

- Pengenalan dan pemantauan karakter, perilaku dan gaya hidup karyawan.

2). Deteksi (*Detection*)

Deteksi merupakan suatu aktivitas untuk mendapatkan adanya indikasi atau risiko fraud. Usaha tersebut bertujuan agar dampak kerugian yang timbul dapat

awareness of any possible occurrence of fraud.

- The implementation of fraud control system is the responsibility of all parties involved in PT MNC Guna Usaha Indonesia.

- PT MNC Guna Usaha Indonesia implements an anti-fraud culture by handling cases consistently without considering the position or length of service of any fraud-related party.

- Imposing strict sanctions against fraud perpetrators.

- All losses related to fraud are borne by perpetrators.

- Educating and socializing anti-fraud programs to new and old employees, both permanent and contract employees.

2). Identification of Vulnerabilities

- Identification, analysis and assessment of potential occurrence of fraud risks in each activity or section by review of products and activities or sections, review of new products/changes, review of policies and procedures, review of limits and authorities.

- Implementation of preventive basic controls (*dual control*, *dual custody*, etc.) in the work process.

- The results of identification are documented and informed to interested parties and always updated, especially for activities considered high risk of fraud.

3). Know Your Employee

- Effective recruitment system and procedure to obtain complete and accurate track records of prospective employees.

- A selection system complete with proper qualifications by considering the risks and specified objectively and transparently.

- Identification and monitoring of employees' character, behavior and lifestyle.

2). Detection

Detection is an activity to get any indication or risk of fraud. This effort is intended to enable controlling or minimizing the impact of losses incurred. It should be

dikontrol atau diminimalisir. Selayaknya harus diusahakan untuk melakukan pendeteksian sedini mungkin. Selayaknya harus diusahakan untuk melakukan pendeteksian sedini mungkin. Fungsi deteksi harus mencakup namun tidak terbatas pada aktivitas berikut :

a). *Whistle Blowing*

- Whistle Blowing merupakan jalur bagi karyawan untuk melaporkan adanya kecurigaan terhadap indikasi/insiden adanya pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan yang ada sekaligus sebagai suatu proses yang secara tidak langsung memberdayakan karyawan untuk terlibat secara aktif dalam memerangi segala bentuk kecurangan.

- Karyawan menyampaikan informasi indikasi penyimpangan yang dapat merugikan perusahaan kepada whistle blowing melalui *email* antifraud. mncleasing@mncgroup.com atau antifraudleasing@mncgroup.com atau telepon/sms.

- Seluruh karyawan PT MNC Guna Usaha Indonesia baik di kantor pusat maupun di kantor cabang bertanggung jawab untuk melaporkan adanya indikasi/kejadian fraud sesegera mungkin.

- Pelapor diperkenankan untuk langsung melapor adanya indikasi fraud tanpa menunggu bukti-bukti terkumpul.

- Pelapor tidak perlu untuk mencantumkan nama pelapor.

- Kerahasiaan pelapor dijamin dan pelapor tidak akan menerima sanksi jika hal yang dilaporkan tidak terbukti kebenarannya.

- Pelapor wajib mendapat perlindungan baik dari sisi hukum maupun dari intimidasi fisik/psikis.

- Pelapor yang teridentifikasi dan terbukti sebagai bagian dari pelaku fraud tidak sepenuhnya dapat terbebas dari pemberian sanksi.

- Penyembunyian adanya informasi fraud yang diketahui akan dikenakan sanksi.

- Laporan bukan merupakan fitnah

endeavored to detect as early as possible. It should be endeavored to detect as early as possible. The detection function should include but not be limited to the following activities:

a). Whistle Blowing

- Whistle Blowing is a path for employees to report any suspicion of indication/incident of violation of existing regulations as well as a process that indirectly empowers employees to be actively involved in combating all forms of fraud.

- Employees give information on indications of irregularities that may harm the company by whistleblowing via email antifraud. mncleasing@mncgroup.com or antifraudleasing@mncgroup.com or by telephone/sms.

- All employees of PT MNC Guna Usaha Indonesia both at the head office and branch offices are responsible for reporting any indications/incidents of fraud as soon as possible.

- Whistleblowers are allowed to directly report any indication of fraud without waiting for evidences to be collected.

- The whistleblowers do not need to specify their names.

- Confidentiality of the whistleblowers is guaranteed and they will not get any sanctions if the matters reported are not proven to be true.

- The whistleblowers shall receive protection both from the legal side and from physical/psychic intimidation.

- Any whistleblowers identified and proven to be part of the fraud perpetrators may not be completely free from sanctions.

Concealing any known information

- of fraud will be subject to sanctions.

A report is not a slander or an

-

atau upaya pencemaran nama baik.

- Setiap karyawan dan atasan harus saling mendorong untuk berani menyampaikan/melaporkan jika terjadi pelanggaran atau potensi

fraud.

b). *Surprise Audit*

- *Surprise audit* merupakan salah satu metode untuk mengidentifikasi terjadinya fraud pada aktivitas tertentu dengan cara pelaksanaan tanpa diketahui oleh auditee untuk menghindari terjadinya manipulasi data atau

keadaan.

- *Surprise audit* dapat dilakukan oleh *Anti Fraud Management* dan/atau divisi lain yang memiliki fungsi investigasi.

- Tim deteksi memiliki kewenangan untuk melakukan *surprise audit* terhadap aktivitas tertentu yang memiliki risiko fraud tinggi berdasarkan hasil monitoring dan analisa trend fraud.

- Tim deteksi memiliki kewenangan untuk mengakses dokumen, data, serta informasi di unit bagian yang menjadi objek pemeriksaan.

- *Surprise audit* diutamakan dilakukan pada bagian atau aktivitas tertentu yang berisiko tinggi terjadinya fraud, seperti akuisisi pembiayaan, penanganan kredit bermasalah dan

sebagainya.

c). *Surveillance System*

- *Surveillance System* merupakan suatu tindakan pengujian/pemeriksaan yang dilakukan tanpa diketahui/disadari oleh pihak yang diuji/diperiksa dalam rangka memantau dan menguji efektivitas kebijakan anti fraud.

- *Surveillance system* dapat dilakukan oleh *Anti Fraud management* dan/atau pihak internal lainnya di Perusahaan.

d). Kontrol Internal pada proses operasional

- Setiap unit bertanggung jawab melakukan kontrol internal yang memadai pada proses operasional harian yang dapat

attempt of defamation.

- Any employee and superior must encourage each other to dare to convey/report any breach or potential fraud.

b). *Surprise Audit*

- *Surprise audit* is a method to identify any occurrence of fraud in certain activities by way of implementation without being noticed by the auditees to avoid manipulation of data or circumstances.

- *Surprise audit* may be carried out by the *Anti Fraud Management* and/or other divisions having an investigative function.

- The detection team has the authority to conduct *surprise audit* on certain activities having high risk of fraud based on the results of monitoring and analysis of fraud trends.

- The detection team has the authority to access documents, data, and information in the unit that becomes the object of inspection.

- *Surprise audit* is prioritized for certain divisions or activities having high risk of fraud occurrence, such as financing acquisitions, handling non-performing loans, etc.

c). *Surveillance System*

- *Surveillance System* is an act of testing/inspection carried out without being known/realized by the party being tested/examined in order to monitor and test the effectiveness of anti-fraud policy.

- *Surveillance system* may be conducted by the *Anti Fraud management* and/or other internal parties in the Company.

d). *Internal control in operational process*

- Each unit is responsible for carrying out an adequate internal control in daily operational processes able to carry out early

melakukan deteksi dini upaya *fraud* yang dilakukan oleh pelaku sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku.

- Kewenangan akses terhadap data, dokumen dan informasi.
- Untuk keperluan deteksi *fraud* yang dilakukan melalui proses monitoring, pengamatan serta analisa atas aktivitas perbankan, diperlukan akses terhadap data, dokumen dan informasi internal.

3). Respond

Tindakan kelanjutan yang mengidentifikasi akar penyebab dari adanya kejadian *fraud* serta melakukan mitigasi dan pemulihan terhadap kerusakan/kerugian yang ditimbulkan dan memastikan adanya pemberian sanksi sebagai bentuk efek jera.

Tindakan kelanjutan ini memberikan pesan kepada seluruh karyawan bahwa setiap indikasi *fraud* yang dilaporkan atau terdeteksi akan selalu diproses sesuai standar investigasi yang berlaku dan pelakunya akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Tindakan ini meliputi namun tidak terbatas pada beberapa aktifitas

berikut:

a). Investigasi

- Investigasi dilakukan berdasarkan laporan atau terdeteksinya indikasi *fraud* untuk mengumpulkan bukti-bukti yang lengkap dan valid, serta mencari tahu penyebab utama dari *insiden fraud (root cause analysis)*.

• Investigasi pendahuluan dapat dilakukan oleh unit kerja terkait untuk mengumpulkan bukti-bukti awal indikasi *fraud*.

- Proses investigasi lebih lanjut oleh Anti Fraud Management beserta pihak - pihak terkait.
 - Anti Fraud Management bertanggung jawab untuk membentuk tim investigasi dan menyiapkan langkah - langkah investigasi maksimal H+1 setelah laporan indikasi *fraud* diterima.

- Pelaksanaan investigasi menerapkan asas praduga tak bersalah dan pihak diduga melakukan indikasi *fraud* tidak boleh diperlakukan sebagai pihak yang bersalah/tersangka sebelum bukti-bukti tindakan *fraud* ditemukan.

detection of *fraud* attempts by perpetrators in accordance with the applicable policies and procedures.

- Authority to access data, documents and information.
- For the purpose of *fraud* detection carried out by process of monitoring, observing and analyzing on banking activities, access to internal data, documents and information is required.

3). Respond

Is a follow-up action that identifies the root cause of any occurrence of *fraud* and mitigates and recovers the damage/loss caused and ensures the sanctioning as a form of deterrent effect.

This follow-up action gives message to all employees that any indications of *fraud* reported or detected will always be processed according to applicable investigative standards and the perpetrators will be processed according to applicable regulations. This action includes but is not limited to the following activities:

a). Investigation

- Investigation is conducted based on a report or detected indication of *fraud* to collect complete and valid evidences, as well as to find out the main cause of the *fraud* incident (*root cause analysis*).

• Preliminary investigations may be conducted by the relevant work unit to collect initial evidences of indication of *fraud*.

• Further investigation process by the Anti Fraud Management and related parties.

• Anti Fraud Management is responsible for forming an investigation team and preparing investigative measures at the latest the 2nd day after the *fraud* indication report is received.

• The implementation of investigation applies the principle of presumption of innocence and the parties suspected of committing *fraud* should not be treated as guilty parties/suspects before the evidences of *fraud* are found.

- Proses investigasi harus tetap menjaga suasana kerja sehingga tidak mengganggu kegiatan operasional perusahaan.

- Selama proses investigasi dilakukan, pimpinan unit bagian dapat melakukan pembebasan tugas sementara kepada karyawannya yang diduga melakukan indikasi fraud untuk memperlancar proses investigasi.

- Dalam melakukan investigasi, tim investigasi memiliki akses tidak terbatas dan berhak untuk meminta atau menggeledah dokumen, data, serta informasi apapun yang terkait dengan kasus fraud.

- Setiap unit kerja terkait bertanggung jawab untuk memberikan permintaan dari tim investigasi dan menyimpan dokumen asli dan bukti-bukti lainnya yang ditemukan selama proses investigasi.

- Tim investigasi berhak untuk melakukan wawancara kepada pihak-pihak terkait guna klarifikasi data atau bukti yang ditemukan.

- Semua bukti-bukti yang ditemukan bersifat rahasia yang hanya dapat diakses oleh pihak-pihak yang berwenang dan disimpan dengan baik untuk keperluan pemeriksaan atau pembuktian pada ranah hukum.

- Jangka waktu proses investigasi sampai selesai ditentukan sesuai dengan kebutuhan tim investigasi.

b). Pelaporan

- Tim investigasi bertanggung jawab untuk selalu melaporkan setiap perkembangan investigasi baik secara lisan maupun tertulis kepada investigation Department Head selama proses investigasi dan membuat laporan investigasi secara lengkap dan tertulis setelah proses investigasi selesai.

- Laporan Investigasi sekurang-kurangnya berisi modus operandi, pihak-pihak yang terlibat, hasil verifikasi data dan bukti, faktor penyebab terjadinya fraud, ketentuan yang dilanggar, jumlah

- The investigation process shall maintain the working atmosphere so that it does not interfere with the company's operational activities.

- During the investigation process, the unit head may temporarily release the employees who are suspected of committing the indication of fraud in order to expedite the investigation process.

- In conducting an investigation, the investigation team has unlimited access and has the right to ask or search for any documents, data, and information related to the fraud case.

- Each relevant work unit is responsible for meeting the requests from the investigation team and keeping the original documents and other evidences found during the investigation process.

- The investigation team has the right to conduct interviews with related parties to clarify the data or evidences found.

- All evidences found are confidential which may only be accessed by the authorized parties and kept properly for the purposes of examination or proving in legal realm.

- The period for the investigation process to completion is determined according to the needs of the investigation team.

b). Reporting

- The investigation team is responsible for at all times reporting any progress of the investigation either orally or in writing to the Investigation Department Head during the investigation process and making a complete and written investigation report after the investigation process is complete.

- The Investigation Report should at least contain the modus operandi, the parties involved, the results of data and evidence verification, the factors causing the fraud, the provisions violated, the amount of

kerugian yang ditimbulkan, rekomendasi perbaikan, dan tindak lanjut yang harus dilakukan.

- Investigation Department Head bertanggung jawab untuk melakukan *review* laporan hasil investigasi sebelum ditunjukkan kepada management dan pihak-pihak terkait.
- Kasus fraud dapat dieskalasikan lebih lanjut ke ranah/petugas hukum sesuai dengan keputusan yang diambil oleh manajemen.

c). Sanksi

konsisten.

- Kebijakan pengenaan sanksi harus diterapkan secara transparan dan
- Pihak yang terbukti telah melakukan tindakan fraud diberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
- Pihak yang mengetahui adanya tindakan fraud tetapi tidak segera melaporkan kejadian tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Pengenaan sanksi dapat ditetapkan secara internal atau melalui jalur hukum.
- Penetapan tindakan indisipliner secara tegas dan konsisten menjadi pesan bahwa PT MNC Guna Usaha Indonesia menganggap fraud sebagai prioritas utama.
- Pihak yang dilaporkan melakukan indikasi fraud namun kemudian tidak terbukti, maka pihak tersebut wajib dilakukan rehabilitasi nama baiknya.
- Mekanisme dan wewenang pengenaan sanksi diatur dalam kebijakan terpisah.

4). Pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut (*Deterrence*)

Merupakan bagian dari sistem pengendalian fraud yang memuat langkah-langkah dalam rangka menjauhkan keinginan calon pelaku untuk melakukan fraud atau efek jera. Pada tahap ini langkah-langkah yang diambil perlu dikomunikasikan secara tepat untuk memastikan efektivitas dari strategi tersebut, adapun hal-hal yang perlu dikomunikasikan secara tepat adalah :

a). Pemantauan

Mengidentifikasi tindakan perbaikan dan upaya untuk mengurangi

losses incurred, recommendations for improvement, and follow-up to be taken.

- The Investigation Department Head is responsible for reviewing the report on the results of investigation before it is addressed to the management and related parties.
- Fraud cases may be escalated further to the legal realm/officer in accordance with the decisions made by the management.

c). Sanctions

transparently and consistently.

- Parties proven having committed fraudulent acts shall be given sanctions according to the applicable regulations.
- Parties who know any act of fraud but do not immediately report the incident may be subject to sanctions according to the applicable regulations.
- The imposition of sanctions may be specified internally or by legal means.
- The specification of disciplinary action expressly and consistently is a message that PT MNC Guna Usaha Indonesia considers fraud as a top priority.
- Any party reported giving indication of fraud but is later not proven, shall then be rehabilitated of his good name.
- The mechanism and authority for imposing sanctions are regulated in a separate policy.

4). Monitoring, evaluation and follow-up (*Deterrence*)

It is part of the fraud control system containing measures to prevent potential perpetrators from committing fraud or having a deterrent effect. At this stage the measures taken should be communicated appropriately to ensure effectiveness of the strategy, while the matters need to be communicated appropriately are:

a). Monitoring

Identifying corrective measures and efforts to reduce losses from occurring fraud cases.

kerugian dari kasus fraud yang terjadi.

Memastikan bahwa rekomendasi perbaikan atas kasus fraud baik dari unit investigasi, unit kontrol dan unit kerja lainnya termasuk Direksi atau Dewan Komisaris dilaksanakan.

Melakukan update informasi perkembangan proses kepegawaian, proses ke ranah hukum atau litigasi atas pelaku fraud dan proses *recovery* bila ada.

b). Evaluasi

- Evaluasi dilakukan secara berkala terhadap kejadian fraud untuk kemudian ditentukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan, termasuk memperkuat sistem pengendalian internal.

- Evaluasi juga dilakukan pada aktivitas lainnya yang terkait mengenai kecukupan internal kontrol dan sistem. Evaluasi juga memasukkan unsur eksternal yang relevan, misalnya kejadian fraud yang terjadi di perusahaan

lain.

- Untuk mendukung pelaksanaan evaluasi, maka perusahaan perlu untuk memelihara data kejadian fraud yang terjadi (*consolidated - fraud database*).

c). Tindak lanjut

- Tindak lanjut dilakukan untuk memperbaiki kelemahan dan memperkuat sistem pengendalian internal agar dapat mencegah terulangnya kembali fraud karena kelemahan serupa.

- Tindak lanjut berupa rekomendasi dari manajemen dan/atau unit-unit yang terkait, yang diimplementasikan baik secara luas maupun spesifik pada unit-unit terkait.

- Pemantauan atas pelaksanaan rekomendasi perbaikan perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan pelaksanaan dan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan.

Ensuring that the recommendations for improvement on fraud cases from the investigation unit, control unit and other work units including the Board of Directors or Board of Commissioners are implemented.

Updating information on the development of staffing process, legal process or litigation on fraud perpetrators and recovery process if any.

b). Evaluation

- Evaluation is carried out periodically on fraud incidents to later determine the required corrective measures, including strengthening the internal control system.

- Evaluation is also carried out on other related activities regarding the adequacy of internal controls and systems. Evaluation also includes relevant external elements, for example fraud incidents occurring in other companies.

- To support the implementation of evaluation, the company shall maintain the data on occurring fraud incidents (*consolidated - fraud database*).

c). Follow-up

- Follow-up is conducted to correct weaknesses and strengthen the internal control system in order to prevent the recurrence of fraud due to similar weaknesses.

- Follow-up shall be in the form of recommendations from the management and/or related units implemented widely and specifically in related units.

- Monitoring on the implementation of recommendations for improvement should be conducted periodically to ensure the implementation and effectiveness of the recommendations given.

15. PENGUNGKAPAN HAL-HAL PENTING LAINNYA

- a. Sertifikasi
Sesuai dengan Peraturan OJK No. 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, Dewan Komisaris, Direksi, dan pejabat tertentu wajib mengikuti sertifikasi di bidang pembiayaan, manajemen risiko, atau penagihan sesuai kriteria.

15. DISCLOSURE OF OTHER SIGNIFICANT MATTERS

- a. Certification
In accordance with OJK Regulation No.35/POJK.05/2018 on Business Operation of Financing Companies, the Board of Commissioners, Directors, and certain officials shall take certification in the fields of financing, risk management, or billing according to the criteria.

1. Sertifikasi Ahli Pembiayaan bagi Direksi

No No	Nama Pejabat Name of Official	Posisi Position	No. Sertifikat Certificate No.	Tgl. Sertifikat Certificate Date
	Paulus Cholot Janala	Direktur Utama President Director	8177-50029-600-0218	3 Februari 2018 3rd February 2018
	Yusnandi Liauw	Director	8177-50006-600-0717	7 Juli 2017 7th July 2017
	Henri Gunawan	Director	8177-50042-600-0919	8 September 2019 8th September 2019

1. Certification of Financing Expert for Directors

2. Sertifikasi Dasar Pembiayaan bagi Komisaris

No No	Nama Pejabat Name of Official	Posisi Position	No. Sertifikat Certificate No.	Tgl. Sertifikat Certificate Date
	Erdie S. Manan	Komisaris Independen Independent Com- missioner	8177-50009-550-0717	27 Juli 2017 27th July 2017
	Wito Mailoa	Komisaris Utama President Commis- sioner	8177-50035-550-0219	7 Februari 2019 7th February 2019

2. Certification of Basic Financing for Commissioners

3. Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Direksi yang Membawahkan Manajemen Risiko dan Pejabat Manajemen Risiko

No No	Nama Pejabat Name of Official	Posisi Position	No. Sertifikat Certificate No.	Tgl. Sertifikat Certificate Date
	Paulus Cholot Janala	Direktur Utama President Director	1804171147000557	17 April 2018 17th April 2018
	Nurul Fikri Maulana	Compliance & Risk Department Head Compliance & Risk Department Head	1804171147000550	17 April 2018 17th April 2018

3. Certification of Risk Management for Directors Supervising the Risk Management and Risk Management Officials

TATA KELOLA PERUSAHAAN
Corporate Governance

- | | |
|---|--|
| <p>b. Tenaga Kerja Asing
Selama tahun 2020, PT MNC Guna Usaha Indonesia tidak mempekerjakan tenaga kerja asing.</p> | <p>b. Foreign workers
During 2020, PT MNC Guna Usaha Indonesia did not employ foreign employees.</p> |
| <p>c. Transaksi Material dengan Pihak Terkait
Penyaluran pembiayaan kepada pihak terkait mengacu kepada ketentuan internal perusahaan mengenai Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan kepada Pihak Terkait yang mematuhi dan mengacu kepada Peraturan OJK No. 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.</p> | <p>c. Material Transactions with Related Parties
The distribution of financing to related parties refers to the company's internal conditions on the Maximum Limit for Financing to Related Parties complying with and referring to OJK Regulation No.35/POJK.05/2018 on Business Implementation of Financing Companies.</p> |
| <p>d. Benturan kepentingan yang sedang berlangsung dan/atau yang mungkin akan terjadi</p> | <p>d. Conflict of interest in process and/or that might happen</p> |

No	Nama Dan Jabatan Pihak Yang Memiliki Benturan Kepentingan Name and Position of Party Having Conflict of Interest	Nama Dan Jabatan Pengambil Keputusan Name and Position of Decision Maker	Jenis Transaksi Type of Transaction	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah) Transaction Value (Million Rupiah)	Keterangan *) Note *)
	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil

- | | |
|---|-------------------------------------|
| <p>e. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)</p> | <p>e. Number of Internal Frauds</p> |
|---|-------------------------------------|

Penyimpangan Internal Dalam 1 (satu) Tahun Internal Frauds In 1 (one) Year	Jumlah Kasus Yang Dilakukan Oleh Number of Cases Conducted by		
	Anggota Dewan Komisaris, Anggota DPS dan Anggota Pegawai Tetap Member of Board of Commissioners, Member of DPS and Member of Board of Directors	Direksi Pegawai Tetap Full-time Employee	Direksi Pegawai Tidak Tetap Temporary Employee
Total Penyimpangan Total Irregularities	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil
Telah Diselesaikan Settled	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil
Dalam Proses Penyelesaian di Internal In Process of Settlement Internally	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil
Belum Diupayakan Penyelesaian No Settlement is Attempted	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil
Telah Ditindaklanjuti melalui Proses Hukum Followed up by Legal Process	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil

f. Permasalahan Hukum

f. Legal Issues

Permasalahan Hukum Legal Issue	Jumlah Kasus Number of Cases	
	Perdata Civil	Pidana Criminal
Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap Having received a final and binding decision	Nihil Nil	Nihil Nil
Dalam proses penyelesaian di Pengadilan dan di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa untuk kasus Perdata In settlement process in the Court and in Alternative Dispute Settlement Institution for Civil Cases	Nihil Nil	Nihil Nil
Total Total	Nihil Nil	Nihil Nil

g. Etika Bisnis Perusahaan

Manajemen Perusahaan menyadari bahwa keberlanjutan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh perilaku korporasi atau etika bisnis perusahaan, sehingga etika bisnis perusahaan harus selaras dengan hukum, peraturan, etika, dan sistem manajemen yang efektif. Dalam rangka membangun perilaku korporasi tersebut bagi Komisaris, Direksi, dan segenap karyawan Perusahaan, maka diterbitkan kebijakan *Code Of Conduct & Corporate Values*.

Panduan perilaku digali berdasarkan visi, misi, nilai-nilai budaya, komitmen Perusahaan dan standar etika. Seluruh jajaran PT MNC Guna Usaha Indonesia harus mengetahui, memahami, menghayati dan sepakat untuk menerapkan kebijakan *Code Of Conduct & Corporate Values* sebagai landasan moral, sikap, dan etika dalam bertindak dan berperilaku, sehingga daripadanya dapat terjamin pencapaian standar kerja yang maksimal.

Hal-hal yang dicakup dalam kebijakan tersebut, antara lain:

- 1). Integritas dalam Berusaha, seluruh jajaran PT MNC Guna Usaha Indonesia diharapkan memiliki integritas sebagai berikut :
 - a). Patuh pada ketentuan dan perundangan yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang maupun internal Perusahaan.
 - b). Mendukung prinsip-prinsip persaingan usaha sejalan dengan undang-undang persaingan usaha serta undang-undang maupun peraturan terkait.

g. Company Business Ethics

The Company's management realizes that the sustainability of a company is strongly influenced by corporate behavior or company business ethics, so that the company's business ethics should be in line with the laws, regulations, ethics, and an effective management system. In order to develop this corporate behavior for the Commissioners, Directors, and all employees of the Company, a Code Of Conduct & Corporate Values policy was issued.

The code of conduct is explored based on the Company's vision, mission, cultural values, commitments and ethical standards. All ranks of PT MNC Guna Usaha Indonesia should know, understand, appreciate and agree to apply the Code Of Conduct & Corporate Values policy as the basis for morals, attitudes, and ethics in acting and behaving, so that achievement of maximum work standards can be guaranteed. The aspects covered by the policy include:

- 1). Integrity in Undertaking Business, all ranks of PT MNC Guna Usaha Indonesia are expected to have the following integrity:
 - a). Comply with the applicable laws and regulations, either stipulated by the competent authorities or internally by the Company.
 - b). Support the principles of business competition in line with the law on business competition and related laws and regulations.

c). Menghindari tindakan melanggar hukum, serta persaingan usaha yang tidak sehat atau perilaku menyimpang dalam upaya mencari laba.

d). Mengupayakan perolehan informasi melalui cara-cara yang sah. Informasi disimpan serta digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip etika usaha yang berlaku.

e). Melayani setiap pelanggan secara profesional dengan sikap sopan, ramah dan wajar. Seluruh jajaran PT MNC Guna Usaha Indonesia harus tanggap dan berusaha memahami kebutuhan serta mencari alternatif solusi atas masalah pelanggan dengan sebaik-baiknya dan dengan tetap memperhatikan kepentingan Perusahaan dan peraturan perundangan yang berlaku.

2). Setiap pihak di dalam Perusahaan yang berkaitan dengan pemasaran, penyiapan proposal, administrasi, negosiasi termasuk akuntansi untuk biaya dan kewajiban, kajian atas proyek-proyek tertentu dan penulisan laporan harus menyadari pentingnya membuat pernyataan tertulis maupun lisan yang akurat dan klaim yang benar kepada pimpinan, Pemerintah maupun kepada pihak lain. Pihak yang sengaja menyampaikan pernyataan, laporan, keterangan atau klaim yang tidak benar atau yang menyesatkan atau yang melibatkan adanya konspirasi dengan orang/ pihak lain yang dapat merugikan Perusahaan dapat dikenakan hukuman administratif, pidana dan perdata.

3). Seluruh jajaran PT MNC Guna Usaha Indonesia dilarang untuk membuat pernyataan palsu.

4). Setiap jajaran PT MNC Guna Usaha Indonesia dilarang melakukan hal-hal yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dan implikasi lanjutannya.

5). Perusahaan melarang setiap jajaran PT MNC Guna Usaha Indonesia menerima hadiah dalam segala macam bentuk penerimaan oleh pejabat atau karyawan Perusahaan dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan Perusahaan dengan maksud mempengaruhi keputusan agar menguntungkan kepentingan si pemberi hadiah.

6). Perusahaan melarang setiap jajaran PT MNC Guna Usaha Indonesia untuk menerima segala bentuk uang, komisi, hadiah, fasilitas, dan apapun yang

c). Avoid unlawful acts, and unfair business competition or deviant behavior in an effort to seek profit.

d). Endeavor to obtain information through legal means. Information is kept and used according to the applicable principles of business ethics.

e). Serve every customer professionally with a polite, friendly and reasonable attitude. All ranks of PT MNC Guna Usaha Indonesia must be responsive and try to understand the needs and find alternative solutions to customer problems to the best possible while observing the Company's interests and applicable legislation.

2). Each party in the Company related to marketing, proposal preparation, administration, negotiation including accounting for costs and liabilities, review on certain projects and report writing should be aware of the importance of making accurate written and verbal statements and true claims to the management, government and other parties. Any party intentionally submitting statements, reports, information or claims that are untrue or misleading or involving any conspiracy with other persons/parties that may harm the Company may be subject to administrative, criminal and civil penalties.

3). All ranks of PT MNC Guna Usaha Indonesia are prohibited from making false statements.

4). Any employee of PT MNC Guna Usaha Indonesia is prohibited from doing things potentially causing conflicts of interest and the subsequent implications.

5). The Company prohibits any employee of PT MNC Guna Usaha Indonesia from accepting gifts of any kinds by the Company's officials or employees from parties having interest in the Company with the intention of influencing decisions to benefit the gift givers.

6). The company prohibits any employee of PT MNC Guna Usaha Indonesia from accepting any form of money, commission, gifts, facilities, and anything

bernilai manfaat, yang diberikan atau diminta, sebagai kompensasi secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan perlakuan istimewa atau perilaku yang memihak secara

tidak sah dari rekanan atau konsumen atau pihak lain. Penegakan disiplin dari segala bentuk penerimaan suap ini adalah pemecatan, dengan tidak mengurangi hak Perusahaan untuk memproses sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

7). Pada prinsipnya entertainment hanya dapat dilakukan oleh Direksi, Komisaris dan Pekerja tertentu untuk kepentingan Perusahaan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai Perusahaan.

8). Perusahaan melarang setiap bentuk penyelewengan dan senantiasa menerapkan prosedur yang wajib diikuti berkaitan dengan temuan, pengakuan, pelaporan, penyelidikan dan penyidikan terhadap kecurangan adanya penyelewengan.

9). Tidak memperkenankan karyawan Perusahaan menjadi pengurus partai politik yang berpotensi menyita jam kerja maupun konsentrasi, kecuali dengan persetujuan atasan.

h. Informasi material lain mengenai Perusahaan yang terkait dengan pelaksanaan wewenang RUPS dan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, antara lain berupa intervensi pemilik, perselisihan internal, atau permasalahan yang timbul sebagai dampak kebijakan remunerasi pada Perusahaan. Selama tahun 2020, tidak ditemukan adanya intervensi pemilik, perselisihan internal, maupun permasalahan yang timbul secara langsung dari dampak kebijakan remunerasi pada Perusahaan.

of value, given or requested, as direct or indirect compensation to get preferential treatment or impartial behavior illegally from vendors or consumers or other parties. The enforcement of discipline of all kinds of accepting bribes shall be dismissal, without prejudice to the Company's right to process according to the provisions of applicable legislation.

7). Principally, entertainment may only be carried out by the Directors, Commissioners and certain Employees for the Company's benefit and in accordance with the applicable regulations and does not conflict with the Company's values.

8). The Company prohibits any form of fraud and at all times implements procedures to be observed related to findings, confessions, reporting, inquiries and investigations of fraud.

9). Company's employees shall not be allowed to become administrators of political parties having the potential of taking up the work hours and concentration, except with the superior's approval.

h. Other material information on the Company related to the implementation of the GMS' authority and the implementation of Good Corporate Governance, among others in the form of owner intervention, internal disputes, or problems arising as a result of remuneration policy in the Company.

During 2020, there was no owner intervention, internal dispute, or problem arising directly from the impact of remuneration policy in the Company.

PERKARA PENTING YANG DI HADAPI

Important Cases Encountered

Pada tanggal Laporan Tahunan ini dibuat, Perseroan tidak terlibat dalam suatu perkara baik perkara perdata, pidana dan perpajakan maupun suatu sengketa hukum/perselisihan lain yang terjadi di luar pengadilan, yang dapat berpengaruh secara material terhadap kondisi keuangan dan kegiatan usaha Perseroan.

As of the date of this Annual Report, the Company is not involved in any civil, criminal and tax cases as well as any legal dispute/other dispute taking place outside the court, which may materially affect the Company's financial condition and business activities.



TANGGUNG JAWAB
SOSIAL DAN LINGKUNGAN

07

TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

Social and Environmental Responsibilities

Perusahaan merupakan anak perusahaan PT MNC Kapital Indonesia Tbk yang tergabung dalam Group MNC Financial Services yang dalam menjalankan usahanya selalu memperhatikan, menerapkan dan mengembangkan program-program pengembangan bidang sosial dan lingkungan hidup. Perusahaan mengupayakan partisipasi dari komunitas di sekitar tempat usaha Perusahaan dan pelanggan untuk ikut terlibat dalam kegiatan sosial dan lingkungan hidup yang diadakan oleh Perusahaan.

Program-program Corporate Social Responsibility (CSR) yang dilakukan oleh Perseroan di tahun 2020 antara lain sebagai berikut:

1). Desa Binaan, Pantai Bhakti Muara Gembong - Bekasi

PT MNC Guna Usaha Indonesia bekerja sama dan turut mendukung MNC Peduli dan Institute Transportasi & Logistik (ITL) Trisakti untuk membantu anak-anak dalam meningkatkan minat baca serta mendorong anak untuk berani berbicara di SDN 02 Pantai Bakti 02, Muara Gembong, Kabupaten Bekasi pada Sabtu 7 Maret 2020.

Pendidikan anak merupakan tantangan terbesar bagi Indonesia, meningkatkan minat baca dan berani dalam mengungkapkan pendapat masih merupakan hal yang sulit bagi anak-anak Indonesia. Untuk meningkatkan minat baca, PT MNC Guna Usaha Indonesia, MNC Peduli, dan ITL Trisakti memberikan buku cerita anak dan buku lainnya untuk perpustakaan di sekolah tersebut. Selain itu, guru-guru juga diberikan pelatihan untuk pengelolaan perpustakaan dengan tujuan agar pengelolaan administratif dalam peminjaman buku lebih nyaman baik bagi para siswa dan guru.

PT MNC Guna Usaha Indonesia, MNC Peduli, dan ITL Trisakti juga turut membawa reporter dari MNC Media untuk melatih para siswa mengenai *creative writing & public speaking* dengan tujuan melatih fokus anak dalam membaca, menganalisa dan mencerna suatu cerita dan melatih anak untuk dapat percaya diri dan berani mengungkapkan pendapatnya mengenai suatu hal.

The company is a subsidiary of PT MNC Kapital Indonesia Tbk as a part of the MNC Financial Services Group which in undertaking its business always considers, implements and develops social and environmental development programs. The Company seeks participation from the community around the Company's and customers' business premises to be involved in social and environmental activities organized by the Company.

The Corporate Social Responsibility (CSR) programs carried out by the Company in 2020 are namely:

1). Fostered Village, Bhakti Muara Gembong Beach - Bekasi

PT MNC Guna Usaha Indonesia is collaborating and supporting MNC Peduli and the Trisakti Institute of Transportation & Logistics (ITL) to help children increase their interest in reading and encourage children to speak up at SDN 02 Pantai Bakti 02, Muara Gembong, Bekasi Regency on Saturday, March 7, 2020.

Children's education is the biggest challenge for Indonesia, increasing interest in reading and being brave in expressing opinions are still difficult for Indonesian children.

To increase interest in reading, PT MNC Guna Usaha Indonesia, MNC Peduli, and Trisakti ITL provided children's story books and other books for the school's library. In addition, teachers were also given training for library management in order that the administrative management of books borrowing would be more convenient for both the students and teachers.

PT MNC Guna Usaha Indonesia, MNC Peduli, and Trisakti ITL also brought reporters from MNC Media to train students on creative writing & public speaking in order to train children's focus in reading, analyzing and digesting stories and train children to be confident and dare to express their opinions on something.



2). Pananaman Bibit Mangrove Ecotourism PIK - Jakarta

PT MNC Guna Usaha Indonesia menggandeng kembali MNC Peduli, kali ini untuk mengadakan kegiatan penanaman 1.000 bibit tanaman mangrove di kawasan ekowisata Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara pada hari Jumat, 13 Maret 2020.

Penanaman mangrove ini sangat penting karena dapat melindungi pesisir Indonesia dari erosi maupun abrasi yang terus-terusan terjadi. Selain itu juga berguna untuk memperkaya flora fauna air payau yang hidup dari pohon mangrove serta meningkatkan dampak positif bagi ekonomi dan kualitas lingkungan hidup secara luas.

Pada acara yang sama PT MNC Guna Usaha Indonesia juga memberikan edukasi kepada karyawannya terkait keuangan berkelanjutan serta manfaat dari penanaman pohon mangrove.

2). Planting Mangrove Seeds of PIK Ecotourism - Jakarta

PT MNC Guna Usaha Indonesia again collaborated with MNC Peduli, this time to hold an activity of planting 1,000 mangrove seeds in the Pantai Indah Kapuk ecotourism area, North Jakarta on Friday, March 13, 2020.

Mangrove planting is very important because it can protect the coast of Indonesia from erosion and abrasion that continuously occur. In addition, it is also useful for enriching the flora and fauna of brackish water that live from mangrove trees and increasing the positive impact on the economy and the quality of environment in general.

At the same event, PT MNC Guna Usaha Indonesia also gave education to its employees regarding sustainable finance and the benefits of planting mangrove trees.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
Social and Environmental Responsibilities



PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2018 PT MNC GUNA USAHA INDONESIA

Statement of Board of Commissioners and Board of Directors on Responsibility for Annual Report

Kami yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam laporan tahunan PT MNC Guna Usaha Indonesia tahun 2018 telah dimuat secara lengkap dan kami bertanggungjawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan Perseroan.

We the undersigned states that all information in the annual report 2019 of PT MNC Guna Usaha Indonesia has been contained in complete and we are fully responsible for the correctness of the Company's annual report content.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement is made truly.

Jakarta, 25 Februari 2019
Jakarta, 24th February 2020

DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS



Wito Mailoa

Komisaris Utama



Erdie Suriaherdadi Manan

Komisaris Independen

DIREKSI



Paulus Cholot Janala

Direktur Utama



Yusnandi Liauw

Direktur




Meita Liliarsari


Direktur



PT. MNC Guna Usaha Indonesia

MNC Tower Lantai 23
Jl. Kebon Sirih No. 17-19
Jakarta Pusat 10340
Indonesia

 : (021) 3910 993

 : (021) 3911 093

 : www.mncleasing.com